

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA DALAM
PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA FIJI PASCA
BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016**

SKRIPSI

**Sebagai Upaya Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
Perminatan Utama *International Security and Peace***



Disusun Oleh:

REZHA HADYAN

135120407121031

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA DALAM
PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA FIJI PASCA
BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016**

SKRIPSI

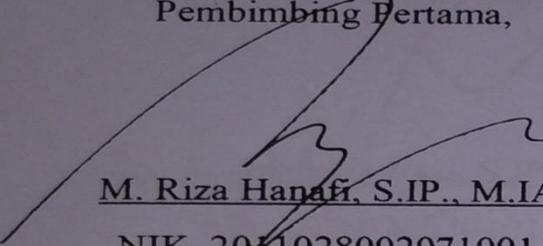
Disusun Oleh:

Rezha Hadyan

135120407121031

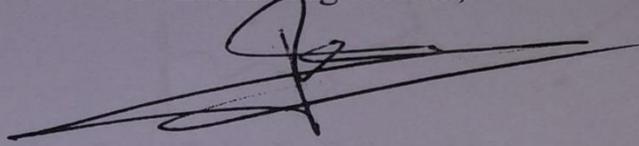
Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Pertama,


M. Riza Hanafi, S.IP., M.IA

NIK. 2011028002071001

Pembimbing Kedua,


Joko Purnomo, S.IP., MA

NIP. 197804012009121002

Tanggal: 23 November 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional
Universitas Brawijaya



Aswin Ariyanto Azis S.IP., M.DevSt

197802202010121001

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA DALAM
PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA FIJI PASCA
BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

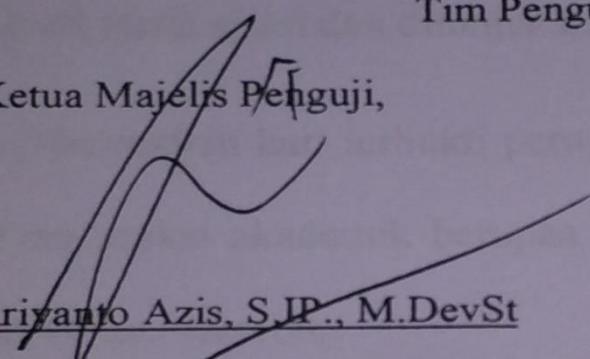
Rezha Hadyan

135120407121031

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian Sarjana pada tanggal 23 Oktober
2017

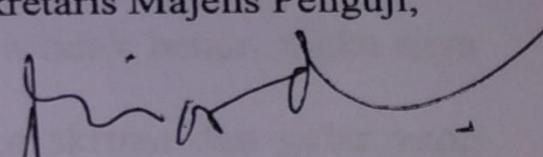
Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji,


Aswin Ariyanto Azis, S.IP., M.DevSt

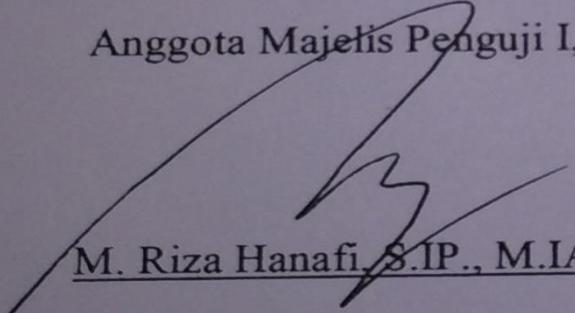
NIP. 197802202010121001

Sekretaris Majelis Penguji,


Reza Triarda, S.Sos., M.A

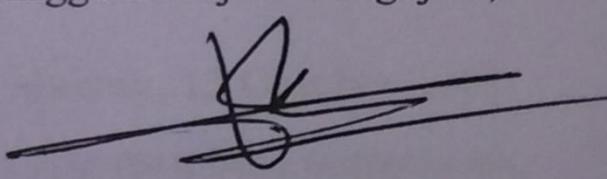
NIK. 2016078902131001

Anggota Majelis Penguji I,


M. Riza Hanafi, S.IP., M.IA

NIK. 2011028002071001

Anggota Majelis Penguji II,


Joko Purnomo, S.IP., M.A

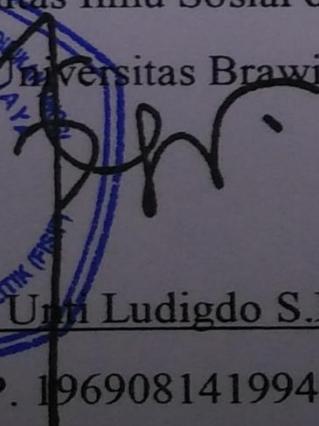
NIP. 197804012009121002a

Malang, 23 November 2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Brawijaya




Prof. Dr. Umi Ludigdo S.E., M.Si., Ak

NIP. 196908141994021001

HALAMAN PERNYATAAN**Nama Rezha Hadyan****NIM : 135120407121031**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA DALAM**PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA FIJI PASCA****BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016”** adalah benar-benar

karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam skripsi

tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang

saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 13 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,

Rezha Hadyan

135120407121031

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan judul **“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Bantuan Kemanusiaan Indonesia Kepada Fiji Pasca Bencana Topan Winston pada Tahun 2016”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Skripsi ini secara umum membahas terkait faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji pada tahun 2016 menggunakan konsep *the Politics of Humanitarian Aid*.

Skripsi penulis secara keseluruhan terdiri dari enam bab. Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dari skripsi penulis. Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang terdiri dari uraian mengenai studi terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan penulisan skripsi, kajian konseptual yang membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah, operasionalisasi konsep, alur pemikiran, dan argumen utama yang penulis ajukan. Bab III merupakan bab metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi penulis. Bab IV merupakan bab gambaran umum yang memberikan penjelasan secara umum mengenai hal – hal yang berkaitan dengan pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

Bab V merupakan bab yang menjelaskan hasil dari analisis terkait dengan kasus yang diangkat oleh penulis menggunakan konsep yang telah dipilih sebelumnya dan membuktikan argumen utama penulis. Bab VI merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan dan saran bagi peneliti selanjutnya.

Penulis berharap skripsi yang mengambil tema bantuan luar negeri, khususnya mengenai bantuan kemanusiaan ini dapat memberikan manfaat kepada bagi banyak pihak, khususnya *civitas academica* Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya. Semoga skripsi ini mampu memberikan wawasan, ilmu, dan inspirasi bagi para peneliti Ilmu Hubungan Internasional selanjutnya. Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan selamat membaca.

Malang, 23 November 2017

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman persembahan ini merupakan wujud ucapan terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini, yakni:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan anugrah yang diberikan-Nya penulis mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti.
2. Kedua orang tua penulis, Papa Ismit Addary dan Mama Silvia Hanum yang memberikan dukungan dan telah menjadi sponsor tunggal penulis selama menempuh pendidikan selama ini, serta tak lupa adik kandung penulis Handry Aqil Alim yang juga ikut memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih atas berbagai dukungan khususnya do'a yang telah kalian berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa, yakni proses penyusunan skripsi ini.
3. Kakek Hattamarasjid dan Nenek Suainati beserta keluarga besar lainnya yang ikut memberikan dukungan khususnya do'a kepada penulis untuk menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak M. Riza Hanafi S.IP., M.IA. selaku dosen pembimbing pertama skripsi penulis yang telah memberikan banyak dukungan kepada penulis berupa saran, kritik, ide, maupun dorongan moral kepada penulis untuk menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Joko Purnomo S.IP., M.A. selaku dosen pembimbing kedua skripsi penulis yang ikut memberikan masukan, arahan, serta dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, khususnya pada saat proses revisi atau perbaikan.

6. Bapak Aswin Ariyanto Azis S.IP., M. DevSt. dan Bapak Reza Triarda S.Sos., M.A. selaku majelis penguji yang telah menguji penulis dan memberikan banyak saran dan kritik yang membangun kepada penulis sebagai upaya untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Dosen atau staf pengajar yang selama masa studi penulis di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya telah mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk mendidik, membagi ilmu pengetahuan serta wawasan yang dimiliki kepada penulis selama kurang lebih empat tahun hingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

8. Staf administrasi Program Studi Hubungan Internasional, khususnya Mas Dadang yang selalu siap sedia, dan sabar dalam membantu penulis memenuhi berbagai proses administrasi selama proses perkuliahan selama kurang lebih empat tahun.

9. Joesevien Nur Andini dan Sarah Farida Ainun yang telah memberikan pencerahan yang sangat berarti kepada penulis untuk melanjutkan proses penyusunan skripsi ini di tengah-tengah kebuntuan yang sempat penulis alami.

10. Sahabat penulis yang selalu setia menemani penulis dari awal penulis menempuh studi di Kota Malang hingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini, yakni Achyadina Firdaus dan Yosephin

Puspita. Terimakasih atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis.

11. Salah satu wanita yang tak perlu penulis sebutkan namanya disini, terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini hingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Terima kasih karena selalu ada untuk penulis dan bersedia menemani penulis di kala suka maupun duka.

12. Teman - teman seperjuangan ujian komprehensif periode pertama semester ganjil tahun ajaran 2017/2018 yang telah memberikan dukungan serta meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan *me-review* kembali skripsi ini sebelum pelaksanaan ujian komprehensif.

13. Teman - teman Kelas Inggris Hubungan Internasional Universitas Brawijaya angkatan 2013 yang telah memberikan banyak pengalaman berharga dan tak terlupakan kepada penulis selama kurang lebih tiga tahun menjalani masa perkuliahan bersama di kelas yang sama. Terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan khususnya yang berkaitan dengan proses penyusunan skripsi ini.

14. Teman - teman Hubungan Internasional Universitas Brawijaya angkatan 2013 yang ikut memberikan banyak bantuan serta dukungan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, menjalani masa perkuliahan hingga berhasil menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

15. Teman – teman kontrakan Poharin D148 yang telah memberikan banyak bantuan serta dukungan kepada penulis selama penulis berada di Kota

Malang untuk menempuh studi penulis hingga berhasil menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan khususnya proses penyelesaian penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Malang, 23 November 2017

Penulis



**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDONESIA DALAM
PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN KEPADA FIJI PASCA
BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016**

Disusun oleh:

Rezha Hadyan (135120407121031)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Seperti yang dikemukakan oleh A. Cooper Drury, Richard Stuart Olson, dan Douglas A. Van Belle dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid*, bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh suatu negara dapat dipengaruhi oleh faktor – faktor politik yang dapat dilihat melalui kebijakan luar negeri negara donor terkait dengan negara resipien, fokus politik domestik negara donor, politik domestik negara resipien, dan bencana yang terjadi di negara resipien.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 dipengaruhi oleh beberapa faktor – faktor politik, antara lain adanya kedekatan hubungan antara Indonesia dan Fiji khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Papua Barat, adanya kesamaan rezim pemerintahan antara Indonesia dan Fiji, turunnya defisit anggaran Indonesia, rasa empati dari Indonesia, adanya upaya dari Pemerintah Fiji dalam mengurangi tingkat korupsi, dan membaiknya kondisi politik domestik Fiji. Terakhir, yakni faktor non – politik dimana jenis bencana yang terjadi merupakan bencana berskala besar yang menimbulkan dampak kerugian sangat besar bagi Fiji.

Kata kunci: Indonesia, Fiji, Bantuan Luar Negeri, Bantuan Kemanusiaan, *Politics of Humanitarian Aid*.

FACTORS THAT AFFECT INDONESIA'S HUMANITARIAN AID TO FIJI AFTER WINSTON CYCLONE DISASTER IN 2016

Written By:

Rezha Hadyan (135120407121031)

ABSTRACT

This research aims to determine the factors that affect Indonesia in providing humanitarian assistance to Fiji after Typhoon Winston disaster in 2016. As suggested by A. Cooper Drury, Richard Stuart Olson, and Douglas A. Van Belle in their concept namely the Politics of Humanitarian Aid stated that humanitarian assistance provided by a country can be influenced by political factors that can be seen through the donor country's foreign policy related to the recipient country, the domestic donor's domestic policy focus, the domestic politics of the recipient country, and the disaster occurring in the recipient country.

The results of research conducted by the authors shows that the provision of humanitarian aid Indonesia to Fiji after Typhoon Winston disaster in 2016 influenced by several political factors, among others the proximity of relations between Indonesia and Fiji, especially related to West Papua problems, the similarity of government regimes between Indonesia and Fiji, the decline in Indonesia's budget deficit, a sense of empathy from Indonesia, the efforts of the Fijian Government to reduce corruption, and improving domestic political conditions in Fiji. Finally, the non-political factor in which the type of disaster that occurred was a large-scale disaster that caused a huge loss for Fiji.

Keywords: Indonesia, Fiji, Foreign Aid, Humanitarian Aid, and the Politics of Humanitarian Aid.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II – TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Studi Terdahulu.....	12
2.1.1 <i>Calculation of Goodwill: Humanitarianism, Strategic Interest, and the US Response to Typhoon Yolanda</i>	12
2.1.2 <i>Is the Allocation of Food Aid Free from Donor Interest Bias?</i>	17
2.2 Kajian Konseptual.....	21
2.2.1 Konsep Bantuan Luar Negeri.....	21
2.2.2 <i>Humanitarian Aid</i>	25
2.2.3 <i>The Politics of Humanitarian Aid</i>	28
2.3 Operasionalisasi Konsep.....	39
2.3.1 <i>Political Connection</i>	39
2.3.2 <i>Non Political Factors</i>	47
2.4 Alur Pemikiran.....	50
2.5 Hipotesis.....	51
BAB III – METODE PENELITIAN.....	52
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.4 Teknik Analisis Data.....	53



3.5 Sistematika Penulisan.....	54
BAB IV - BANTUAN KEMANUSIAAN INDONESIA KEPADA FIJI PASCA BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016.....	56
4.1 Bantuan Luar Negeri Indonesia	56
4.1.1 Bantuan Pembangunan Kapasitas Kepada Negara-Negara Berkembang	57
4.1.2 Bantuan Kemanusiaan Indonesia	65
4.2 Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Fiji	71
4.3 Bencana Topan Winston di Fiji pada Tahun 2016.....	79
4.4 Bantuan Kemanusiaan Indonesia Kepada Fiji Pasca Bencana Topan Winston pada Tahun 2016.....	84
BAB V - ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BANTUAN KEMANUSIAAN INDONESIA KEPADA FIJI PASCA BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016	96
5.1 <i>Political Connection</i>	96
5.1.1 <i>Donor Foreign Policy Concern or Reservation about the Potential Recipient State</i>	97
5.1.2 <i>Donor Domestic Political Concerns</i>	121
5.1.3 Domestic Politics within the Potential Recipient State	134
5.1.3.1 <i>Recipient Level of Corruption</i>	135
5.1.3.2 <i>Recipient Political Fractiousness</i>	139
5.2 <i>Nonpolitical Factor</i>	148
5.2.1 <i>Type of Disaster</i>	149
5.3 Faktor Dominan yang Mempengaruhi Bantuan Kemanusiaan Indonesia Pasca Bencana Topan Winston pada Tahun 2016.....	151
BAB VI - KESIMPULAN	156
6.1 Kesimpulan.....	156
6.2 Saran	161
DAFTAR PUSTAKA	164



DAFTAR GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL**Gambar**

Gambar 2.1 Foreign Disaster Relief (Humanitarian Service)

Gambar 4.1 Grafik Populasi di Masing – Masing Divisi yang Terdampak
Bencana Topan Winston di Fiji

Gambar 4.2 Infografis Bencana Topan Winston di Fiji

Grafik

Grafik 5.1 Pendapatan Nasional Kotor atau *Gross National Income* (GNI) Fiji
pada Tahun 2006-2016

Grafik 5.2 Pendapatan Nasional Kotor atau *Gross National Income* (GNI)
Indonesia pada Tahun 2006-2016

Grafik 5.3 Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia
Tahun 2012-2016

Grafik 5.4 Grafik Peristiwa Bencana di Indonesia Tahun 2006-2015

Tabel

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep the Politics of Humanitarian Aid

Tabel 4.1 Data Bantuan Indonesia ke Beberapa Kawasan dan Negara

Tabel 5.1 Indikator Utama Human Development Index Fiji

Tabel 5.2 Indikator Utama Human Development Index Indonesia

Tabel 5.3 Data Indikator *Control of Corruption* the World Bank's Worldwide
Governance Index Fiji Tahun 2006-2016

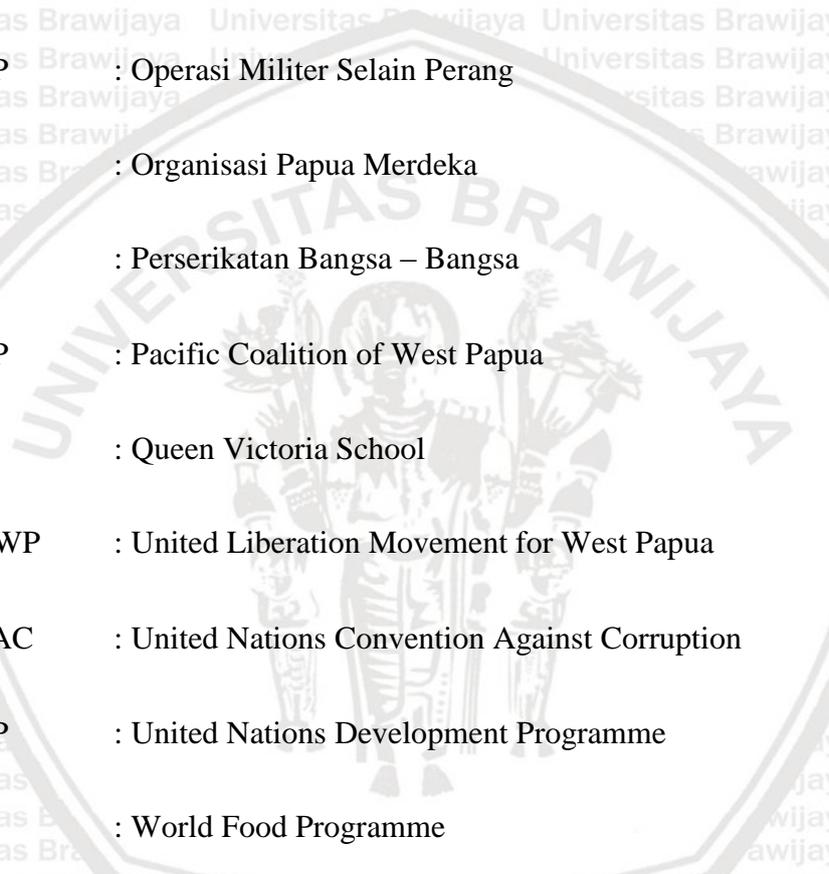
Tabel 5.4 Data Indikator *Political Stability and Absence of Violence and Terrorism* the World Bank's Worldwide Governance Index Fiji Tahun 2006-2016

Tabel 5.5 Data Indikator *Rule of Law* the World Bank's Worldwide Governance Index Fiji Tahun 2006-2016



DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BSBI	: Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia
DFAT	: Departement of Foreign Affairs and Trade
DIBI	: Data Informasi Bencana Indonesia
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
FICAC	: Fiji Independent Commission Against Corruption
FEO	: Fiji Election Office
GDP	: Gross Domestic Product
GNI	: Gross National Income
HDI	: Human Development Index
HDR	: Human Development Report
KAA	: Konferensi Asia Afrika
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
KNB	: Kemitraan Negara Berkembang
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KSS	: Kerjasama Selatan – Selatan



KSST	: Kerjasama Selatan Selatan Triangular
MoU	: Memorandum of Understanding
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
MSG	: Melanesian Spearhead Group
ODA	: Overseas Development Aid
OMSP	: Operasi Militer Selain Perang
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
PBB	: Perserikatan Bangsa – Bangsa
PCWP	: Pacific Coalition of West Papua
QVS	: Queen Victoria School
ULMWP	: United Liberation Movement for West Papua
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption
UNDP	: United Nations Development Programme
WFP	: World Food Programme
WGI	: World Governance Indicators
WMO	: World Meteorology Organization



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Topan merupakan sebutan atau istilah yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena cuaca berupa terjangan angin dengan kecepatan tinggi yang dapat menjadi bencana berskala besar. Sebuah hembusan angin harus mencapai kecepatan lebih dari 119 kilometer/jam agar bisa diklasifikasikan sebagai topan.¹ Istilah topan sejatinya memiliki kesamaan definisi dengan istilah badai, atau siklon. Ketiganya mendefinisikan fenomena cuaca yang sama berupa terjangan angin berkecepatan tinggi dan diberikan nama oleh World Meteorology Organization (WMO) dengan aturan serta susunan tertentu. Hal yang menjadi pembeda diantara ketiganya terdapat pada lokasi dimana fenomena cuaca tersebut terjadi. Topan merupakan istilah yang secara spesifik digunakan untuk menyebut terjangan angin berkecepatan tinggi yang melanda wilayah di barat daya Samudera Pasifik.² Wilayah barat daya Samudera Pasifik sendiri merupakan wilayah yang didalamnya terdapat kumpulan negara-negara kepulauan yang seringkali disebut sebagai kawasan Pasifik Selatan.

Topan Winston merupakan salah satu topan yang berhasil menjadi bencana berskala besar di kawasan Pasifik Selatan, dengan Fiji sebagai negara dengan dampak terparah akibat terjangan topan tersebut. Topan yang diklasifikasikan ke dalam topan tropis kategori atau tingkat kelima tersebut mencapai puncaknya dan

¹National Geographic Indonesia, *Topan, Badai, Siklon, Apa Bedanya?*, 23 September 2016, diakses dari: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/09/topan-badai-siklon-apa-bedanya> pada 21 Januari 2017 pukul 00.15 WIB.

² *Ibid.*

menerjang sebagian besar wilayah Fiji pada 20 dan 21 Februari 2016 dengan kecepatan angin tertinggi mencapai 325 km/jam.³ Topan Winston tersebut tercatat sebagai salah satu topan terbesar yang pernah melanda negara kepulauan tersebut dan kawasan Pasifik Selatan sepanjang sejarah.⁴ Akibat terjangan topan tersebut 44 orang tewas dan tercatat 112.800 orang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tinggal di pengungsian.⁵ Selain itu, tercatat Topan Winston juga berhasil menciptakan kerugian finansial yang cukup besar, mencapai angka US \$470.⁶ Angka kerugian finansial yang cukup besar tersebut berhasil mencatatkan Topan Winston sebagai bencana dengan angka kerugian terbesar yang pernah melanda kawasan Pasifik Selatan sepanjang sejarah.

Terjadinya bencana berskala besar yang melanda Fiji tersebut akhirnya berhasil mengundang simpati dari berbagai pihak di seluruh dunia, termasuk diantaranya adalah negara maupun organisasi internasional. Berbagai negara dan organisasi internasional dari seluruh penjuru dunia berlomba-lomba datang dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji untuk memulihkan kondisinya pasca terjangan Topan Winston. Bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Fiji tersebut datang dalam berbagai bentuk. Bentuk bantuan kemanusiaan pasca

³United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), *Fiji: Severe Tropical Cyclone Winston Situation Report No. 1 (as of 21 February 2016)*, 21 Februari 2016, diunduh dari: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_tc_winston_sit_rep_1.pdf pada 21 Januari 2017 pukul 00.53 WIB.

⁴ Sky News, *Cyclone Winston 'strongest ever' to Hit Fiji*, 21 Februari 2016, diakses dari: <http://www.skynews.com.au/news/top-stories/2016/02/21/cyclone-winston--strongest-ever--to-hit-fiji.html> pada 21 Januari 2017 pukul 01.00 WIB.

⁵United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), *Fiji Flash Appeal Tropical Cyclone Winston, February-May 2016*, 4 Maret 2016, hal. 4, diunduh dari: <http://reliefweb.int/report/fiji/fiji-flash-appeal-tropical-cyclone-winston-february-may-2016> pada 21 Januari 2017 pukul 23.02 WIB.

⁶ International Business Time, *Cyclone Winston: Fiji's Estimated Cost Of Damages Exceeds \$470M, 10% Of The Island Nation's Total GDP*, 8 Maret 2016, diakses dari: <http://www.ibtimes.com/cyclone-winston-fijis-estimated-cost-damages-exceeds-470m-10-island-nations-total-gdp-2332151> pada 21 Januari 2017 pukul 01.20 WIB.

bencana tersebut diantaranya berupa bantuan finansial, logistik, maupun teknis untuk keperluan jangka pendek seperti bantuan keperluan darurat, pangan, medis, dan sanitasi bagi para pengungsi hingga bantuan jangka panjang seperti rekonstruksi infrastruktur pasca bencana dan mitigasi bencana.

Salah satu negara yang ikut memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston adalah Indonesia. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang ikut memainkan peran penting dalam proses penanganan, pemulihan, dan rekonstruksi pasca bencana Topan Winston di Fiji. Total bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji senilai US\$5 juta.⁷ Untuk melengkapi pemberian bantuan kemanusiaan sejumlah total US\$5 tersebut, Indonesia juga mengirimkan satu kompi pasukan Zeni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan nama Satuan Tugas Kizi (Satgas Kizi) untuk membantu proses rekonstruksi pasca bencana Topan Winston. Selain itu Indonesia juga menawarkan diri kepada Pemerintah Fiji untuk memberikan pendanaan dan melakukan proses rekonstruksi atau membangun kembali salah satu sekolah di Fiji, yakni Queen Victoria School (QVS).⁸

Bantuan kemanusiaan senilai total US\$5 juta dari Indonesia tersebut dikirimkan melalui lawatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia (RI) Luhut Binsar Pandjaitan ke Fiji pada 30 Maret 2016 dalam rangka kunjungan kerja. Dalam kunjungan kerja

⁷ CNN Indonesia, *Tiba di Fiji, Rombongan Luhut Bawa Bantuan Senilai US\$5 Juta*, 30 Maret 2016, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330192051-20-120642/tiba-di-fiji-rombongan-luhut-bawa-bantuan-senilai-us-5-juta/> pada 21 Januari 2017 pukul 02.09 WIB.

⁸ Fijivillage.com, *Indonesian Defense Force to rebuild QVS*, 1 April 2016, diakses dari: <http://fijivillage.com/news/Indonesian-Defense-Force-to-rebuild-QVS-2krs95> pada 21 Januari 2017 pukul 02.30 WIB.

tersebut Menko Polhukam RI didampingi oleh beberapa pejabat tinggi di tingkat pusat hingga daerah diantaranya adalah Staf Khusus Menteri Luar Negeri (Menlu)

RI untuk Isu-Isu Strategis Djauhari Oratmangun, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Husni Kamil Manik, Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, Gubernur Provinsi Maluku Said Assagaf, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Marius Ardu Jelamu, serta perwakilan dari perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).⁹

Selain itu Duta Besar (Dubes RI) untuk Fiji Gary R.M Jusuf juga turut serta mendampingi Menkopolhukam RI beserta delegasi dalam kunjungan kerja tersebut.

Agenda kunjungan kerja ke Fiji tersebut dimulai dengan pertemuan Menko Polhukam beserta rombongan delegasi Indonesia dan Perdana Menteri (PM) Fiji Josaia Voreqe Bainimarama di kantor PM Fiji di Suva, ibukota Fiji. Pada pertemuan tersebut Menko Polhukam RI menyerahkan bantuan secara simbolis kepada PM Fiji dan turut menyampaikan simpati dan belasungkawa dari Pemerintah beserta rakyat Indonesia sebagai negara sahabat atas terjadinya bencana berskala besar tersebut.¹⁰ Dalam pertemuan yang berlangsung cukup singkat dan tertutup tersebut berbagai isu strategis dan kerjasama antara kedua negara turut dibahas.

Setelah mengadakan pertemuan dengan PM Fiji, Menko Polhukam RI beserta delegasi melanjutkan kunjungannya ke kantor Kementerian Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji. Pada kunjungan tersebut Menko Polhukam beserta delegasi bertemu dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Republika, Luhut Serahkan Bantuan Indonesia Untuk Fiji*, 31 Maret 2016, diakses dari: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/31/o4vpw9366-luhut-serahkan-bantuan-indonesia-untuk-fiji> pada 21 Januari 2017 pukul 09.10 WIB.

Menteri Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji, Inia Seruiratu. Pada pertemuan dengan Menteri Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji, Menko Polhukam RI juga menawarkan penguatan kerja sama di sejumlah bidang yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan tantangan dan potensi kedua negara seperti pertanian, mitigasi bencana, dan perikanan.¹¹ Selain itu dalam kesempatan yang sama Ketua KPU RI Husni Kamil Manik juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara KPU RI dengan Fijian Election Office (FEO) atau Kantor Pemilihan Umum (Pemilu) Fiji dalam manajemen pemilihan umum.¹² Kunjungan ke kantor Menteri Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji tersebut merupakan akhir dari rangkaian agenda kunjungan kenegaraan ke Fiji yang dilakukan oleh Menko Polhukam RI beserta delegasi lainnya sebelum meninggalkan Fiji dan bertolak ke Port Moresby, ibukota Papua Nugini untuk agenda kunjungan kerja berikutnya.

Pemberian bantuan kepada Fiji yang dilakukan oleh Indonesia pasca bencana Winston sejatinya bukan agenda khusus yang berdiri sendiri atau terpisah dari agenda lainnya. Agenda tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Menko Polhukam RI beserta delegasi dalam rangka mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Fiji dan Papua Nugini menjadi negara tujuan dari kunjungan kerja yang berlangsung mulai 30

¹¹ *Ibid.*

¹² Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (KeMenko Polhukam RI), *Menko Polhukam Bertemu Perdana Menteri Fiji dan Menyampaikan Bantuan Pemerintah Indonesia*, 31 Maret 2016, diakses dari: https://polkam.go.id/Menko_Polhukam-bertemu-perdana-menteri-fiji-dan-menyampaikan-bantuan-pemerintah-indonesia/ pada 21 Januari 2017 pukul 10.10 WIB.

Maret hingga 3 April 2016. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan selaku tetangga terdekat Indonesia di bagian timur dan mitra strategis.¹³

Selain itu kunjungan kerja yang dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston tersebut merupakan salah satu wujud dari keseriusan Indonesia untuk terus hadir dan memperhatikan kawasan Pasifik Selatan yang selama sepuluh tahun belakangan kurang mendapatkan perhatian dari Indonesia.¹⁴ Secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Indonesia tersebut telah merefleksikan bagaimana Indonesia melihat kawasan Pasifik Selatan beserta negara-negara yang ada di kawasan tersebut saat ini.

Selain bertujuan untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan, kunjungan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston ini juga bertujuan untuk menegaskan kepada masyarakat di kawasan Pasifik Selatan khususnya di Fiji dan Papua Nugini bahwa wilayah Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia.¹⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam RI di tengah-tengah perjalanannya menuju Fiji pada 30 Maret 2016, bahwa wilayah Papua Barat merupakan bagian yang mutlak tidak dapat terpisahkan dari wilayah kedaulatan RI dan sudah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.¹⁶ Keluarnya pernyataan tersebut secara langsung ikut menegaskan bahwa kunjungan kerja yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (KeMenko Polhukam RI), *Menko Polhukam Memulai Rangkaian Kunjungan ke Fiji dan Papua Nugini*, 31 Maret 2016, diakses dari: <https://polkam.go.id/menko-polhukam-memulai-rangkaian-kunjungan-ke-fiji-dan-papua-nugini/> pada 21 Januari 2017 pukul 12.20 WIB.

¹⁶ *Ibid.*

disertai dengan pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadang ekspansi Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di kawasan Pasifik Selatan.¹⁷ ULMWP sendiri merupakan salah satu gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.

Berbicara mengenai hubungan antara Fiji dan Indonesia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara Indonesia dan kawasan Pasifik Selatan secara keseluruhan. Fiji merupakan negara yang memiliki peran penting dalam hubungan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik Selatan. Fiji merupakan negara pertama di kawasan Pasifik Selatan yang menjalin hubungan dengan Indonesia atau menjadi “pintu gerbang” bagi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Hubungan antara Indonesia dan Fiji sendiri telah terjalin selama lebih dari empat dekade tepatnya pada tahun 1974 ketika hubungan diplomatik diantara keduanya resmi dibuka dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan perwakilan misi diplomatik Fiji di Wellington, Selandia Baru.¹⁸ Selain itu seperti yang dikemukakan oleh Menko Polhukam RI, Fiji merupakan “*Center of Gravity*” dari Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.¹⁹ Fiji merupakan negara yang cukup berpengaruh yang memainkan peran strategis sebagai *hub* atau penghubung negara-negara di kawasan Pasifik Selatan di bidang politik, ekonomi, dan solidaritas sosial

¹⁷ CNN Indonesia, *Pesan Luhut ke Pasifik Selatan: Papua Milik Indonesia*, 4 April 2016, diakses dari: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/201604073157-20-121435/pesan-luhut-ke-pasifik-selatan-papua-milik-indonesia/> pada 21 Januari 2017 pukul 11.10 WIB.

¹⁸ Government of the Republic of Fiji, Ministry of Foreign Affairs, Media Release: Fiji Embassy in Indonesia to Open, 30 Maret 2011, diakses dari: <http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-resources/media-release/417-fiji-embassy-in-indonesia-to-open> pada 21 Januari 2017 pukul 12.10 WIB.

¹⁹ CNN Indonesia, *Luhut Melawat ke Fiji, Perkuat Posisi RI di Pasifik Selatan*, 28 Maret 2016, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160328120353-20-119997/luhut-melawat-ke-fiji-perkuat-posisi-ri-di-pasifik-selatan/> pada 21 Januari 2017 pukul 13.10 WIB.

budaya kawasan.²⁰ Peran strategis tersebut didukung oleh letak geografis Fiji yang strategis, yakni berada tepat di tengah-tengah kawasan Pasifik Selatan.

Peran Fiji sebagai “*Center of Gravity*” Indonesia tersebut ikut ditunjang oleh kerjasama-kerjasama strategis di berbagai sektor yang menghasilkan perkembangan positif. Salah satu diantaranya yang cukup menonjol adalah sektor ekonomi dimana Fiji menjadi negara mitra dagang Indonesia terpenting di kawasan Pasifik Selatan dengan nilai perdagangan yang cukup besar, mencapai US \$25, 57 juta dengan posisi surplus berada pada pihak Indonesia.²¹ Nilai perdagangan tersebut didominasi oleh ekspor Indonesia produk-produk Indonesia berupa produk makanan dan minuman, produk tekstil atau garmen, alat-alat pertanian dan perikanan, baja ringan, kertas, dan karoseri bus.²² Selain menjadi mitra penting Indonesia di sektor ekonomi, Fiji juga merupakan salah satu mitra penting dalam kerjasama demokratisasi dan keamanan serta stabilitas kawasan.²³ Namun, diluar diluar peran penting yang telah dijelaskan diatas terdapat peran penting Fiji bagi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Peran tersebut berkaitan dengan kepentingan Indonesia di kawasan tersebut khususnya yang berkaitan dengan isu separatisme Papua Barat. Fiji merupakan salah satu negara di kawasan tersebut yang memberikan dukungan terhadap Indonesia dengan menyatakan secara tegas bahwa wilayah Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Sepeerti yang

²⁰ Greg Fry, Sandra Tarte, *The New Pacific Diplomacy*, 2015, Canberra: Australian National University Press, 2015, hal. 701.

²¹ Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Fiji, *Pertemuan JMC Pertama Indonesia-Fiji 2015, Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi*, 4 September 2015, diakses dari: <http://www.Kemenlu.go.id/suva/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pertemuan-JMC-Pertama-Indonesia-Fiji-2015-Sepakat-Tingkatkan-Kerja-Sama-Ekonomi.aspx> pada 22 Januari 2017 pukul 07.02 WIB.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

dinyatakan oleh PM Fiji, Josai Voreqe Bainimarama bahwa kedaulatan Indonesia terhadap Papua tidak bisa dipertanyakan lagi.²⁴ Selain itu Fiji juga ikut memberikan dukungan kepada keanggotaan Indonesia di organisasi regional kawasan Pasifik Selatan, Melanesian Spearhead Group (MSG).²⁵ Keanggotaan Indonesia tersebut diwakili oleh lebih dari 11 juta penduduk keturunan Melanesia yang berada di lima provinsi, antara lain Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.²⁶ Berdasarkan fakta tersebut, Menlu Fiji, Inoke Kubuabola, menyatakan bahwa Indonesia merupakan rumah bagi mayoritas ras Melanesia.²⁷ Adanya dukungan tersebut tentunya memberikan pengaruh positif terhadap kepentingan Indonesia terkait dengan isu separatisme Papua Barat.

Berdasarkan pemaparan berbagai fakta melalui latar belakang masalah yang telah penulis berikan diatas, penulis pada akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Indonesia selaku negara pemberi bantuan atau negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaan pasca bencana Topan Winston kepada Fiji selaku negara penerima bantuan atau negara resipien. Terlebih bantuan kemanusiaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari bantuan luar negeri yang merupakan salah satu instrumen dari kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri suatu

²⁴ ABC Radio Australia, *5 Hal yang Perlu Diketahui Mengenai Papua Barat*, 20 Juli 2015, diakses dari: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2015-07-20/5-isu-yang-perlu-diketahui-mengenai-papua-barat/1471074> pada 16 April 2017 pukul 23.13 WIB.

²⁵ Fiji Broadcasting Corporation, *Fijian PM Supports Indonesia's Move to Become MSG Associate Member*, 25 Mei 2015, diakses dari: <http://www.fbc.com.fj/fiji/29766/fijian-pm-supports-indonesia%E2%80%99s-move-to-become-msg-associate-member> pada 18 April 2017 pukul 15.00 WIB.

²⁶ Antara News, *Memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan*, 28 Maret 2016, diakses dari: <http://www.antaraneews.com/berita/552083/memperkuat-kehadiran-indonesia-di-pasifik-selatan> pada 18 April 2017 2017 pukul 15.10 WIB.

²⁷ Johnny Blades, *Melanesia's Test: The Political Quandary of West Papua*, *Pacific Journalism Review* Issue 20 Vol 2. 2014, 31 Oktober 2014, hal. 31, diunduh dari: <https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/view/164> pada 17 April 2017 pukul 00.00 WIB.

negara tentunya berkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara yang sedang diperjuangkan. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah tulisan dengan judul

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indonesia dalam Pemberian Bantuan Kemanusiaan kepada Fiji Pasca Bencana Topan Winston pada Tahun 2016”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada informasi atau fakta-fakta yang dipaparkan pada latar belakang masalah, penulis merumuskan sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut: **Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016?**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.
2. Mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pemberian kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat dari penelitian ini apabila ditinjau dari sudut pandang keilmuan khususnya Hubungan Internasional adalah memberikan sumbangsih pemikiran serta informasi bagi akademisi yang melakukan penelitian Hubungan Internasional khususnya analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi negara dalam memberikan bantuan luar negeri khususnya bantuan kemanusiaan.

2. Manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah memberikan gambaran dan wawasan mengenai bantuan luar negeri khususnya bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca-bencana Topan Winston serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan tersebut



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Terdahulu

Terkait dengan topik yang akan penulis angkat dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua studi terdahulu sebagai acuan perbandingan dan referensi.

Selain itu studi terdahulu juga digunakan untuk memastikan bahwa penelitian penulis merupakan penelitian yang berbeda atau tidak memiliki kesamaan fokus pembahasan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2.1.1 *Calculation of Goodwill: Humanitarianism, Strategic Interest, and the US*

Response to Typhoon Yolanda

Studi terdahulu pertama yang penulis gunakan adalah tulisan yang merupakan sebuah jurnal dengan berjudul “Calculation of Goodwill: Humanitarianism, Strategic Interest, and the US Response to Typhoon Yolanda” oleh Chris J. Dolan dan Alynna J. Lyon²⁸ Melalui tulisan tersebut Dolan dan Lyon mengemukakan bahwa partisipasi Amerika Serikat (AS) respon global terhadap bencana Topan Yolanda (Haiyan) di Filipina pada tahun 2013 yang tidak hanya dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan tetapi juga kepentingan strategis AS terhadap Filipina.²⁹ Kepentingan strategis tersebut berkaitan dengan kedekatan Filipina dengan AS yang memiliki pengaruh terhadap peran AS di kawasan Asia dan Pasifik. Filipina dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *pivot* atau titik penting

²⁸ Chris J. Dolan dan Alynna J. Lyon, *Calculation of Goodwill: Humanitarianism, Strategic Interest, and the US Response to Typhoon Yolanda*, *Global Security and Intelligence Studies*, Volume 2, Number 1, Article 5, Fall 2016, hal. 33-61, diunduh dari: <http://digitalcommons.apus.edu/gsis/vol2/iss1/5> pada 10 April 2017 pukul 9.47 WIB.

²⁹ *Ibid.* hal 33.

yang strategis bagi AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya di kawasan Asia dan Pasifik.³⁰ Bencana Topan Yolanda merupakan bencana topan kategori kelima yang menerjang enam provinsi di Filipina pada 8 November 2013. Akibat bencana tersebut 6.000 orang tewas dan 670.000 orang terpaksa mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal.³¹ Selain itu angka kerugian yang harus ditanggung oleh Filipina akibat bencana tersebut mencapai US\$ 15 juta.³²

Partisipasi AS dalam respon global terhadap bencana Topan Yolanda di Filipina diwujudkan melalui misi kemanusiaan khusus berskala besar yang bernama Operasi Damayan. Selain mengirimkan bantuan finansial dan logistik untuk keperluan penanganan bencana dalam jumlah besar, melalui Operasi Damayan AS juga mengirimkan pasukan militernya ke Filipina untuk keperluan penanganan bencana termasuk diantaranya adalah distribusi bantuan. Selain itu AS juga mengirimkan 50 kapal perangnya ke Filipina untuk keperluan distribusi bantuan ke wilayah terdampak bencana yang sulit dijangkau oleh kapal induk USS George Washington.³³

Partisipasi AS yang cukup besar dalam respon global terhadap bencana Topan Yolanda melalui Operasi Damayan tersebut tentunya merupakan salah satu bentuk dari kebijakan luar negeri AS yang dalam perumusan serta pengambilan kebijakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut analisis yang dilakukan Dolan dan Lyon, terdapat empat faktor deteminan yang mempengaruhi partisipasi AS dalam respon global terhadap bencana Topan Yolanda melalui Operasi

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hal. 38.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hal. 40.

Damayan, antara lain *historical millieu and larger episode, media coverage and the public, human security, dan strategic interest*.³⁴ *Historical millieu and larger episode* merupakan faktor determinan yang berkaitan dengan partisipasi dalam respon kemanusiaan terhadap bencana yang pernah dilakukan sebelumnya oleh suatu negara. Dalam hal ini partisipasi respon kemanusiaan terhadap bencana oleh suatu negara dapat dikatakan sebagai lanjutan dari respon serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Dolan dan Lyon mengemukakan bahwa partisipasi AS dalam respon global terhadap bencana Topan Yolanda merupakan kelanjutan dari respon serupa berskala besar yang pernah dilakukan oleh AS sebelumnya seperti pada saat bencana tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004 dan bencana kebocoran nuklir Jepang pada tahun 2011.³⁵ Melalui faktor determinan ini dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan suatu negara terkait dengan bantuan kemanusiaan merupakan hal yang saling berkaitan satu sama lain atau berada dalam satu bagian yang utuh.

Media coverage and the public merupakan faktor determinan yang melihat bagaimana peran media dalam menarik perhatian publik terhadap bencana yang terjadi dan munculnya dorongan publik di suatu negara terhadap pemerintahnya untuk ikut berpartisipasi atau merespon bencana yang terjadi di luar negaranya.

Selain melihat pengaruh dari media konvensional, Dolan dan Lyon juga melihat adanya pengaruh dari media sosial yang dapat dikatakan sebagai bentuk peningkatan dari *citizen journalism*.³⁶ Hal tersebut didasarkan pada tingginya pengguna internet di dunia dan jangkauan dari sosial media yang sangat luas dan

³⁴ *Ibid.* hal. 33.

³⁵ *Ibid.* hal. 34.

³⁶ *Ibid.* hal. 35.

berkaitan dengan berbagai ranah kehidupan termasuk ranah politik. Pada bencana Topan Yolanda, disiarkannya kondisi bencana dalam porsi yang cukup besar oleh beberapa lembaga penyiaran internasional disinyalir memberikan pengaruh terhadap partisipasi AS dalam merespon bencana tersebut. Selain itu di media sosial berdasarkan pada pantauan yang dilakukan oleh Radian6, tercatat 3,2 juta orang menyebut bencana tersebut di Facebook dan Twitternya.³⁷ Angka yang cukup besar tersebut belum termasuk pada media sosial lainnya baik berupa forum diskusi, komentar video, dan laman lainnya.

Human security merupakan faktor determinan yang bersifat normatif dan menjadi dasar dari setiap aktivitas kemanusiaan termasuk diantaranya adalah merespon terjadinya suatu bencana. *Human security* yang fokus kepada ancaman yang mengganggu kehidupan manusia sendiri mulai mendapatkan perhatian pasca berakhirnya Perang Dingin. Pada kasus partisipasi AS dalam respon global terhadap bencana Topan Yolanda, *human security* berperan sebagai prinsip dasar yang melegitimasi Operasi Damayan yang notabene telah melewati batas kedaulatan suatu negara.

Strategic interest merupakan faktor determinan yang berada diluar konteks kemanusiaan karena berkaitan dengan kepentingan nasional yang berada dibalik aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh suatu negara. Namun tidak dapat dipungkiri faktor determinan ini hadir dan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam berbagai aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh suatu negara termasuk diantaranya adalah merespon terjadinya suatu bencana di negara lainnya. Aktivitas

³⁷ *Ibid.* hal 47.

kemanusiaan yang dilakukan oleh suatu negara dipandang sebagai sebuah strategi jangka panjang suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya.³⁸ Pada kasus partisipasi AS dalam respon global terhadap bencana Topan Yolanda melalui Operasi Damayan, menurut Dolan dan Lyon kepentingan nasional yang dibawa oleh AS berkaitan dengan agenda kebijakan luar negeri AS yang berfokus pada kawasan Asia dan Pasifik.³⁹ Selain itu besarnya bantuan yang dikerahkan oleh AS baik dalam bentuk finansial, logistik, hingga pasukan militer melalui Operasi Damayan disinyalir sebagai upaya AS memperlihatkan kekuatan yang dimilikinya di kawasan Asia dan Pasifik khususnya Asia Tenggara untuk melawan pengaruh dari Cina yang mulai hadir di kawasan tersebut.⁴⁰ Oleh karena itu bencana Topan Yolanda ini dapat dikatakan sebagai kesempatan bagi AS untuk memperlihatkan kekuatannya di kawasan tersebut khususnya melalui Filipina yang memiliki kedekatan khusus dengan AS.

Walaupun kasus yang tulisan yang menjadi studi terdahulu pertama jauh berbeda dengan penelitian penulis, tetapi keduanya memiliki persamaan yang dapat dijadikan perbandingan dan acuan penulis dalam penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Persamaan tersebut berada di bagian fokus penelitian. Tulisan Dolan dan Lyon tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dimana keduanya sama-sama berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh suatu negara termasuk pemberian bantuan kemanusiaan. Selain itu tulisan tersebut juga

³⁸ *Ibid.* hal. 38.

³⁹ *Ibid.* hal. 43

⁴⁰ *Ibid.*

menigikutsertakan faktor politik khususnya kepentingan nasional sebagai faktor yang berpengaruh. Namun, dibalik kesamaan fokus tersebut terdapat perbedaan mendasar dari tulisan tersebut dan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian penulis yang menggunakan konsep *the Politics of Humanitarian Aid* secara lebih spesifik menjelaskan faktor-faktor politik yang mempengaruhi aktivitas kemanusiaan dari suatu negara. Sedangkan tulisan dari Dolan dan Lyon tidak menjelaskan secara spesifik faktor-faktor politik tersebut seperti pada konsep the Politics of Humanitarian Aid yang penulis gunakan.

2.1.2 *Is the Allocation of Food Aid Free from Donor Interest Bias?*

Studi terdahulu kedua yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tulisan yang merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh Eric Neumayer dengan judul *Is the Allocation of Food Aid Free from Donor Interest Bias?*⁴¹ Melalui tulisan tersebut Neumayer mengemukakan hasil penelitiannya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi *food aid* atau bantuan pangan termasuk diantaranya yang berkaitan dengan bias atau kepentingan dari donor bantuan terhadap negara resipien. Faktor-faktor tersebut ditemukan setelah Neumayer melakukan analisis beserta perbandingan terhadap empat donor yang berbeda, yakni AS selaku negara donor, European Union (EU) atau Uni Eropa, World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), dan Non-Governmental Organization (NGO) atau organisasi non-pemerintah lainnya yang bergerak di bidang pangan selaku donor non-negara pada dekade 1990an atau pasca berakhirnya Perang Dingin. Setelah melakukan analisis

⁴¹ Eric Neumayer, *Is the Allocation of Food Aid Free from Donor Interest Bias?*, *The Journal of Development Studies*, Vol. 41, No. 3, April 2005, hal. 394-411, diunduh dari: <http://eprints.lse.ac.uk/16689/> pada 10 April 2017 pukul 21.24 WIB.

beserta perbandingan tersebut, Neumayer meneumukan adanya kecenderungan bantuan pangan yang diberikan oleh negara donor dilatarbelakangi oleh hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dari negara donor tersebut.

Bantuan pangan merupakan salah satu bentuk dari bantuan luar negeri yang dapat dikategorikan sebagai bantuan kemanusiaan karena diberikan dalam kondisi darurat dan diberikan dengan tujuan untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang terancam akibat permasalahan pangan yang muncul akibat aktivitas alamiah seperti bencana alam maupun aktivitas manusia seperti peperangan.⁴² Seperti yang diketahui bahwa pangan merupakan kebutuhan utama manusia yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu bantuan pangan menjadi salah satu bentuk bantuan kemanusiaan yang selama ini banyak diberikan oleh donor bantuan, baik negara maupun non-negara.

Dalam penelitiannya Neumayer menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi alokasi bantuan pangan. Namun, tidak keseluruhan faktor tersebut memiliki keterkaitan dengan kepentingan dari donor bantuan khususnya negara donor. Faktor pertama tidak berkaitan dengan kepentingan donor adalah jumlah dari alokasi bantuan pangan yang diberikan. Menurut Neumayer jumlah alokasi bantuan tersebut lebih dipengaruhi oleh jumlah populasi yang terdapat di negara resipien.⁴³ Selain itu disebutkan pula oleh Neumayer faktor yang berkaitan dengan populasi di negara resipien, yakni *Gross Domestic Product (GDP)* atau pendapatan per-kapita, tingkat ketersediaan kalori per-kapita, kemampuan

⁴² *Ibid*, hal. 396

⁴³ *Ibid*, hal. 403

produksi pangan di negara resipien, serta kondisi darurat yang terdapat di negara resipien.⁴⁴

Kemudian Neumayer menyebutkan beberapa faktor yang berkaitan langsung dengan kepentingan dari negara donor. Pertama, faktor sejarah kolonisasi negara donor dengan negara resipien merupakan salah satunya. Faktor ini dipengaruhi oleh hubungan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kepentingan lainnya dari negara donor terhadap negara resipien selaku koloni.⁴⁵ Kedua, faktor jarak geografis dengan negara resipien juga menjadi pertimbangan dari negara donor dalam mengalokasikan bantuannya. Negara donor akan lebih memilih negara resipien yang dekat secara geografis untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar di dalam kawasan.⁴⁶ Ketiga, faktor preferensi dari negara donor terhadap negara resipien. Faktor ini terlihat ketika Neumayer melakukan analisis terhadap bantuan yang diberikan oleh AS melalui agensi bantuan luar negerinya, yakni United States Agency for International Development (USAID) dan bantuan tersebut berkaitan dengan kepentingan strategis-militer terhadap negara resipien.⁴⁷ Keempat adalah jumlah ekspor pangan dari negara donor ke negara resipien yang secara jelas menggambarkan kepentingan komersial atau ekonomi dari negara donor. Kelima adalah kedekatan antara negara donor dan negara resipien. Menurut Neumayer, bantuan pangan cenderung akan lebih mudah diberikan oleh negara donor kepada negara resipien yang bersahabat atau memiliki hubungan dekat.⁴⁸

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 405

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Secara kasat mata terdapat perbedaan yang signifikan antara tulisan Neumayer yang menjadi studi terdahulu kedua ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Perbedaan pertama terdapat pada kasus yang dibahas dalam kedua penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Neumayer secara spesifik membahas mengenai bantuan pangan yang merupakan salah satu bentuk dari bantuan kemanusiaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis membahas mengenai bantuan kemanusiaan secara umum. Perbedaan kedua terdapat fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Neumayer merupakan penelitian yang secara khusus meneliti mengenai *humanitarian need* atau kebutuhan bantuan kemanusiaan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada aspek politik dari bantuan kemanusiaan. Selain itu perbedaan lainnya terdapat pada *level of analysis* atau tingkatan analisis penelitian. Neumayer dalam penelitiannya melakukan perbandingan terhadap AS, Uni Eropa, WFP, dan NGO yang masing-masing berada di tingkatan analisis yang berbeda, sedangkan penulis hanya melakukan analisis spesifik di tingkatan negara yakni Indonesia kepada Fiji. Namun, dibalik perbedaan yang telah penulis paparkan tersebut terdapat kesamaan mendasar dari penelitian yang dilakukan oleh Neumayer dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni keduanya sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi donor bantuan kemanusiaan dalam mengalokasikan bantuan tersebut.

2.2 Kajian Konseptual

2.2.1 Konsep Bantuan Luar Negeri

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai *humanitarian aid* dan konsep *the Politics of Humanitarian Aid* penulis terlebih dahulu akan berbicara mengenai bantuan luar negeri secara umum. Karena *humanitarian aid* sendiri merupakan bagian dari bantuan luar negeri itu sendiri. Hans Morgenthau melalui tulisannya yang berjudul *A Political Theory of Foreign Aid* secara spesifik mengkategorikan bantuan luar negeri ke dalam enam jenis. Enam jenis bantuan luar negeri tersebut antara lain, *humanitarian aid*, *subsistence aid*, *military aid*, *bribery aid*, *prestige aid*, dan *economic development aid*.⁴⁹

Humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang diberikan oleh negara donor untuk membantu sesama manusia yang menjadi korban dalam bencana atau wabah penyakit tertentu di negara resipien. Pada dasarnya tidak ada kepentingan tertentu yang sifatnya politis dibalik bantuan ini. Namun, bantuan tersebut dapat berubah menjadi bantuan yang sifatnya politis. Sifat politis dari bantuan tersebut akan muncul ketika negara donor dan negara resipien memiliki kepentingan dibalik pemberian bantuan.⁵⁰

Subsistence aid atau bantuan untuk kesinambungan, bantuan ini diberikan oleh negara donor untuk melindungi negara resipien dari kehancuran atau kekacauan yang timbul dari masalah tertentu. Bantuan jenis ini dapat bersifat politis apabila bantuan tersebut digunakan oleh negara donor untuk mempertahankan

⁴⁹ Hans Morgenthau, *A Political Theory of Foreign Aid*, *The American Political Science Review*, Vol. 56, No. 2, 1962, hal. 301-309, diunduh dari: <http://www.jstor.org/stable/1952366> pada 25 Januari 2017 pukul 14.02 WIB.

⁵⁰ *Ibid.* hal. 301

status *quo* yang dimilikinya. Melalui pemberian bantuan tersebut, negara donor secara tidak langsung melindungi pula kepentingan yang dimilikinya yang terkait dengan negara resipien.⁵¹

Military aid atau bantuan militer merupakan bantuan berupa pemberian proteksi tertentu, bantuan dana untuk keperluan militer atau pengiriman senjata, dan pasukan asing. Sifat politis dari bantuan ini dapat dengan mudah dilihat. Karena salah satu upaya negara untuk mencapai tujuan dan kepentingannya adalah dengan melakukan aliansi. Salah satu cara untuk memperkuat aliansi tersebut adalah dengan cara pemberian bantuan militer dari negara donor kepada negara resipien yang merupakan negara aliansi.⁵²

Bribery aid atau bantuan suap yang diberikan oleh negara donor untuk kepentingan tertentu atau memuluskan kepentingan tertentu terhadap negara resipien. Bantuan dalam bentuk ini dapat diartikan sebagai salah satu bentuk suap dari negara donor kepada negara resipien. Bantuan berupa suap secara langsung dapat menjelaskan pada dasarnya seluruh bantuan luar negeri dalam bentuk apapun yang diberikan oleh suatu pihak dapat dikatakan sebagai bentuk suap. Bantuan ini merupakan bantuan yang sifat politisnya terlihat dengan jelas.⁵³

Prestige aid atau bantuan prestis merupakan bantuan yang diberikan untuk tujuan prestis dari negara donor. Bantuan tersebut digunakan untuk menunjukkan kepada publik kekuatan yang dimiliki oleh negara donor terhadap negara resipien.

Keperluan dan tujuan utama negara donor dapat dikatakan tidak begitu spesifik

⁵¹ *Ibid.* hal. 302

⁵² *Ibid.* hal. 303

⁵³ *Ibid.*

terlihat dari bantuan ini. Namun, melalui bantuan yang diberikan tersebut prestis si pemberi akan terangkat di mata publik dan beberapa kepentingan yang dimiliki secara tidak langsung akan terbantu oleh bantuan tersebut. Oleh karena itu bantuan ini merupakan bantuan yang sifat politisnya terlihat jelas.⁵⁴

Economic development aid atau bantuan pembangunan ekonomi merupakan bantuan yang mengutamakan pada bantuan ekonomi. Bantuan yang diberikan ini bertujuan untuk pembangunan negara resipien. Bantuan ekonomi merupakan bentuk bantuan yang paling banyak diberikan pada era modern ini, justifikasi yang digunakan adalah dengan pemberian bantuan ekonomi seluruh masalah dapat teratasi serta negara donor dan negara resipien sama-sama diuntungkan. Sifat politis yang ada dalam bantuan ini dapat dilihat dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan bantuan tersebut tersebut diantaranya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara resipien yang tentunya berkaitan dengan kepentingan negara donor.⁵⁵

Bantuan luar negeri atau *foreign aid* merupakan hal yang lazim ditemukan dalam hubungan internasional dewasa ini. Setiap ahli Hubungan Internasional memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai bantuan luar negeri. Definisi mengenai bantuan luar negeri pun semakin berkembang seiring bertambahnya aktor non-negara dalam hubungan internasional yang ikut memberikan bantuan luar negeri. Namun secara garis besar apabila merujuk pada negara sebagai pihak yang terlibat didalamnya, dapat disimpulkan bahwa bantuan luar negeri merupakan tindakan pemberian bantuan yang dilakukan oleh negara donor kepada negara

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.* 304-305

resipien yang dilandasi oleh kepentingan tertentu dari negara donor. Kepentingan tertentu tersebut merujuk pada definisi bantuan luar negeri sebagai instrumen kebijakan luar negeri suatu negara karena mencakup pengiriman bantuan finansial atau uang, barang, dan tenaga ahli dari negara donor ke negara penerima.⁵⁶ Apabila merujuk pada definisi tersebut, bantuan luar negeri menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang efektif bagi negara *major power* atau negara dengan kekuatan atau pengaruh besar untuk mendukung tindakan diplomasi yang dilakukannya.⁵⁷

Bantuan luar negeri menurut Holsti merupakan kebijakan yang memberikan keuntungan tidak hanya pada satu pihak saja. Bantuan luar negeri memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat baik negara donor maupun negara resipien. Negara resipien tentunya mendapatkan keuntungan berupa bantuan yang berupa pinjaman, material, atau pengetahuan tertentu yang dapat mendukung jalannya perekonomian dan taraf hidup masyarakatnya. Di sisi lain, negara donor tidak dirugikan begitu saja atas bantuan yang mereka berikan, negara donor dapat mencapai kepentingan nasionalnya seperti mendapatkan keuntungan baik jangka pendek maupun panjang dalam hal politik maupun ekonomi.⁵⁸ Bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor kepada negara resipien secara garis besar terdiri dari dua bentuk yakni berupa hibah (*grant*) atau pinjaman (*loan*).⁵⁹ Selain itu dimungkinkan pula bantuan luar negeri diberikan oleh negara donor kepada negara

⁵⁶ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis, Third Edition*, New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1977, hal. 258

⁵⁷ *Ibid.* hal. 259

⁵⁸ K.J. Holsti, *International Politics: A Framework for Analysis, Third Edition, Loc. Cit.*

⁵⁹ Steven Radelet, A Primer on Foreign Aid, *Center for Global Development Working Paper Number* 92, July 2006, 1-24, hal 4, diunduh dari: https://www.cgdev.org/sites/default/files/8846_file_WP92.pdf pada 25 Januari 2017 pukul 23.54 WIB.

resipien dengan bentuk gabungan dari hibah dan pinjaman dengan komposisi tertentu yang tentunya telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

2.2.2 Humanitarian Aid

Humanitarian aid atau bantuan kemanusiaan merupakan salah satu jenis bantuan luar negeri yang sangat lazim ditemukan dalam hubungan internasional dewasa ini. Seperti yang telah penulis jelaskan di sub-bab sebelumnya, bantuan kemanusiaan menurut Morgenthau merupakan salah satu dari enam jenis bantuan luar negeri. Bantuan kemanusiaan secara umum didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan dalam rangka untuk menyelamatkan hidup, meringankan penderitaan, memelihara serta memberikan perlindungan selama atau pasca terjadinya krisis yang diakibatkan oleh manusia dan bencana alam, dan juga mencegah serta memperkuat kesiapan untuk menghadapi terjadinya peristiwa serupa.⁶⁰ Bantuan kemanusiaan lazimnya diberikan ketika terjadi krisis atau bencana yang diakibatkan oleh manusia maupun alam yang menimbulkan banyak korban termasuk *displaced person* atau pengungsi di negara dengan kondisi pemerintahan yang kekurangan sumber daya serta tidak mampu mengatasi dampak dari krisis atau bencana tersebut.⁶¹

Dalam konteks hubungan internasional tradisional, kemanusiaan diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada negara lain yang mengalami krisis atau bencana seperti banjir, kelaparan, dan wabah

⁶⁰ Global Humanitarian Assistance, *Defining Humanitarian Assistance*, diakses dari: <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/> pada 1 April 2017 pukul 23.01 WIB.

⁶¹ Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, Chicago: The University of Chicago Press, 2007, hal. 14.

penyakit tertentu.⁶² Oleh karena itu bantuan kemanusiaan dapat dikatakan sebagai salah satu jenis dari bantuan luar negeri. Namun, dalam perkembangannya bantuan kemanusiaan dalam konteks hubungan internasional tradisional tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan mengingat dewasa ini aktor dalam hubungan internasional terus berkembang tidak lagi didominasi oleh negara sebagai aktor utama. Begitupun dengan pemberian bantuan kemanusiaan, negara tidak lagi menjadi aktor utama yang mendominasi dalam hal tersebut. Terdapat aktor-aktor non negara baik organisasi maupun individu yang juga ikut berperan layaknya negara dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan ini.

Menurut *Good Humanitarian Donorship Principles* terdapat empat prinsip dalam *humanitarian action* atau tindakan kemanusiaan antara lain *humanity*, *impartiality*, *neutrality*, dan *independence*.⁶³ Prinsip pertama yakni *humanity* atau kemanusiaan merupakan prinsip dimana tindakan kemanusiaan memiliki tujuan utama menyelamatkan hidup serta meringankan penderitaan manusia dimanapun berada. Prinsip kedua yakni *impartiality* atau keadilan, prinsip ini merupakan prinsip yang melihat implementasi dari tindakan kemanusiaan yang dilakukan tanpa adanya diskriminasi terhadap korban serta ditujukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Prinsip ketiga yakni *neutrality* atau netralitas, dalam hal ini tindakan kemanusiaan dilakukan tanpa memihak pada satu pihak dalam konflik bersenjata atau sengketa lainnya dimana tindakan tersebut dilakukan dan memberikan dampak terhadap masyarakat di negara resipien. Prinsip keempat yakni *independence* atau independen, prinsip ini berbicara mengenai tindakan kemanusiaan yang dilakukan

⁶² Hans Morgenthau, *Op. Cit.*, hal. 301.

⁶³ *Ibid.*

bebas atau bersih dari motif atau kepentingan politik, ekonomi, militer, dan lain-lain dari aktor terkait dengan dimana tindakan kemanusiaan tersebut dilakukan.

Dalam konteks negara sebagai donor bantuan dalam pemberian bantuan kemanusiaan, tentunya tidak semua negara menganut prinsip yang sama terkait pemberian bantuan tersebut. Oleh karena itu seringkali muncul perdebatan-perdebatan terkait dengan prinsip dari pemberian bantuan kemanusiaan itu sendiri.

Terlebih bantuan kemanusiaan dalam konteks negara sebagai donor bantuan erat kaitannya dengan bantuan luar negeri yang merupakan salah satu instrumen politik luar negeri dari suatu negara.

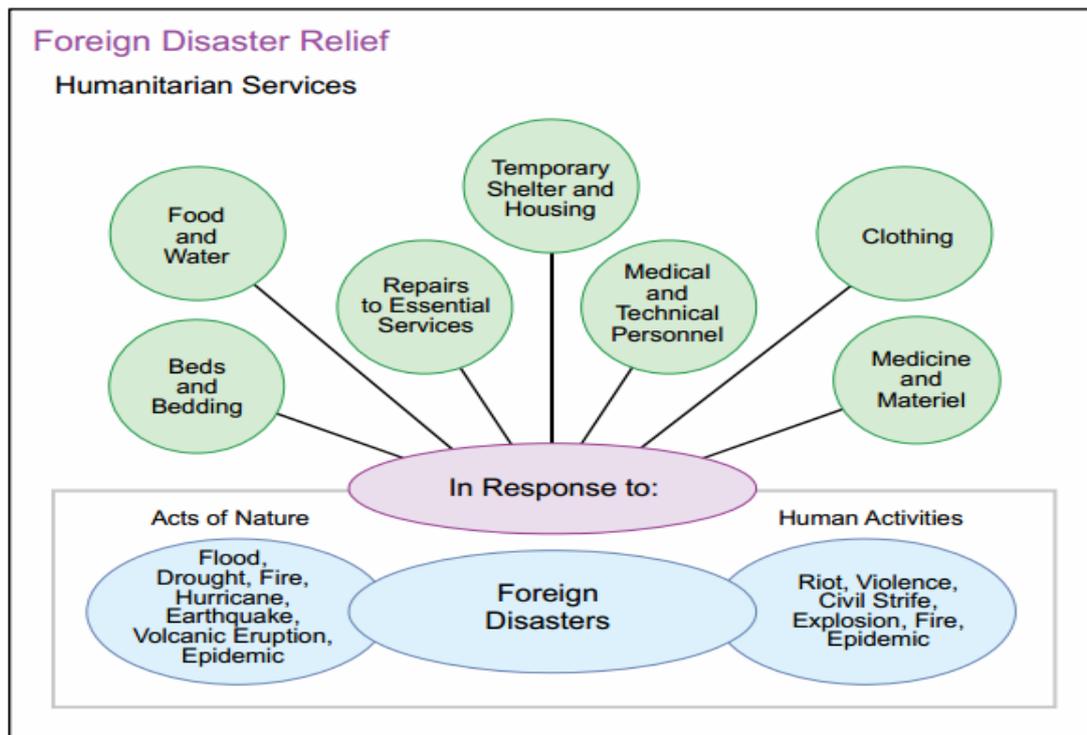
Apabila berbicara bantuan kemanusiaan dalam konteks negara sebagai donor bantuan, tidak serta-merta berkaitan langsung dengan motif atau kepentingan tertentu dari negara tersebut. Karena pada dasarnya bantuan kemanusiaan merupakan salah satu jenis bantuan luar negeri yang dianggap tidak memiliki motif atau kepentingan tertentu yang mengikutinya. Akan tetapi bantuan tersebut dapat berubah menjadi bantuan yang sifatnya politis. Sifat politis dari bantuan tersebut akan muncul ketika negara donor dan negara resipien memiliki kepentingan dibalik pemberian bantuan.⁶⁴ Selain itu dalam beberapa studi terkait juga telah dikemukakan bahwa telah terjadi pergeseran-pergeseran dalam implementasi dari pemberian bantuan kemanusiaan oleh berbagai negara.

Terdapat berbagai bentuk dari bantuan kemanusiaan, seperti yang dijelaskan di gambar dibawah ini atau gambar 2.1, yakni bantuan dalam bentuk tempat tidur, makanan dan air bersih, perbaikan layanan masyarakat, pembangunan

⁶⁴ *Ibid.*

tempat tinggal sementara atau pengungsian bagi korban yang kehilangan tempat tinggal, pengiriman obat-obatan beserta tenaga medis, pengiriman material untuk keperluan pembangunan atau rekonstruksi tempat tinggal permanen bagi para pengungsi korban bencana.

Gambar 2.1 Foreign Disaster Relief (Humanitarian Service)



(Sumber: Joint Chiefs of Staff United States of America, *Joint Publication 3-29 (Revision), Foreign Humanitarian Assistance, 03 January 2014*)⁶⁵

2.2.3 The Politics of Humanitarian Aid

Konsep *the Politics of Humanitarian Aid* merupakan konsep hasil penelitian dari A. Cooper Drury, Richard Stuart Olson, dan Douglas A. Van Belle yang dikemukakan dalam tulisannya yang berjudul *the Politics of Humanitarian Aid: US*

⁶⁵ Joint Chiefs of Staff United States of America, *Joint Publication 3-29, Foreign Humanitarian Aid, 03 January 2014 (Revision)*, hal I-6, diunduh dari: www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_29.pdf pada 21 Maret 2017 pukul 14.02 WIB.

Foreign Disaster Assistance, 1964-1995.⁶⁶ Tulisan tersebut merupakan sebuah jurnal hasil penelitian yang membahas secara khusus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara. AS merupakan negara yang menjadi objek penelitian oleh Drury, Olson, dan Van Belle. Drury, Olson, dan Van Belle melakukan analisis terhadap bantuan kemanusiaan yang telah diberikan oleh AS ke berbagai negara dalam kurun waktu 1964-1995 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan tersebut selain untuk kepentingan atau tujuan kemanusiaan. Drury, Olson, dan Van Belle dalam melakukan analisis pemberian bantuan kemanusiaan ini melihat adanya keterkaitan atau hubungan antara bantuan kemanusiaan yang diberikan dengan faktor politik maupun non-politik sebelum melakukan analisis data terkait dan kebijakan negara donor terkait pemberian bantuan kemanusiaan.

Faktor politik merupakan faktor yang penting dalam analisis konsep the Politics of Humanitarian Aid ini. Selain konsep tersebut merupakan konsep yang secara khusus membahas bantuan kemanusiaan dari sudut pandang politik, bantuan kemanusiaan sejatinya tidak dapat dilepaskan dari politik. Mengingat dalam proses pengambilan kebijakan bantuan kemanusiaan tersebut melewati proses politik sehingga faktor politik menjadi faktor utama yang harus dilihat dalam pemberian bantuan kemanusiaan khususnya penentuan alokasi jumlah bantuan.⁶⁷ Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor politik tersebut antara lain kedekatan antara negara donor dan negara resipien dalam hal hubungan diplomatik

⁶⁶ Drury, Olson, dan Van Belle, *The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995*, *The Journal of Politics*, Vol. 67, No. 2, Mei 2005, 454-473 diunduh dari: <http://www.jstor.org/stable/10.1111/j.1468-2508.2005.00324.x> pada 1 April 2017 pukul 14.57 WIB.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 460

maupun aliansi dan kondisi politik di dalam negeri negara donor maupun negara resipien.

Walaupun faktor politik merupakan faktor utama dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid*, Drury, Olson, dan Van Belle juga memasukkan faktor non-politik sebagai faktor yang juga mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selain faktor politik yang telah dijelaskan sebelumnya faktor non-politik seperti kondisi dari negara resipien dan jenis bencana yang terjadi ikut mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya khususnya menentukan jumlah alokasi jumlah bantuan.

Melalui AS sebagai objek penelitiannya, Drury, Olson, dan Van Belle berhasil mengemukakan hasil analisis yang dilakukannya bahwa faktor politik dan non-politik mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh AS khususnya dalam alokasi jumlah bantuan. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa faktor politik merupakan faktor yang cukup kuat mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh AS. Melalui hasil analisis tersebut diketahui bahwa AS memberikan bantuan kemanusiaan yang lebih besar kepada negara yang menjadi aliansinya dibandingkan negara yang bukan aliansinya.⁶⁸ Selain itu Perang Dingin juga menjadi faktor politik yang ikut mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh AS. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh AS banyak dipengaruhi oleh tujuan melindungi aliansi yang dimilikinya dan melebarkan pengaruh yang dimilikinya ke negara-negara yang bukan bagian dari aliansinya.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 466

Dalam kata lain bantuan kemanusiaan tersebut diberikan oleh AS untuk membendung pengaruh dari lawan politiknya yakni Uni Soviet.

Konsep *the Politics of Humanitarian Aid* ini merupakan konsep yang penulis pilih sebagai alat analisis dalam penelitian yang akan penulis lakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya ke Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

Penulis memilih konsep ini sebagai alat analisis penulis karena konsep ini memiliki variabel, sub-variabel, dan indikator yang cukup banyak membantu penulis untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya ke Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Untuk mengetahui konsep *the Politics of Humanitarian Aid* lebih lanjut, berikut ini merupakan mengenai masing-masing variabel, sub-variabel, dan indikator yang terdapat dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid*.

2.2.3.1 Political Connections

Political connections atau hubungan politik merupakan variabel pertama dari konsep *the Politics of Humanitarian Aid* yang dikemukakan oleh Drury, Olson, dan Van Belle. Hubungan politik merupakan faktor yang cukup menentukan atau memberikan pengaruh bagi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya baik menentukan apakah bantuan tersebut layak atau tidak dan jumlah alokasi bantuan tersebut kepada negara resipien. Terdapat beberapa faktor atau sub-variabel dalam variabel ini antara lain, *donor's foreign policy concerns or reservation about potential recipient state* atau fokus kebijakan luar negeri dari negara donor dan potensi dari negara resipien, *donor's domestic political concerns*

atau kondisi politik dalam negeri dari negara donor, dan domestic politics within the *potential recipient state* atau kondisi politik dalam negeri dari negara resipien.⁶⁹

2.2.3.1.1 Donor Foreign Policy Concern or Reservation about the Potential

Recipient State

Seperti yang telah dijelaskan di sub-bab sebelumnya bantuan kemanusiaan merupakan salah satu jenis dari bantuan luar negeri yang merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri dari suatu negara. Oleh karena itu mengapa fokus kebijakan luar negeri dari negara donor dapat dikatakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Hal tersebut tentunya berkaitan erat dengan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh negara donor melalui pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Terdapat empat indikator antara lain, *alliance* atau aliansi, *the Cold War* atau Perang Dingin, *the recipient's regime type* atau jenis rezim dari negara resipien, dan *it's level of development* atau tingkat pembangunan di negara resipien untuk mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi negara donor dalam memberikan serta mengalokasikan jumlah bantuan kemanusiaannya kepada negara resipien.⁷⁰

Menurut Drury, Olson, dan Van Belle negara yang menjadi aliansi dari negara donor memiliki peluang lebih besar untuk menerima bantuan kemanusiaan dan mendapatkan alokasi jumlah bantuan kemanusiaan yang lebih besar apabila dibandingkan negara yang tidak menjadi aliansi dari negara donor.⁷¹ Bantuan kemanusiaan tersebut diberikan salah satunya dengan tujuan untuk memulihkan atau menstabilkan kembali kondisi di negara resipien yang merupakan negara

⁶⁹ *Ibid*, hal. 456

⁷⁰ *Ibid*, hal. 457

⁷¹ *Ibid*.

aliansinya. Masih berkaitan dengan indikator sebelumnya, indikator selanjutnya yakni Perang Dingin dimana AS sebagai objek penelitian Drury, Olson, dan Van Belle memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara-negara netral yang tidak berpihak kepada AS maupun Uni Soviet hingga negara-negara yang menjadi aliansi Uni Soviet. Tujuan dari pemberian bantuan tersebut utamanya adalah menyebarkan pengaruhnya kepada negara-negara tersebut atau mencari aliansi baru. Penggunaan istilah aliansi dan dilibatkannya Perang Dingin sebagai indikator dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid* tidak lepas dari digunakannya AS sebagai objek penelitian dan ruang lingkup penelitian yang sebagian besar dilakukan pada masa berlangsungnya Perang Dingin yakni pada tahun 1964-1995.

Indikator jenis rezim yang dijalankan oleh negara resipien berbicara mengenai kedekatan dari sisi ideologi antara negara donor dan negara resipien. Bantuan kemanusiaan akan lebih mudah diberikan oleh negara donor kepada negara yang memiliki kesamaan ideologi, semakin dekat atau sama ideologi yang dimiliki oleh negara donor dan negara resipien tentunya akan semakin dekat hubungan antara kedua negara, maka akan semakin mudah juga negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya.⁷² Oleh karena itu negara resipien yang secara ideologi memiliki kesamaan dengan negara donor bantuan kemanusiaan akan memiliki peluang lebih besar dalam mendapatkan bantuan kemanusiaan dan mendapatkan alokasi jumlah bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang tidak memiliki kesamaan ideologi.

Tingkat pembangunan dari negara resipien merupakan indikator yang berkaitan dengan kemampuan dan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh negara

⁷² *Ibid.*

resipien. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan kemampuan dari negara resipien dalam melakukan penanggulangan bencana. Semakin tinggi tingkat pembangunan atau kekayaan dari negara resipien maka semakin besar pula kemampuan negara tersebut dalam mengatasi dampak dari bencana yang melanda wilayahnya. Oleh karena itu negara donor akan memberikan alokasi bantuan yang lebih sedikit kepada negara yang tingkat pembangunannya tinggi atau kaya akan sumber daya domestik.⁷³

2.2.3.1.2 Donor Domestic Political Concerns

Kondisi politik domestik dari negara donor merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan pemberian bantuan luar negeri termasuk diantaranya adalah bantuan kemanusiaan yang merupakan bentuk kebijakan luar negeri suatu negara tentunya ikut dipengaruhi oleh kondisi politik domestik. Kebijakan tersebut harus melewati berbagai tahapan-tahapan politik domestik yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi proses perumusan dan pengambilan kebijakan bantuan kemanusiaan suatu negara, yakni *current budget deficit*, *salience of the disaster*, dan *current donor disasters*.⁷⁴

Current budget deficit atau defisit anggaran negara yang tengah dialami oleh negara donor terkait dengan dana yang dialokasikan khusus untuk keperluan pemberian bantuan luar negeri. Anggaran negara yang dialokasikan untuk keperluan pemberian bantuan luar negeri khususnya bantuan kemanusiaan bersifat tidak tetap atau *tentative* mengikuti seberapa besar pendapatan dan kebutuhan anggaran belanja negara. Oleh karena itu defisit anggaran negara menjadi salah satu

⁷³ *Ibid*, hal. 458

⁷⁴ *Ibid*.

faktor yang berpengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara. Negara donor bantuan kemanusiaan tentunya telah mempertimbangkan defisit anggaran yang dimilikinya sebelum memberikan bantuan kemanusiaan. Defisit anggaran yang muncul akibat alokasi bantuan kemanusiaan yang terlampau besar tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi domestik negara khususnya kondisi pemerintahan yang sedang berlangsung. Jika negara donor bantuan kemanusiaan sedang dalam keadaan defisit anggaran maka alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan akan cenderung menurun atau berkurang jumlahnya.⁷⁵

Salience of the disaster atau seberapa *viral*-nya bencana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara. Media merupakan pihak yang berperan cukup besar dalam *viral*-nya suatu bencana. Semakin besar perhatian yang diberikan oleh media terhadap suatu bencana berimplikasi pada *viral*-nya bencana tersebut. Oleh karena itu semakin besarnya media terhadap suatu bencana akan diikuti oleh semakin besarnya alokasi bantuan kemanusiaan dari negara donor.⁷⁶

Current donor disaster atau seberapa besar dampak bencana yang sebelumnya pernah dialami oleh negara donor. Apabila negara donor sebelumnya pernah mengalami bencana besar yang mungkin sama dengan bencana yang dialami oleh negara resipien memungkinkan munculnya kepekaan tertentu atau rasa empati, khususnya dari pemerintah selaku perumus kebijakan dan masyarakat negara donor yang memunculkan keinginan untuk memberikan bantuan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

kemanusiaan atau bahkan lebih dari itu.⁷⁷ Faktor ini merupakan faktor yang berbicara mengenai rasa empati yang ditunjukkan oleh negara donor terhadap bencana yang terjadi di negara resipien sekaligus meningkatkan alokasi bantuan kemanusiaannya.

Bantuan kemanusiaan pada dasarnya merupakan bantuan yang bebas dari motif atau kepentingan politik akan tetapi faktanya dalam proses perumusan serta pengambilan kebijakan alokasi bantuan kemanusiaan tersebut melalui berbagai proses politik baik di tingkat domestik maupun internasional. Oleh karena itu ketiga faktor yang telah dijelaskan diatas memiliki pengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara donor, baik keputusan diberikan atau tidaknya bantuan tersebut dan alokasi jumlah bantuan yang akan diberikan kepada negara resipien yang sedang dilanda bencana.

2.2.3.1.3 *Domestic Politics within the Political Recipient State*

Faktor politik lainnya yang dapat mempengaruhi alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor adalah kondisi politik domestik dari negara resipien. Namun dalam tulisannya, Drury, Olson, dan Van Belle menyatakan bahwa analisisnya berfokus pada dua faktor atau sub-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni *donor foreign policy concerns or reservation about the potential recipient state* dan *donor domestic political concerns*, hal tersebut dikarenakan pada sub-variabel ketiga yakni, *domestic politics within the potential recipient state* tidak jelas apakah politik domestik negara resipien secara konsisten memberikan pengaruh terhadap alokasi bantuan kemanusiaan negara donor.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid*, hal. 459

⁷⁸ *Ibid*, hal. 456

Namun Drury, Olson, dan Van Belle menyatakan bahwa tetap ada kemungkinan bahwa kondisi politik negara resipien seperti tingkat korupsi yang tinggi, efisiensi penggunaan bantuan yang buruk oleh negara resipien, serta kondisi pemerintahan negara resipien yang tidak kondusif dapat mempengaruhi negara donor untuk mempertimbangkan kembali bantuan kemanusiaan yang akan diberikannya.⁷⁹ Dalam sub-variabel ini indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari politik domestik negara resipien terhadap pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara donor adalah *recipient's level of corruption* dan *recipient's political fractiousness*.⁸⁰ *Recipient's level of corruption* atau tingkat korupsi dari pemerintah di negara resipien memiliki pengaruh terhadap alokasi bantuan kemanusiaan dari negara donor. Tingkat korupsi tersebut berbanding terbalik dengan alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor, Semakin tinggi tingkat korupsi dari pemerintah di negara resipien maka akan semakin rendah alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor, begitupun sebaliknya. *Recipient's political fractiousness* atau ketegangan politik domestik yang terjadi di negara resipien merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan negara donor untuk menentukan apakah bantuan kemanusiaan tersebut layak untuk dikirimkan atau tidak dan seberapa besar alokasi bantuan kemanusiaan yang harus diberikan kepada negara resipien.

2.2.3.2 Non Political Factors

Selain faktor-faktor politik yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor non-politik juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam pemberian bantuan

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

kemanusiaan oleh suatu negara. Faktor non-politik tersebut menjadi variabel kedua dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid* yang dikemukakan oleh Drury, Olson, dan Van Belle. Terlepas dari adanya faktor politik yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh suatu negara, terdapat faktor non-politik berupa bencana itu sendiri yang juga mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut dan dijelaskan melalui indikator *type of disaster*.⁸¹ Indikator tersebut merupakan satu-satunya indikator yang digunakan untuk mengetahui adanya faktor non-politik yang ikut mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan.

2.2.3.2.1 *Type of Disaster*

Type of disaster atau jenis bencana yang terjadi di negara resipien merupakan indikator dari faktor non-politik yang mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiannya. Seberapa besar atau parahnya dampak dari bencana yang terjadi di negara resipien menentukan alokasi serta jenis bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor, semakin banyak korban serta kerugian akibat bencana maka dibutuhkan pula respon yang cepat dan tepat dari negara donor.⁸²

Secara umum terdapat dua jenis bencana yang terjadi di dunia, yakni bencana alam dan bencana yang diakibatkan oleh manusia. Namun Drury, Olson, dan Van Belle memiliki penjelasan khusus dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid* ini, antara lain *technological disasters* dengan contoh bencana kebocoran gas beracun di Bhopal, India, *complex-humanitarian emergencies*

⁸¹ *Ibid*, hal. 459

⁸² *Ibid*, hal. 460

seperti yang terjadi di Somalia, Rwanda, dan Bosnia, dan *natural disaster* atau bencana alam.⁸³ *Technological disasters* dan *complex-humanitarian emergencies*

merupakan bencana yang merujuk pada bencana yang diakibatkan oleh manusia.

Dua jenis bencana tersebut dapat dikatakan memiliki keterkaitan dalam hal politik mengingat melibatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas bencana

yang terjadi. Sedangkan *natural disaster* atau bencana alam memiliki keterkaitan politik yang lebih rendah dibandingkan dua jenis bencana lainnya mengingat proses

terjadinya bencana diakibatkan oleh aktivitas alam.

2.3 Operasionalisasi Konsep

2.3.1. Political Connection

2.3.1.1 Donor Foreign Policy Concern or Reservation about the Potential

Recipient State

Terdapat empat indikator yang digunakan pada sub-variabel ini, antara lain *alliances*, *Cold War*, *recipient's regime type*, dan *recipient level of development*.

Indikator pertama, yakni *alliance* melihat apakah hubungan aliansi yang terjalin antara negara donor dan negara resipien mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara donor kepada negara resipien. Dalam kasus pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016, Indonesia selaku negara donor tidak memiliki hubungan aliansi secara khusus dengan Fiji selaku negara resipien. Namun kedua negara merupakan negara yang telah menjalin hubungan diplomatik secara resmi dan menyepakati beberapa kerjasama di berbagai bidang.

⁸³ *Ibid.*

Fiji dikenal sebagai negara di kawasan Pasifik Selatan yang memiliki kedekatan hubungan yang cukup baik dengan Indonesia. Fiji merupakan salah satu negara yang berpengaruh terhadap kepentingan Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dan organisasi regional MSG terkait dengan isu Papua Barat. Fiji secara tegas memberikan dukungannya terhadap Indonesia terkait dengan isu tersebut.

Melalui pernyataan PM Josaia Voreqe Bainimarama, Fiji menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia terhadap Papua tidak bisa dipertanyakan lagi.⁸⁴ Selain itu Fiji merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang mendukung bergabungnya Indonesia sebagai bagian dari MSG dan ras Melanesia secara keseluruhan. Seperti yang dikemukakan oleh Menlu Fiji, Inoke Kubuabola, Indonesia merupakan rumah bagi mayoritas ras Melanesia.⁸⁵ Apabila merujuk pada penjelasan fakta diatas, maka kedekatan hubungan antara Fiji dan Indonesia termasuk adanya dukungan terhadap Indonesia terkait dengan isu Papua Barat disinyalir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan pada bencana Topan Winston pada tahun 2016.

Indikator kedua, yakni *Cold War* atau Perang Dingin tidak menjadi faktor yang menjadi faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston. Karena jangka waktu penelitian yang diambil penulis adalah pada tahun 2016 atau diluar masa Perang Dingin. Selain itu objek penelitian penulis yakni Indonesia tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan Perang Dingin sehingga menjadi tidak relevan

⁸⁴ ABC Radio Australia, *5 Hal yang Perlu Diketahui Mengenai Papua Barat*, Loc. Cit.

⁸⁵ Johnny Blades, *Melanesia's Test: The Political Quandary of West Papua*, *Pacific Journalism Review*, Issue 20 Vol 2. 2014, 31 Oktober 2014, hal. 31, diunduh dari: <https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/view/164> pada 17 April 2017 pukul 00.00 WIB.

apabila indikator ini digunakan dalam penelitian penulis. Oleh karena itu pada pembahasan selanjutnya penulis tidak akan mengikutsertakan indikator ini.

Indikator ketiga, yakni *recipient's regime type* melihat apakah kesamaan ideologi yang dimiliki oleh negara donor dan negara resipien berpengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan oleh negara donor. Fiji merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem parlementer.⁸⁶ Sedangkan Indonesia menganut sistem demokrasi yang berpedoman pada Pancasila khususnya sila ke-empat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.⁸⁷ Terlihat bahwa terdapat kesamaan ideologi yang dianut oleh kedua negara. Namun, pada dasarnya kesamaan ideologi tidak berpengaruh kepada pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia secara keseluruhan karena Indonesia memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif. Salah satu fakta yang dapat memberikan gambaran tersebut adalah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Korea Utara yang menganut ideologi yang berseberangan dengan Indonesia.⁸⁸

Indikator keempat, yakni *recipient's level development* melihat apakah tingkat pembangunan di negara resipien mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara resipien. Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu negara maka pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan semakin baik. Tingkat pembangunan yang semakin tinggi dari negara resipien

⁸⁶ Central Intelligence Agency (CIA), *The World Factbook: Fiji*, diakses dari: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html> pada 17 April 2017 pukul 00.45 WIB.

⁸⁷ P, Sharma, *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*, Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004, hal. 4-5.

⁸⁸ Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea, *Pelabuhan Nampho: Kedatangan Bantuan Indonesia untuk Korea Utara*, 12 Oktober 2012, diakses dari: <http://www.Kemenlu.go.id/pyongyang/id/arsip/siaran-pers/Pages/PELABUHAN-NAMPHO-KEDATANGAN-BANTUAN-INDONESIA-UNTUK-KOREA-UTARA.aspx> pada 13 September 2017 pukul 11.13 WIB.

akan mempengaruhi keputusan negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya termasuk dalam menentukan jumlah alokasi bantuan tersebut. Fiji merupakan salah satu negara yang masuk ke dalam kategori *upper middle income country* dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 % di tahun 2015 berdasarkan data yang diberikan oleh World Bank. Fiji dapat dikatakan sebagai salah satu negara di kawasan Pasifik Selatan dengan tingkat pembangunan yang cukup tinggi. Oleh karena itu tingkat pembangunan disinyalir tidak memberikan pengaruh pada kasus pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia ke Fiji pasca bencana Topan Winston tahun 2016.

2.3.1.2 Donor Domestic Political Concern

Terdapat tiga indikator dalam sub-variabel *donor domestic political concern* ini, antara lain *current budget deficit*, *saliency of the disaster*, dan *current donor disaster*. Melalui indikator pertama *current budget deficit* dapat dilihat apakah defisit anggaran dari negara donor berpengaruh terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada negara resipien. Semakin tinggi defisit anggaran yang harus ditanggung oleh negara donor maka jumlah alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan cenderung akan menurun dan sebaliknya.

Pada tahun 2016 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia mencapai angka Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).⁸⁹ Defisit APBN tersebut terjadi karena pendapatan yang berhasil diperoleh negara hanya sebesar Rp

⁸⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016 (.pdf)*, hal 71, 7 Maret 2017, diakses dari: <https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2016> pada 15 April 2017 pukul 19.08 WIB.

1.551,8 triliun atau berada dibawah anggaran belanja tahun 2016 yang mencapai angka Rp 1.859 triliun.⁹⁰ Angka tersebut dapat dikatakan berada dalam tingkat yang aman. Seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, defisit APBN tahun 2016 dinilai masih aman karena berada dibawah batas 3 persen atau sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.⁹¹ Selain itu apabila berkaca pada tahun sebelumnya atau tahun 2015, defisit APBN pada tahun 2016 dapat dikatakan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Pada tahun 2015 berada pada angka Rp 318,5 triliun atau 2,8 persen dari PDB.⁹² Turunnya defisit APBN pada tahun 2016 tersebut disinyalir menjadi salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Turunnya defisit APBN tersebut mempengaruhi Indonesia untuk mengalokasikan dana bantuan kemanusiaan dengan jumlah yang cukup besar untuk diberikan kepada Fiji.

Indikator kedua, yakni *saliency of the disaster* melihat apakah perhatian publik internasional khususnya media mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara resipien. Semakin besar perhatian dari publik internasional termasuk sorotan dari media terhadap bencana yang terjadi maka negara donor akan semakin mudah memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara resipien. Bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji pada tahun 2016 dapat dikatakan cukup menarik perhatiannya publik internasional dan menjadi sorotan berbagai media internasional seperti British

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Kompas.com, *Defisit APBN 2016 Mencapai Rp 307,7 Triliun*, 3 Januari 2017, diakses dari: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/03/171500026/defisit.apbn.2016.mencapai.rp.307.7.triliun> pada 15 April 2017 pukul 19.50 WIB.

⁹² *Ibid.*

Broadcasting Corporation (BBC), Cable News Network (CNN), Australia Broadcasting Corporation (ABC), dan sebagainya. Selain itu beberapa media nasional Indonesia juga ikut menyorot bencana tersebut termasuk diantaranya adalah media milik negara, antara lain Portal Berita ANTARA (www.antaranews.com) milik LKBN (Lembaga Kantor Berita Nasional) LKBN Antara dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Indikator ketiga, yakni *current donor disaster* berbicara mengenai rasa empati dari negara donor terhadap bencana yang terjadi di negara resipien. Rasa empati tersebut muncul dari bencana yang sebelumnya pernah terjadi di negara donor. Pada kasus ini Indonesia sebagai negara donor merupakan negara dengan predikat rawan bencana yang berulang kali telah mengalami bencana berskala kecil maupun besar. Menurut data yang berhasil dihimpun oleh BNPB, pada tahun 2015 Indonesia harus menghadapi 1781 bencana, kemudian di tahun di tahun 2016 jumlah tersebut melonjak menjadi 2413 bencana.⁹³ Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia memiliki pengalaman yang cukup baik dalam melakukan penanganan bencana termasuk diantaranya merespon bencana yang terjadi di negara lain termasuk Topan Winston yang terjadi di Fiji pada tahun 2016.

2.3.1.3 Domestic Politics within the Political Recipient State

Sub-variabel *domestic politics within the political recipient state* melihat bagaimana kondisi domestik dari negara resipien mempengaruhi alokasi pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor. Terdapat dua indikator yang digunakan

⁹³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*, diakses dari: http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/simple_data.jsp pada 15 April 2017 pukul 21.40 WIB.

oleh sub-variabel ini, antara lain *recipient's level of corruption* dan *recipient's political fractiousness*. Indikator pertama, yakni *recipient's level of corruption* melihat apakah tingginya tingkat korupsi yang ada di pemerintahan domestik negara resipien mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara resipien.

Fiji merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi khususnya sebelum kudeta militer yang terjadi pada tahun 2006. Akibat tingginya tingkat korupsi tersebut, The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI) memberikan skor 38 dari skala 1-100 dan skor tersebut terus mengalami penurunan.⁹⁴ Tingkat korupsi yang tinggi tersebut tersebar di berbagai sektor penting di pemerintahan domestik Fiji. Aktivitas korupsi yang sudah berlangsung lama dan mendarah daging tersebut menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah Fiji, khususnya pasca kudeta militer. Beberapa upaya dilakukan untuk mengurangi tingkat korupsi tersebut. Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Fiji Independent Commission Against Corruption (FICAC) secara resmi pada tahun 2007.⁹⁵ Pembentukan komisi tersebut kemudian diikuti oleh beberapa upaya lain yang membuktikan keseriusan pemerintah Fiji dalam memerangi korupsi. Pada tahun 2008, Fiji menjadi negara yang menandatangani United Nations Convention against Corruption (UNCAC).⁹⁶ Selain itu pemerintah Fiji juga melakukan beberapa perubahan peraturan domestik untuk memperkecil celah-celah yang dapat

⁹⁴ *Transparency International, Anti Corruption Helpdesk, Providing On-Demand Research to Help Fight Corruption, Corruption and Anti-Corruption in Fiji, 2013, hal. 2, diunduh dari: https://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Overview_of_corruption_and_anti-corruption_in_Fiji.pdf pada 30 April 2017, pukul 15.04 WIB.*

⁹⁵ *Transparency International, Ibid. hal. 5.*

⁹⁶ *Ibid.*

digunakan untuk melakukan aktivitas korupsi. Upaya-upaya yang disebutkan diatas dapat dikatakan menunjukkan keseriusan dari pemerintah Fiji dalam memerangi korupsi. Adanya upaya dari pemerintah Fiji dalam mengurangi tingkat korupsi tersebut ikut disinyalir ikut memberikan pengaruh terhadap kebijakan Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

Indikator kedua, yakni *recipient's political fractiousness* melihat apakah dengan ketegangan politik yang terjadi di negara resipien mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor kepada negara resipien. Fiji merupakan negara yang telah berulang kali mengalami ketegangan politik di pemerintahan domestiknya atau dapat dikatakan tidak stabil. Terjadinya pembubaran parlemen dan kudeta merupakan hal yang paling berpengaruh pada munculnya ketegangan politik di Fiji. Pembubaran parlemen yang kemudian diikuti oleh kudeta militer pada tahun 2006 berhasil membuat ketegangan politik di Fiji meningkat. Ketegangan tersebut semakin meningkat dengan adanya kecaman beserta respon yang muncul dari dunia internasional. Kecaman beserta respon tersebut diantaranya berdampak pada alokasi bantuan luar negeri yang diterima oleh Fiji. Dimana beberapa donor bantuan luar negeri Fiji sempat mengurangi hingga menyetop bantuannya.⁹⁷ Selain itu hal lain yang juga ikut mempengaruhi ketegangan politik di Fiji adalah sering munculnya konflik horizontal antara etnis India selaku pendatang dengan etnis asli atau pribumi di Fiji. Ketegangan politik domestik di Fiji ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan

⁹⁷ *Ibid.* Hal. 2.

terhadap pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

2.3.2 Non Political Factors

2.3.2.1 Type of Disaster

Type of disaster merupakan indikator satu-satunya dari variabel non-political factors. Indikator ini melihat bagaimana jenis bencana yang terjadi di negara resipien mempengaruhi negara donor ketika memberikan bantuan kemanusiaan termasuk menentukan alokasi jumlah bantuan. Tersebut. Bencana topan merupakan jenis bencana yang lazim terjadi di kawasan Pasifik Selatan. Kawasan Pasifik Selatan merupakan sekumpulan pulau-pulau kecil yang terletak tepat di tengah-tengah Samudera Pasifik dan berada dekat dengan garis khatulistiwa. Hal tersebut menyebabkan kawasan tersebut menjadi rawan akan bencana Topan. Bencana topan tersebut muncul akibat proses penguapan air laut yang terlampau besar dan cepat sehingga terjadi proses pembekuan di awan dan menyebabkan pusaran angin bergerak sangat cepat.⁹⁸ Pusaran angin tersebut kemudian menyapu bersih apapun yang ada di depannya dan memporak-porandakan wilayah yang dilewatinya. Memberikan dampak kerusakan yang sangat parah bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut.

Bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji pada 20 dan Februari 2016 merupakan salah satu bencana topan terbesar yang pernah melanda kawasan Pasifik Selatan. Selain itu Topan Winston juga berhasil mencatat angka kerugian mencapai

⁹⁸ Ilmu Geografi, *Lima Penyebab Angin Topan dan Cara Penanggulangannya*, 15 Januari 2016, diakses dari: <http://ilmugeografi.com/fenomena-alam/penyebab-angin-topan> pada 20 April 2017 pukul 09.01 WIB.

US \$470 atau angka kerugian terbesar sepanjang sejarah akibat bencana topan di kawasan Pasifik Selatan.⁹⁹ Angka kerugian yang besar tersebut mencakup kerusakan infrastruktur yang cukup parah di berbagai wilayah di Fiji. Dampak kerusakan dari bencana Topan Winston yang cukup parah tersebut kemudian mendorong Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam bentuk dana dan logistik dengan jumlah total US \$5 juta. Bantuan tersebut oleh Indonesia diberikan dengan harapan mampu membantu proses penanganan bencana termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur yang terdampak. Untuk itu selain mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa dana dan logistik kepada Fiji, Indonesia juga mengirimkan pasukan TNI AD dengan tujuan mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi infrastruktur yang terdampak bencana Topan Winston.

Tabel 2.1 Operasionalisasi Konsep *the Politics of Humanitarian Aid*

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Political Connection</i>	<i>Donor foreign policy concerns or reservations about the potential recipient state</i>	Alliances	Adanya kedekatan hubungan antara Indonesia dan Fiji khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Papua Barat mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston
		Recipient's regime type	Pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston tidak dipengaruhi oleh adanya kesamaan rezim antara Indonesia dan Fiji
		Recipient's level of development	Tingkat pembangunan Fiji yang lebih tinggi daripada Indonesia tidak mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston

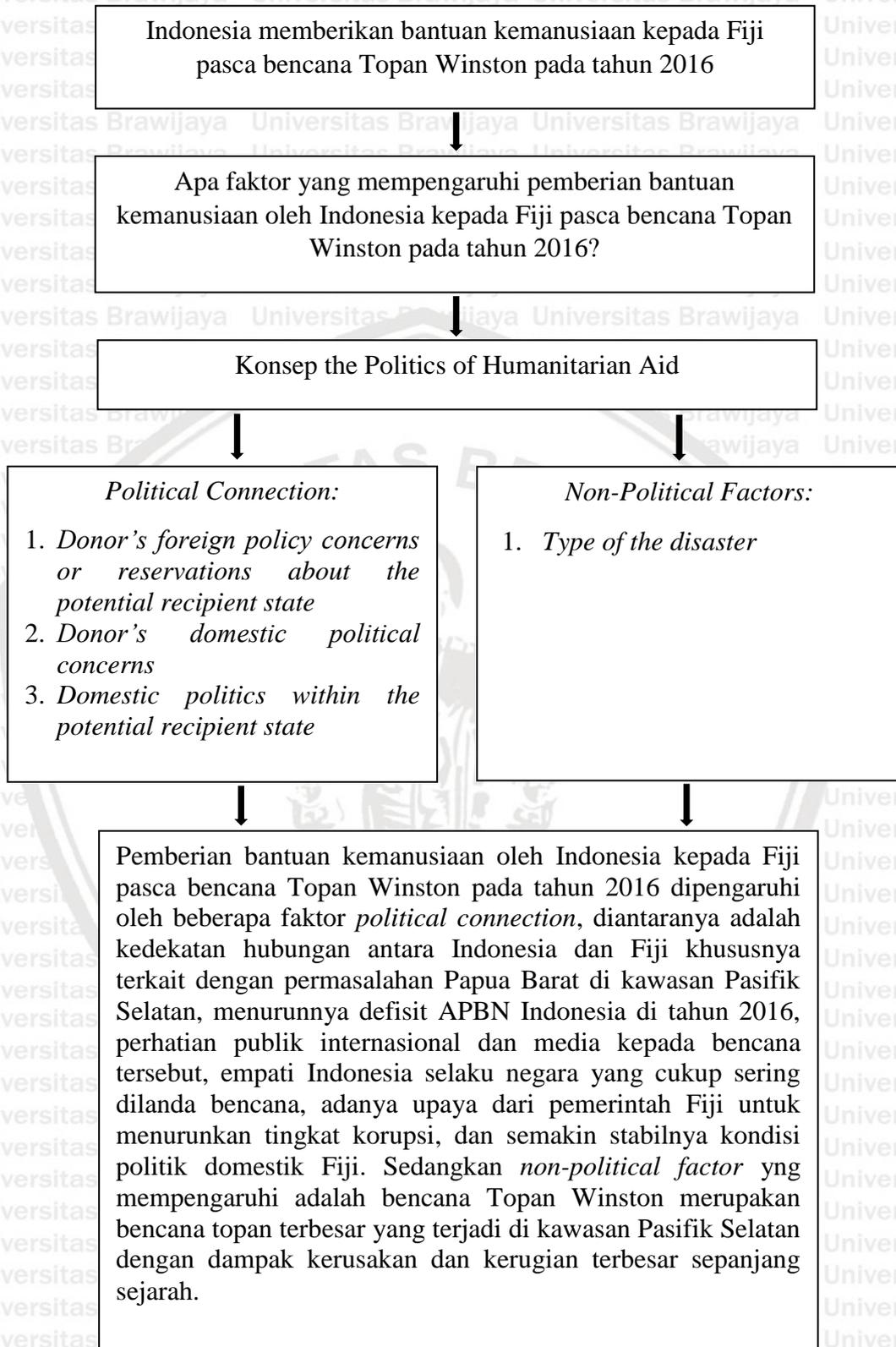
⁹⁹ International Business Time, *Op. Cit.*



		<i>Donor current budget deficit</i>	Defisit APBN Indonesia pada tahun 2016 yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston
		<i>The salience of the disaster</i>	Perhatian publik internasional khususnya media terhadap bencana Topan Winston mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji
	<i>Donor domestic political concerns</i>	<i>Current donor disaster</i>	Indonesia merupakan negara yang sering dilanda bencana. Hal tersebut meningkatkan empati Indonesia terhadap bencana Topan Winston di Fiji yang kemudian mendorong Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan
	<i>Domestic politics within the potential recipient state</i>	<i>Recipient's level of corruption</i>	Adanya upaya Fiji untuk mengurangi tingginya tingkat korupsi dalam pemerintahan domestiknya mempengaruhi pemerintah Indonesia
		<i>Recipient's political fractiousness</i>	Membatkannya kondisi politik domestik Fiji dan adanya upaya penyelesaian konflik antar etnis yang selama ini terjadi mempengaruhi mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston
<i>Non-political factor</i>		<i>Type of the disaster</i>	Bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji pada tahun 2016 yang merupakan salah satu bencana topan terbesar yang pernah melanda kawasan Pasifik Selatan dengan dampak kerugian terbesar sepanjang sejarah di kawasan tersebut mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia

(Sumber: Hasil olahan penulis)

2.4 Alur Pemikiran



2.5 Hipotesis

Pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 dipengaruhi oleh berbagai faktor baik politik maupun non-politik. Faktor politik yang mempengaruhi tersebut, antara lain adanya kedekatan hubungan antara Indonesia dan Fiji khususnya yang berkaitan dengan permasalahan Papua Barat di kawasan Pasifik Selatan dimana Fiji menjadi salah satu pihak yang memberikan dukungan terhadap Indonesia, turunnya angka defisit yang dialami oleh Indonesia di tahun 2016 dibandingkan pada tahun 2015, adanya empati dari Indonesia sebagai negara yang cukup sering dilanda bencana berskala kecil maupun besar, adanya upaya dari pemerintah Fiji dalam menurunkan tingkat korupsi di pemerintahan negaranya, dan kestabilan politik domestik Fiji yang semakin membaik pasca terjadinya kudeta militer. Sedangkan terkait faktor non-politik, bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji pada tahun 2016 merupakan bencana topan berskala besar dengan angka kerugian terbesar yang pernah melanda kawasan Pasifik Selatan sehingga mempengaruhi Indonesia untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana, logistik, dan tenaga untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada dasarnya merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan penjelasan mengenai penyebab atau faktor mengapa aktor melakukan tindakan tertentu. Penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian eksplanatif yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan sebab akibat antar variabel.¹⁰⁰ Hasil akhir dari penelitian ini nantinya akan menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat tersebut.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan kajian merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu penelitian. Pembatasan kajian tersebut bertujuan untuk menghindari adanya bias pada objek penelitian dan menghasilkan penelitian yang fokus dan tajam. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Ruang lingkup penelitian ini menitikberatkan pada tahun bencana topan terjadi atau pada saat bantuan tersebut diberikan oleh Indonesia kepada Fiji pada tahun 2016. Namun, tak menutup kemungkinan hal-hal lain yang terkait antara kedua yang terjadi sebelum proses pemberian bantuan ini akan penulis ikut sertakan dalam penelitian ini. *Level of Analysis* atau tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah negara sebagai aktor hubungan

¹⁰⁰ Prof. Sukardi, Ph.D., *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hal. 14.

internasional, yakni Indonesia sebagai negara donor dan Fiji sebagai negara resipien bantuan kemanusiaan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer penulis lakukan melalui observasi dokumen - dokumen resmi terkait dengan topik yang penulis angkat dalam penelitian ini. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder penulis lakukan melalui studi pustaka (*library research*). Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui buku, jurnal, laporan tertulis, surat kabar, atau majalah. Selain itu tambahan data sekunder juga diperoleh melalui pustaka daring (*online*) atau pencarian data melalui internet.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.¹⁰¹ Teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data secara kualitatif memungkinkan penulis untuk melakukan analisis data primer dan sekunder yang berhasil penulis himpun untuk keperluan penelitian ini. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh penulis akan disimpulkan untuk memberikan jawaban atas isu atau fenomena yang ada di lapangan. Kesimpulan tersebut selain menjadi penjelasan secara ringkas atau gagasan akhir dari penelitian yang penulis lakukan juga menjadi jawaban dari argumen utama.

¹⁰¹ Darsono Wisadirana, *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. 101

3.5 Sistematika Penulisan

Penulis mengelompokkan penelitian ini ke dalam enam bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang menyesuaikan dengan kebutuhan analisis. Tujuan dari pengelompokkan tersebut adalah untuk memberikan pemaparan secara sistematis dan terperinci mengenai penelitian ini.

▪ **Bab I Pendahuluan**

Bab pertama dalam penelitian ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang memuat latar belakang yang menjelaskan hal dasar dari penelitian yaitu urgensi dari penelitian dan penjelasan umum mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang membatasi masalah penelitian dan tujuan dari dilakukannya penelitian serta manfaat dari penelitian yang memberikan kontribusi ke berbagai pihak terkait.

▪ **Bab II: Kerangka Pemikiran**

Bab kedua dalam penelitian ini berisikan tentang studi pustaka yang menjelaskan posisi dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan studi-studi terdahulu. Selain itu penulis memaparkan landasan teori yang menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terjadi, alur pemikiran atau kerangka pemikiran yang memberikan gambaran singkat teori, operasionalisasi konsep yang menjelaskan variabel-variabel penelitian ke dalam suatu konsep yang memuat indikator-indikator penelitian.

▪ **Bab III: Metodologi Penelitian**

Bab ketiga dalam penelitian ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih, ruang lingkup penelitian sebagai fokus kajian dalam penelitian, teknik yang

digunakan dalam pengumpulan data beserta penjelasan proses yang dilalui mulai dari pengumpulan data, pengelompokan data, hingga interpretasi data yang relevan dengan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian dari awal hingga akhir.

▪ **Bab IV: Gambaran Umum**

Bab keempat dalam penelitian ini menjelaskan tentang gambaran umum yang berkaitan dengan pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca-bencana Topan Winston pada tahun 2016. Bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia, hubungan antara Indonesia dan Fiji, kondisi bencana Topan Winston, dan pemberian bantuan kemanusiaan itu sendiri.

▪ **Bab V: Pembahasan**

Bab kelima dalam penelitian ini berisi pembahasan dan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Analisis pada bab ini dijelaskan menggunakan variabel beserta indikator konsep the *Politics of Humanitarian Aid* yang sebelumnya telah dijelaskan pada bab kedua.

▪ **Bab VI: Penutup**

Bab keenam merupakan bab yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 dan saran yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB IV

BANTUAN KEMANUSIAAN INDONESIA KEPADA FIJI PASCA

BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016

Pada bab IV ini penulis akan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum dari objek penelitian yakni, bantuan luar negeri Indonesia dalam bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Melalui gambaran umum tersebut akan dijelaskan secara keseluruhan mengenai bentuk bantuan yang diberikan, jumlah bantuan yang diberikan, bagaimana proses pemberian bantuan, serta hubungan antara Indonesia dan Fiji pasca pemberian bantuan kemanusiaan tersebut.

Sebelum memberikan penjelasan mengenai bantuan kemanusiaan tersebut penulis terlebih dahulu akan memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemberian bantuan kemanusiaan tersebut, antara lain sejarah hubungan Indonesia dan Fiji, sejarah bantuan luar negeri Indonesia, dan karakteristik bantuan luar negeri Indonesia secara umum. Penjelasan tersebut diberikan dengan tujuan mempermudah proses analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 di bab selanjutnya.

4.1 Bantuan Luar Negeri Indonesia

Setiap negara memiliki preferensi masing-masing dalam memberikan bantuan luar negerinya termasuk pada jenis bantuan yang diberikan, begitupun dengan Indonesia. Mengenai preferensi jenis bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia, secara umum dapat dibagi ke dalam dua jenis bantuan, yakni

bantuan pembangunan kapasitas kepada negara-negara berkembang dan bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut tentunya memiliki perbedaan masing-masing khususnya terkait dengan peruntukannya kepada negara resipien.

4.1.1 Bantuan Pembangunan Kapasitas Kepada Negara-Negara Berkembang

Indonesia merupakan negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara resipien atau penerima bantuan luar negeri dari berbagai negara di dunia khususnya negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maju. Tercatat, Indonesia menjadi negara resipien utama bantuan luar negeri negara-negara maju, antara lain Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. Paradigma Indonesia sebagai negara resipien tersebut seringkali memunculkan asumsi masyarakat bahwa Indonesia merupakan negara yang bergantung kepada bantuan luar negeri, baik dalam bentuk hibah, pinjaman, hingga bantuan teknis berupa asistensi dari tenaga ahli yang berasal dari negara donor.

Namun, perlahan-lahan paradigma Indonesia sebagai negara resipien bantuan luar negeri tersebut mulai terkikis. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, Indonesia saat ini tidak lagi hanya berperan sebagai negara resipien bantuan luar negeri saja. Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara donor bantuan luar negeri yang memberikan bantuannya ke berbagai negara di dunia khususnya negara-negara berkembang. Indonesia saat ini telah memiliki peran ganda sebagai negara resipien sekaligus donor bantuan luar negeri. Peran tersebut sesungguhnya telah dijalankan cukup lama oleh Indonesia, tepatnya sejak era Orde Baru dibawah kepemimpinan

Presiden Soeharto di dasawarsa 1980an.¹⁰² Peran tersebut semakin menonjol dewasa ini setelah Indonesia semakin berperan aktif dalam kerangka Kerjasama Selatan - Selatan (KSS) yang kemudian dikembangkan menjadi Kerjasama Selatan – Selatan dan dan Triangular (KSST) yang melibatkan dukungan mitra pembangunan yang kemudian bergabung di dalamnya. Kerjasama tersebut merupakan kerjasama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam rangka mencapai kemandirian bersama yang dilandasi oleh solidaritas, kesetaraan (*mutual opportunity*) dan saling menguntungkan (*mutual benefit*).¹⁰³

Bergabungnya Indonesia ke dalam keanggotaan G20 atau 20 negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar juga semakin mengangkat peran Indonesia sebagai negara donor bantuan luar negeri. Bergabungnya Indonesia ke dalam G20 tersebut merupakan sebuah fakta yang menandakan bahwa Indonesia sudah beberapa langkah lebih maju dari beberapa negara berkembang lainnya. Oleh karena itu, apabila berbicara mengenai tanggung jawab moral, sudah seharusnya Indonesia ikut serta menjadi donor bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang yang kondisinya tidak lebih baik dari Indonesia. Selain itu peran sebagai negara donor bantuan luar negeri tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai anggota G-20 yang memiliki salah satu kepentingan kolektif, yakni pemenuhan *Overseas Development Aid* (ODA) untuk memberikan dampak secara global.

¹⁰² Siti Nugraha Mauludiah, *Budir's Note*, Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri RI: *Kemana Larinya Bantuan Negara Kita*, Edisi No. 1/Juni/2014, hal. 2.

¹⁰³ State Secretariat of the Republic of Indonesia: Indonesia South – South Technical Cooperation (ISSTC), *Kerjasama Selatan –Selatan Indonesia*, 20 Maret 2017, diakses dari: <https://isstc.setneg.go.id/index.php/component/content/article/7-newsletter/219-kerja-sama-selatan-selatan-dan-triangular-indonesia> pada 18 Juli 2017 pukul 08.00 WIB.

Direktur Kerjasama Teknik (Dit. KST) Kemenlu RI, Siti Nugraha Mauludiah mengemukakan bahwa Indonesia saat ini telah berperan sebagai negara donor bantuan luar negeri khususnya bantuan teknis dan peran tersebut dijalankan oleh Dit. KST Kemenlu RI.¹⁰⁴ Bantuan teknis yang diberikan oleh Indonesia tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan kapasitas (*capacity building*) oleh Indonesia kepada negara-negara berkembang yang berperan sebagai negara resipien. Dit. KST secara khusus dibentuk oleh Kemenlu RI pada tahun 2006 dibawah Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik (Ditjen IDP) Kemenlu RI untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama teknik Indonesia dalam kerangka pembangunan dan kerja sama internasional khususnya antar negara berkembang dengan tujuan mengejar ketertinggalannya.¹⁰⁵ Ditjen IDP Kemenlu RI yang menjadi induk dari Dit. KST Kemenlu RI sendiri seperti yang dimaksud dalam dimaksud dalam Pasal 592 huruf c, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Permenlu RI) No. 2 tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kemenlu RI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan diplomasi publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, serta isu aktual dan strategis.¹⁰⁶ Dit. KST Kemenlu RI juga bertindak sebagai koordinator lembaga-lembaga pemerintah yang akan

¹⁰⁴ News Okezone, *Indonesia Mulai Berperan Sebagai Negara Pemberi Bantuan*, 5 Juni 2014, diakses dari: <https://news.okezone.com/read/2014/06/05/411/994417/indonesia-mulai-berperan-sebagai-negara-pemberi-bantuan> pada 18 Juli 2017 pukul 10.34 WIB.

¹⁰⁵ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), *Kerjasama Teknik*, 4 Juni 2012, diakses dari: <http://www.Kemenlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Kerjasama-Teknik.aspx> pada 18 Juli 2017 pukul 10.20 WIB.

¹⁰⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), 2006, Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006.

memberikan bantuan teknis kepada negara lain di berbagai bidang. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 16 lembaga pemerintah yang berhak untuk memberikan bantuan luar negeri khususnya bantuan teknis untuk keperluan pembangunan di negara lain¹⁰⁷. Setiap lembaga tersebut tentunya memiliki pendekatan, standar, dan prosedur yang berbeda terkait dengan pemberian bantuan luar negeri. Oleh karena itu dibutuhkan Dit. KST Kemenlu RI selaku koordinator agar pemberian bantuan tersebut berjalan dengan baik dan efektif.

Didirikannya Dit. KST Kemenlu RI memberikan ruang yang lebih luas bagi Indonesia untuk memberikan bantuan teknis bagi negara-negara berkembang lain, melalui program pelatihan, pengiriman ahli, lokakarya, pemagangan dan pemberian bantuan peralatan yang dibiayai oleh APBN.¹⁰⁸ Melalui bantuan luar negeri berupa kerjasama teknis tersebut Indonesia mendapatkan beberapa keuntungan yang berpengaruh terhadap diplomasi bilateral Indonesia khususnya jangka panjang. Menurut Siti Nugraha Maulidiah, keuntungan yang dapat diambil oleh Indonesia melalui kerjasama teknik tersebut adalah munculnya peningkatan hubungan politis, diplomasi ekonomi, serta diplomasi budaya.¹⁰⁹ Oleh karena itu pemberian bantuan oleh Indonesia tersebut masih terus dijalankan hingga saat ini yang tentunya juga diselaraskan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia secara keseluruhan.

Walaupun dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan perdebatan di tengah-tengah masyarakat karena menganggap bantuan yang diberikan tersebut

¹⁰⁷ The Jakarta Post, *Indonesia's Aid Unclear Without Aid Agency*, 2 Desember 2014, diakses dari: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/02/indonesia-s-aid-unclear-without-aid-agency.html> pada 18 Juli 2017 pukul 11.00 WIB.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ News Okezone, *Keuntungan Indonesia Menjadi Negara Donor*, 5 Juni 2014, diakses dari: <https://news.okezone.com/read/2014/06/05/411/994440/keuntungan-indonesia-menjadi-negara-donor> pada 18 Juli 2017 pukul 11.20 WIB.

kontradiktif dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih dihantui permasalahan kemiskinan dan pembangunan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah pedalaman.

Fokus bantuan luar negeri Indonesia berupa bantuan teknis untuk peningkatan kapasitas menurut Siti Nugraha Maulidiah memiliki perbedaan dengan bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara maju yang sebagian besar dilakukan oleh agensi bantuan luar negeri. Ia mencontohkan jika negara-negara maju seperti Jepang dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan AS dengan USAID memberikan bantuan berupa perangkat beserta program atau *software*-nya sedangkan Indonesia hanya memberikan bantuan berupa *software*-nya saja.¹¹⁰ Selain itu Indonesia juga mempunyai strategi khusus agar bantuan luar negeri yang diberikan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh negara resipien. Strategi tersebut adalah Indonesia hanya memberikan bantuan luar negerinya atau melakukan kerjasama apabila diminta oleh negara resipien.¹¹¹

Perbedaan lain antara bantuan luar negeri yang diberikan Indonesia dan bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara maju adalah pembangunan kapasitas dua arah khususnya dalam pemberian bantuan teknis.¹¹² Melalui pembangunan kapasitas dua arah tersebut, pihak yang menerima manfaat dari pemberian bantuan teknis tidak hanya negara resipien saja. Indonesia sebagai negara donor pun ikut merasakan manfaat secara langsung dari pemberian bantuan

¹¹⁰ Antara Sultra, *Indonesia Jadi Negara Pemberi Bantuan*, 5 Juni 2014, diakses dari: <http://www.antasultra.com/berita/272045/Kemenlu-indonesia-jadi-negara-pemberi-bantuan> pada 18 Juli 2017 pukul 13.02 WIB.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Arief Ilham Ramadhan, 2014, *Pembangunan Kapasitas Dua Arah*, Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri RI: *Kemana Larinya Bantuan Negara Kita*, Edisi No. 1/Juni/2014, hal. 03.

teknis tersebut khususnya terkait dengan pembangunan kapasitas. Hal tersebut tentunya berbeda dengan bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara-negara maju yang sebagian besar bersifat satu arah dari negara donor ke negara resipien, yakni dengan cara mendikte negara resipien agar mengikuti pola dari negara donor.

Manfaat tersebut didapatkan melalui beberapa strategi yang secara khusus diterapkan oleh Dit. KST Kemenlu RI. Salah satu diantaranya adalah dilibatkannya beberapa peserta asal Indonesia di setiap pemberian bantuan teknis di berbagai negara.¹¹³ Melalui dilibatkannya peserta asal Indonesia tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan saling berbagi pengalaman terkait dengan kondisi negara dengan peserta yang berasal dari negara resipien. Selain itu melalui bantuan teknis tersebut instruktur yang berasal dari Indonesia juga mendapatkan ilmu baru yang didapatkan dari kondisi negara resipien yang kemudian dapat dijadikan perbandingan dengan kondisi di Indonesia serta adanya peningkatan kemampuan berbahasa asing.

Pemberian bantuan luar negeri Indonesia khususnya berupa bantuan teknis sendiri didominasi oleh Palestina sebagai negara resipien bantuan. Menurut Siti Nugraha Mauludiah, hingga tahun 2016, sekitar 1600 masyarakat Palestina telah merasakan manfaat dari bantuan teknis yang diberikan oleh Indonesia.¹¹⁴ Palestina sendiri merupakan negara yang menjadi prioritas Indonesia dalam memberikan bantuan luar negerinya khususnya bantuan teknis. Diprioritaskannya Palestina tersebut menurut Siti Nugraha Mauludiah didasari atas kedekatan antara kedua

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Koran Sindo, *Jadikan Indonesia Negara Donor*, 3 Juli 2016, diakses dari: http://koran-sindo.com/page/news/2016-07-03/0/10/Jadikan_Indonesia_Negara_Donor pada 18 Juli 2017 pukul 16.06 WIB.

negara serta adanya kepentingan politis Indonesia yang tinggi terhadap Palestina.¹¹⁵

Beberapa contoh bantuan teknis yang diberikan oleh Indonesia kepada Palestina adalah pelatihan yang diberikan kepada pegawai negeri dan personel kepolisian negara tersebut.¹¹⁶

Kepentingan politis Indonesia yang tinggi terhadap Palestina sendiri didasari oleh upaya Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh yang hingga kini belum tercapai. Hal tersebut merupakan implementasi dari apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea pertama yang menjadi pedoman utama Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri dan merumuskan kebijakan luar negeri. Salah satunya adalah berkaitan dengan dukungan Indonesia terhadap upaya mewujudkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih berada dalam kondisi penjajahan. Sudah sejak lama Indonesia menjadi negara yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa lain termasuk diantaranya adalah Palestina. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 berbunyi, *“bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.”*¹¹⁷

Selain Palestina terdapat beberapa negara lain yang juga menjadi prioritas Indonesia dalam memberikan bantuan luar negerinya berupa bantuan teknis.

¹¹⁵ Antara News, *Palestina Prioritas Pertama Bantuan Teknik Indonesia*, 5 Juni 2014, diakses dari: <http://www.antarane.ws.com/berita/437529/palestina-prioritas-penerima-bantuan-teknik-indonesia> pada 18 Juli 2017 pukul 16.37 WIB.

¹¹⁶ Sindonews.com, *Palestina Tetap Jadi Prioritas Polugri Indonesia*, 3 November 2015 diakses dari: <http://international.sindonews.com/read/1058549/40/palestina-tetap-jadi-prioritas-polugri-indonesia-1446549195> pada 18 Juli 2017 pukul 16.50 WIB.

¹¹⁷ Negara Republik Indonesia 1945, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Negara-negara tersebut antara lain Afghanistan, Myanmar, dan Timor Leste.¹¹⁸

Tentunya negara-negara tersebut memiliki kepentingan politis yang lebih tinggi bagi Indonesia. Walaupun terdapat beberapa negara yang menjadi prioritas, Indonesia dalam memberikan bantuan luar negerinya berupa bantuan teknis dapat dikatakan cukup merata ke berbagai kawasan yang ada di penjuru dunia khususnya kawasan yang terdapat cukup banyak negara-negara berkembang di dalamnya.

Tabel 4.1 Data Bantuan Indonesia ke Beberapa Kawasan atau Negara

Kawasan atau Negara	Periode Pelaksanaan Bantuan	Jumlah Bantuan	Jumlah Peserta
Kawasan Asia Tengah, Selatan, dan Barat	2006-2015	92 Program Pembangunan Kapasitas	576 peserta
Kawasan ASEAN	2006-2015	76 Program Pembangunan Kapasitas	Tidak ada data
Kawasan Afrika	2006-2015	93 Program Pembangunan Kapasitas	680 peserta
Palestina	2006-2015	46 Program Pembangunan Kapasitas	1257 peserta
Kawasan Pasifik	1999-2015	94 Program Pembangunan Kapasitas	540 Peserta

(Sumber: Leaflet Indonesia SSTC Profile & Info dari Tim Koordinasi Nasional KSST)¹¹⁹

Peran aktif Indonesia dalam memberikan bantuan luar negeri berupa bantuan teknis kepada negara-negara berkembang tersebut merupakan wujud dari implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu peran tersebut juga menjadi wujud dari komitmen Indonesia pada Konferensi Asia Afrika (KAA) pada tahun 1955 dengan Dasasila Bandung-nya yang menjadi titik awal

¹¹⁸ Koran Sindo, *Loc. Cit.*

¹¹⁹ National Coordination Team on South-South Cooperation and Triangular of Indonesia, *Indonesia Profile SSTC & Info*, 2015 diakses dari: http://ssc.indonesia.org/ksst/indexca35.html?page_id=1208 pada 18 Juli 2017 pukul 18.20 WIB.

pergerakan politik luar negeri Indonesia, khususnya dengan negara-negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Afrika.¹²⁰ Apa yang telah dilakukan Indonesia tersebut telah sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yakni “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.¹²¹

4.1.2 Bantuan Kemanusiaan Indonesia

Selain bantuan luar negeri berupa kerjasama teknis yang bertujuan untuk pembangunan kapasitas, bantuan luar negeri lain yang juga diberikan oleh Indonesia adalah bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan sendiri didefinisikan sebagai bantuan yang diberikan dalam rangka menyelamatkan hidup, meringankan penderitaan, memelihara serta memberikan perlindungan selama atau pasca terjadinya krisis yang diakibatkan oleh manusia, bencana alam, dan juga mencegah serta memperkuat kesiapan untuk menghadapi terjadinya peristiwa serupa.¹²² Oleh karena itu pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia tidak memandang apakah negara yang diberikan termasuk ke dalam kategori negara berkembang atau negara maju. Pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia sendiri diberikan atas dasar prinsip-prinsip perdamaian abadi, nilai kemanusiaan, dan toleransi yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara. Selain prinsip-prinsip tersebut, pemberian bantuan kemanusiaan sebagai salah satu kebijakan luar negeri Indonesia merupakan salah satu bentuk implementasi dari landasan atau prinsip politik luar negeri Indonesia yang

¹²⁰ Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI), *Indonesia dan Kerjasama Selatan-Selatan*, Jakarta: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, 2011, hal. 1.

¹²¹ *Ibid.* hal. 7

¹²² Global Humanitarian Assistance, *Defining Humanitarian Assistance*, *Loc. Cit.*

bebas aktif. Hal tersebut tentunya merujuk pada prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi dasar pelaksanaan setiap kebijakan yang dirumuskan, selain melihat kondisi domestik, Pemerintah Indonesia juga mengedepankan prinsip-prinsip yang tertera di dalam pembukaan UUD 1945.¹²³ Istilah bebas sendiri memiliki makna bahwa Indonesia merupakan negara yang independen tidak terikat dengan ideologi serta aliansi tertentu, sedangkan istilah aktif memiliki makna bahwa Indonesia merupakan negara yang berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia, menjalin persahabatan dan kerjasama dengan berbagai pihak di lingkup internasional, dan reaktif terhadap berbagai peristiwa internasional. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia sendiri dapat dikatakan sebagai perwujudan dari istilah aktif dalam politik luar negeri bebas aktif. Karena pemberian bantuan kemanusiaan merupakan salah satu contoh tindakan yang mencerminkan reaktifnya Indonesia terhadap peristiwa internasional, menjalin persahabatan, dan dijunjungnya nilai-nilai kemanusiaan.

Pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang bagi Indonesia. Sejarah tersebut dimulai pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bantuan kemanusiaan Indonesia pertama kalinya diberikan pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang merupakan salah satu waktu dimana Indonesia berada dalam kondisi yang cukup kritis. Bantuan kemanusiaan tersebut adalah bantuan berupa beras dengan jumlah 500.000 ton dari Indonesia untuk mengatasi bencana kelaparan yang terjadi di India pada tahun 1946. Di saat yang sama Indonesia

¹²³ Atiqah Nur Alami, Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, dalam Ganewati Wuryandari (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 34.

berada dalam kondisi yang kritis dimana Indonesia berada dibawah blokade ekonomi Belanda kesulitan untuk mengadakan hubungan atau kontak dengan pihak luar untuk melakukan upaya diplomasi.¹²⁴ Namun, pilihan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan ditengah-tengah kondisi kritis tersebut malah memberikan dampak positif terhadap upaya Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Melalui pengiriman bantuan beras tersebut akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari India secara *de facto* melalui pernyataan dari Menlu India Jawaharlal Nehru. Nehru mengatakan bahwa dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia, maka diharapkan akan menambah adanya perdamaian dunia, mencegah terjadinya agresi, dan membantu tercapainya kemerdekaan.¹²⁵

Pasca berakhirnya masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan dicituskannya prinsip politik luar negeri bebas aktif pada tahun 1948 oleh Wakil Presiden (Wapres) RI Mohammad Hatta, Indonesia terus berupaya untuk menunjukkan eksistensinya dalam upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan di dunia. Upaya tersebut diantaranya adalah komitmen Indonesia untuk terus mengirimkan Pasukan Garuda sejak tahun 1957 yang merupakan bagian dari misi kemanusiaan PBB. Melalui misi kemanusiaan PBB tersebut Indonesia tidak hanya mengirimkan Pasukan Garuda ke wilayah yang sedang mengalami krisis kemanusiaan, Indonesia juga mengirimkan bantuan dana, logistik, serta pembangunan sarana di wilayah yang sedang dilanda krisis kemanusiaan walaupun jumlahnya tidak begitu besar. Sebagai contoh adalah baru-baru ini di tahun 2017

¹²⁴ Ari Rahmat Hidayat dan Aminuddin Kasdi, Bantuan Beras ke India pada Tahun 1946, *Jurnal Avatara*, Vol. 1, No. 2, 78-83, 2013, hal 80.

¹²⁵ *Ibid.* hal. 81.

tepatnya pada bulan Mei, Pasukan Garuda Satgas Batalyon Komposit TNI Konga XXXV-B/Unamid (United Nations Mission in Darfur)/Indobatt (Indonesian Battalion) 02 di Sudan memberikan bantuan kepada masyarakat Sudan berupa tikar sebanyak 135 buah, 130 Al Qur'an, 500 daster, 30 peci, 100 baju anak-anak dan uang sebanyak 5,000 SDG.¹²⁶ Selain itu bantuan lain yang juga diberikan oleh Indonesia melalui Pasukan Garuda di Sudan adalah pembangunan tiga rumah ibadah Masjid beserta *medical assistance* atau bantuan medis kepada masyarakat disana yang dilanda konflik berkepanjangan dan bencana kelaparan.

Pasca bencana Tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang merenggut korban jiwa mencapai ratusan ribu serta menyita perhatian dunia merupakan tonggak Indonesia dalam membenahi sistem penanganan bencananya secara menyeluruh. Penanganan bencana di Indonesia yang sebelumnya tidak memiliki sistem yang lengkap diperbaharui secara perlahan-lahan seiring dengan bencana yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Pembaharuan sistem tersebut dimulai sejak tahun 2005 dimana Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) No. 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) yang memiliki fungsi harian koordinasi penanggulangan bencana.¹²⁷ Selain itu Indonesia juga mulai menyadari pentingnya upaya pengurangan resiko bencana.

Seiring waktu berjalan kemudian Indonesia menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Presiden (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang BNPB. Empat tahun berjalan setelah ditetapkannya kedua UU

¹²⁶ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), *Pasukan Garuda Bangun Masjid untuk Masyarakat Sudan*, 14 April 2017, diakses dari: <https://tniad.mil.id/2017/04/pasukan-garuda-bangun-masjid-untuk-masyarakat-sudan/> pada 22 Juli 2017 pukul 00.49 WIB.

¹²⁷ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Sejarah, Visi dan Misi BNPB*, diakses dari: <https://www.bnpb.go.id/home/sejarah> pada 22 Juli 2017 pukul 01.08 WIB.



tersebut Indonesia kemudian mendapatkan apresiasi dari banyak negara sebagai negara yang maju dalam upaya penanggulangan bencana.¹²⁸ Apresiasi terhadap Indonesia diberikan setelah negara-negara tersebut melihat adanya peningkatan kompetensi Indonesia yang sangat signifikan dalam hal penanganan bencana.

Kompetensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam upaya penanganan bencana tersebut kemudian menjadi salah satu instrumen penting yang digunakan oleh Indonesia untuk mendukung implementasi dari politik luar negeri bebas aktif. Hal tersebut diwujudkan oleh Indonesia dengan cara menjadi negara yang selalu berinisiatif dan terdepan dalam memberikan bantuan kemanusiaan khususnya dalam upaya penanganan bencana. Sejatinya inisiatif Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan, khususnya pada negara yang sedang dilanda bencana bukanlah hal baru karena di era Orde Baru Indonesia beberapa kali telah mengirimkan bantuan kemanusiaannya untuk menangani bencana yang terjadi berbagai negara. Salah satunya adalah bantuan kemanusiaan berupa sumbangan beras sejumlah 100.000 ton yang diberikan melalui Food and Agriculture Organization (FAO) untuk masyarakat di Benua Afrika yang dilanda bencana kelaparan pada tahun 1984.¹²⁹ Namun, insensitas pemberian bantuan kemanusiaan dalam upaya penanganan bencana tersebut faktanya mulai meningkat setelah Indonesia melakukan pembaharuan sistem penanganan bencana secara menyeluruh pasca bencana Tsunami Aceh tahun 2004.

¹²⁸ Syamsul Maarif, *Penanggulangan Bencana Sebagai Diplomasi Soft Power Indonesia*, dalam June Cahyaningtyas dan Ludiro Madu (ed), *Isu Bencana dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 6.

¹²⁹ Team Dokumentasi Presiden RI, dalam G. Dwipayana dan Nazarudin Sjamsudin (ed.), *Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret 1988*, Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2003, hal. 387.



Dari tahun 2008 hingga 2016 tercatat Indonesia memberikan sejumlah bantuan kemanusiaan dalam upaya penanganan bencana di berbagai negara yang dilanda bencana berskala besar. Bantuan kemanusiaan tersebut diantaranya adalah; bantuan kepada Myanmar pada bencana Topan Nargis di tahun 2008, bantuan kepada Pakistan pada bencana banjir besar di tahun 2009, bantuan kepada Haiti pada bencana gempa bumi pada tahun 2010, bantuan kepada Jepang pada bencana gempa bumi yang diikuti oleh gelombang tsunami pada tahun 2011, bantuan kepada Australia pada bencana banjir di tahun 2011, bantuan kepada Selandia Baru pada bencana banjir di tahun 2011, bantuan kepada Filipina pada bencana Topan Haiyan di tahun 2013, bantuan kepada Vanuatu pada bencana Topan Pam di tahun 2015, dan bantuan kepada Nepal pada bencana gempa bumi di tahun 2015.

Selain bantuan kemanusiaan untuk upaya penanganan bencana, bantuan kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh Indonesia adalah bantuan kemanusiaan untuk penanganan krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh terjadinya konflik. Krisis kemanusiaan di Palestina yang terjadi akibat konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel dan Rakhine, Myanmar yang terjadi akibat konflik antar-etnis antara etnis Muslim Rohingya dan etnis Buddha Rakhine yang hingga saat ini menjadi prioritas dan mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia.¹³⁰ Seperti yang dinyatakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan bahwa pemberian bantuan merupakan sudah seharusnya dilakukan dan menjadi kewajiban bagi Indonesia karena kewajiban tersebut sudah tertuang jelas di dalam

¹³⁰ Republika, *Ini Alasan Indonesia Bela Muslim Rohingya dan Palestina*, 27 September 2017, diakses dari: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/27/owx4t9396-ini-alasan-indonesia-harus-bela-muslim-rohingya-dan-palestina> pada 6 Oktober 2017 pukul 21.00 WIB.

Pancasila dan UUD 1945.¹³¹ Selain dua krisis kemanusiaan tersebut, krisis kemanusiaan lain yang juga mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia adalah krisis kemanusiaan yang terjadi di Ukraina akibat munculnya konflik dengan kelompok pemberontak pro-Rusia pada tahun 2015.¹³²

Upaya pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia baik dalam upaya penanganan bencana maupun krisis kemanusiaan merupakan sebuah langkah yang baik dari Indonesia dalam mengimplementasikan politik luar negerinya yang memiliki prinsip bebas aktif. Karena melalui bantuan kemanusiaan tersebut Indonesia dapat menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat internasional sebagai bangsa yang memiliki kepedulian serta reaktif terhadap permasalahan kemanusiaan yang ada di dunia. Selain itu melalui pemberian bantuan kemanusiaan khususnya dalam upaya penanganan bencana masyarakat internasional pada akhirnya dapat mengetahui bagaimana kompetensi yang dimiliki oleh Indonesia. Hal tersebut tentunya akan berimbas pada citra Indonesia di mata masyarakat internasional.

4.2 Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia dan Fiji

Fiji merupakan salah satu yang terletak di kawasan Pasifik Selatan, dalam gugus Kepulauan Melanesia. Fiji memiliki luas wilayahnya 18.274 km² dan saat ini Fiji merupakan salah satu negara dengan perekonomian paling menonjol

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Kedutaan Besar Ukraina di Republik Indonesia, *Indonesia Berikan Bantuan Kemanusiaan (Dalam Bahasa Indonesia)*, 11 Maret 2015, diakses dari: <http://indonesia.mfa.gov.ua/id/press-center/publications/3567-indonezija-nadaje-gumanitarnu-dopomogu> pada 20 Juli 2017 pukul 19.09 WIB.

dibandingkan dengan negara-negara Pasifik Selatan lainnya.¹³³ Perekonomian di negara ini bertumpu pada sektor pertanian khususnya perkebunan tebu dan sektor pariwisata yang menawarkan keindahan alam di wilayah pesisir pantai. Jumlah penduduk di Fiji tercatat berjumlah 920,938 jiwa pada bulan Juli 2017 yang tersebar di beberapa pulau utama, antara lain Viti Levu, Vanua Levu, Taveuni dan Koro, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya.¹³⁴ Penduduk Fiji terdiri dari penduduk pribumi Fiji yakni etnis Polinesia, India, Cina, Eropa, dan suku-suku Melanesia dari kelompok pulau-pulau yang berada disekitarnya, termasuk Tonga.¹³⁵ Fiji merupakan salah satu wilayah koloni atau negara jajahan Inggris sejak tahun 1874 hingga 1970. Pada tahun 1965 Fiji mendapatkan hak otonomi dari Inggris dan kemudian pada 10 Mei 1970 Fiji berhasil meraih kemerdekaannya dan menjadi negara yang berdaulat secara penuh. Pasca kemerdekaan, Fiji menjadi negara di kawasan Pasifik Selatan yang aktif menjalin kerjasama dan hubungan internasional dengan berbagai negara dan organisasi baik di tingkat regional maupun internasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menjalin hubungan diplomatik dengan Fiji di tahun-tahun awal pasca kemerdekaan negara tersebut. Hubungan antara Indonesia dan Fiji sendiri telah terjalin selama lebih dari empat dekade tepatnya pada tahun 1974 ketika hubungan diplomatik diantara keduanya resmi dibuka dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia

¹³³ Central Intelligence Agency (CIA), *Gov.Library, The World Factbook: Fiji*, 30 Juni 2017, diakses dari: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html> pada 20 Juli 2017 pukul 17.00 WIB.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

dan perwakilan misi diplomatik Fiji di Wellington, Selandia Baru.¹³⁶ Penandatanganan kesepakatan tersebut kemudian diikuti dengan penunjukan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru yang juga merangkap sebagai Duta Besar Indonesia untuk Fiji. Indonesia sendiri merupakan negara di kawasan Asia Tenggara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Fiji. Sebaliknya, Fiji merupakan negara pertama di kawasan Pasifik Selatan yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Oleh karena itu, bagi Indonesia terjalannya hubungan diplomatik dengan Fiji tentunya memiliki peran penting terhadap hubungan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik Selatan secara keseluruhan. Dalam hal ini Fiji dapat dikatakan sebagai “pintu gerbang” bagi Indonesia untuk masuk dan berhubungan lebih jauh dengan kawasan Pasifik Selatan secara keseluruhan.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Fiji yang pertama kali terjalin pada tahun 1974 tersebut menunjukkan perkembangan positif yang memberikan keuntungan bagi kedua negara dari tahun ke tahun. Salah satu peristiwa yang menandai perkembangan positif hubungan antara kedua negara tersebut adalah dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Ibukota Fiji. Pembukaan KBRI Suva, Fiji dilakukan pada 22 Agustus 2002 oleh Departemen Luar Negeri (Deplu) RI.¹³⁷ Kemudian sembilan tahun kemudian tepatnya pada 6 April 2011 Fiji secara khusus membuka Kedutaan Besar (Kedubes) di Jakarta yang juga merangkap sebagai Kedubes Fiji untuk Singapura.¹³⁸ Sebelumnya, tugas

¹³⁶ Government of the Republic of Fiji, *Ministry of Foreign Affairs, Media Release: Fiji Embassy in Indonesia to Open*, *ibid*.

¹³⁷ Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Republik Fiji, *Tentang Perwakilan*, diakses dari: <http://www.Kemenlu.go.id/suva/Pages/CountryProfile.aspx> pada 21 Juli 2017 pukul 18.26 WIB.

¹³⁸ Embassy of the Republic Fiji for Indonesia and Singapore, *Welcome to the Fiji Embassy*, diakses dari: <http://www.fijiembajak.com/en/site/pages/home> pada 21 Juli 2017 pukul 18.39 WIB.

perwakilan diplomatik kepada Indonesia dan Singapura tersebut merupakan tanggung jawab dari Kedubes Fiji untuk Australia di Canberra. Pembukaan Kedubes Fiji di Jakarta merupakan sebuah batu loncatan bagi Indonesia dan Fiji untuk memperluas hubungan kerjasama bilateral diantara keduanya yang didukung oleh kebijakan *Look East Policy* Indonesia.¹³⁹ Kebijakan *Look East Policy* sendiri merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan diri dengan negara-negara mitra yang berada di bagian timur Indonesia khususnya kawasan Pasifik Selatan. Selain itu, kebijakan *Look North Policy* Fiji juga ikut mendukung hubungan kerjasama bilateral diantara kedua negara.¹⁴⁰ Kebijakan *Look North Policy* merupakan kebijakan luar negeri Fiji yang berupaya melihat potensi kemitraan yang menguntungkan dari negara-negara non-barat.¹⁴¹

Fiji merupakan negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Seperti yang dikemukakan oleh Menko Polhukam RI, Fiji merupakan “*Center of Gravity*” dari Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.¹⁴² “*Center of Gravity*” tersebut merujuk pada peran Fiji di kawasan Pasifik Selatan yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap hubungan Indonesia dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan tersebut. Seperti yang diketahui, Fiji merupakan negara yang cukup menonjol perannya dan memiliki pengaruh cukup besar di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu “*Center of*

¹³⁹ Embassy of the Republic Fiji for Indonesia and Singapore, *About Us*, diakses dari: <http://www.fijiembajak.com/in/site/pages/about-us.html> pada 21 Juli 2017 pukul 19.00 WIB.

¹⁴⁰ Government of the Republic Fiji, Ministry of Foreign Affairs, *Press Release: Fiji-Indonesia Sign Development Cooperation Agreement*, 27 Mei 2011, diakses dari: <http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-publications/media-release/350-fiji-indonesia-sign-development-cooperation-agreement> pada 21 Juli 2017 pukul 19.30 WIB.

¹⁴¹ Lowy Institute: *The Interpreter, Fiji: Limits to Look North Policy*, 25 Juni 2010, diakses dari: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/fiji-limits-look-north-policy> pada 21 Juli 2017 pukul 20.20 WIB.

¹⁴² CNN Indonesia, *Luhut Melawat ke Fiji, Perkuat Posisi RI di Pasifik Selatan*, *Ibid.*

Gravity” tersebut juga dapat merujuk pada peran sentral Fiji di kawasan Pasifik Selatan. Fiji merupakan negara yang berperan sentral sebagai *hub* atau penghubung negara-negara di kawasan Pasifik Selatan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan solidaritas sosial budaya kawasan.¹⁴³

Peran penting Fiji lainnya bagi Indonesia adalah Fiji menjadi negara mitra dagang Indonesia terbesar di kawasan Pasifik Selatan. Peran tersebut disokong oleh nilai perdagangan yang cukup besar diantara kedua negara yang mencapai US \$25,57 juta dengan posisi surplus berada pada pihak Indonesia.¹⁴⁴ Nilai perdagangan tersebut didominasi oleh ekspor Indonesia produk-produk Indonesia berupa produk makanan dan minuman, produk tekstil atau garmen, alat-alat pertanian dan perikanan, baja ringan, kertas, dan karoseri bus.¹⁴⁵ Selain menjadi mitra penting Indonesia di sektor ekonomi, Fiji juga merupakan salah satu mitra penting dalam kerjasama demokratisasi dan keamanan serta stabilitas kawasan.¹⁴⁶ Selain itu kedua negara juga sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama ekonomi dengan mendorong intensifikasi kerjasama *business to business*.¹⁴⁷

Nilai perdagangan yang cukup besar dan meningkatnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Fiji merupakan salah satu perwujudan komitmen Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Deelopment Cooperation yang ditandatangani tahun 2011 oleh Menlu RI Marty Natalegawa dan Menlu Fiji Ratu Inoke Kubuabola di Bali, 27 Mei 2011. Perjanjian

¹⁴³ Greg Fry, Sandra Tarte, *Ibid.*

¹⁴⁴ Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Fiji, *Pertemuan JMC Pertama Indonesia-Fiji 2015, Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi, ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

yang kemudian menghasilkan 14 dokumen perjanjian bilateral tersebut merupakan payung kerjasama antara Indonesia dan Fiji dalam berbagai bidang yang mencakup berbagai sektor, antara lain pertanian, perikanan, kehutanan, pendidikan, seni budaya, perdagangan dan investasi, kerjasama teknis, pariwisata, transportasi, hukum, kerjasama dalam mengembangkan kesepahaman di antara masyarakat kedua negara.¹⁴⁸

Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Fiji dibawah payung perjanjian tersebut yang kemudian akan menghasilkan kerjasama prioritas di berbagai sektor. Kerjasama prioritas tersebut merupakan kerjasama yang menjadi prioritas untuk segera diimplementasikan oleh kedua negara. Karena apa yang ada di dalam kerjasama prioritas tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi kedua negara yang harus segera diwujudkan. Isi dari program kerjasama prioritas antara Indonesia dan Fiji, antara lain *engagement* bagi dukungan Fiji terhadap Indonesia, kerjasama teknis dalam bidang demokratisasi dan *good governance* dalam pemerintahan kedua negara, serta pembangunan kapasitas, pertanian, perikanan, dan kelautan, serta adanya peningkatan hubungan *people to people* antara penduduk Melanesia di Fiji, salah satunya melalui melalui beasiswa pendidikan tinggi.¹⁴⁹

Komitmen Indonesia terhadap Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation selain diwujudkan dengan peningkatan kerjasama juga diwujudkan melalui

¹⁴⁸ Moh. Hery Saripuddin, dkk. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik & Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia dalam Diplomasi Indonesia*. Jakarta: P3K2 Aspasaf, 2013, hal. 34.

¹⁴⁹ Negara Republik Indonesia, 2011, *Agreement between the Republic of Indonesia and The Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation*.

beberapa pemberian bantuan luar negeri kepada Fiji utamanya adalah bantuan teknis untuk pembangunan kapasitas. Bantuan teknis tersebut didominasi oleh bantuan di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan yang merupakan kompetensi unggulan dari Indonesia. Di sektor pertanian, bantuan teknis yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji, salah satunya adalah dibukanya program magang petani oleh Indonesia melalui Kemlu RI yang bekerjasama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang juga diperuntukkan untuk petani dari negara-negara berkembang lainnya.¹⁵⁰ Selain itu, bantuan teknis lainnya di sektor pertanian yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji adalah bantuan berupa pelatihan, lokakarya, seminar, pengiriman alat-alat dan mesin pertanian seperti traktor, alat pemanen, dan alat pengolah hasil pertanian, serta pengiriman bibit, pupuk, serta obat-obatan pertanian lainnya.

Di sektor perikanan dan kelautan, bantuan teknis yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji tidak berbeda jauh dengan sektor pertanian. Fiji juga memperoleh bantuan berupa pelatihan, lokakarya, dan seminar. Sebagai contoh adalah dilaksanakannya International Training Program on Freshwater Aquaculture for Asian, Pacific, and African Countries, dan International Training Program on Fisheries Processing Product for MSG Countries/Members pada Mei 2012 yang dilakukan oleh Kemlu RI bekerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan tujuan memberikan pengetahuan terkait dengan peningkatan kualitas produksi komoditas perikanan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan di

¹⁵⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), *Program Magang bagi Petani Fiji untuk Memperluas dan Meningkatkan Kerjasama RI-Fiji di Bidang Pertanian*, 7 November 2013, diakses dari: <http://www.Kemenlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-magang-bagi-Petani-Fiji-untuk-memperluas-dan-meningkatkan-kerjasama-RI-Fiji-bidang-pertanian.aspx> pada 21 Juli 2017 pukul 16.09 WIB.

bidang perikanan, dan peningkatan pendapatan masyarakat di negara-negara yang mengikuti pelatihan tersebut.¹⁵¹ Bantuan lain yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji di sektor perikanan dan kelautan adalah Scholarship Program on Fisheries and Marine Human Resource Development for MSG Member atau beasiswa perikanan dan kelautan untuk negara anggota MSG pada tahun 2014. Fiji bersama negara-negara anggota MSG lainnya yang juga mendapatkan beasiswa tersebut mendapatkan materi dari Indonesia terkait dengan teknik penangkapan, pengolahan hasil perikanan, dan budidaya serta cara mengoperasikan mesin kapal dan mesin pengolahan hasil perikanan dan kelautan.¹⁵² Selain bantuan teknis berupa pelatihan, lokakarya, dan seminar yang dijelaskan diatas, bantuan lainnya yang pernah diberikan oleh Indonesia kepada Fiji diantaranya adalah Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Rumput Laut di tahun 2012 yang dilanjutkan dengan pendirian Pusat Rumput Laut di Suva, Fiji, Pelatihan Pengolahan Kerupuk Ikan kepada Perempuan di Fiji pada tahun 2014 yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian bantuan mesin pengolah kerupuk ikan oleh Indonesia.¹⁵³

Diluar sektor pertanian, perikanan, dan kelautan terdapat sektor lain di Fiji yang mendapatkan bantuan dari Indonesia. Diantaranya adalah sektor keamanan dimana pada tahun 2014 Indonesia memberikan sumbangan dana sejumlah US\$

¹⁵¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), *Menteri KKP Akan Buka Program Pelatihan Bidang Perikanan dari Pemerintah Indonesia untuk Negara-Negara di Asia, Pasifik, dan Afrika serta Anggota MSG*, 4 Mei 2012, diakses dari: <http://www.Kemenlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Menteri-KKP-Akan-Buka-Program-Pelatihan-Bidang-Perikanan-dari-Pemerintah-Indonesia-untuk-Negara-Nega.aspx> pada 21 Juli 2017 pukul 16.55 WIB.

¹⁵² Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI), *Kerjasama Teknik, RI Berikan Asistensi Pada MSG*, 16 Desember 2014, diakses dari: <http://Kemenlu.go.id/Pages/NewsKemenlu.aspx?IDP=506&l=id> pada 21 Juli 2017 pukul 17.05 WIB.

¹⁵³ Antaranews.com, *RI-Fiji Perkuat Kerjasama Kelautan dan Perikanan*, 19 Juni 2014, diakses dari: <http://www.antaranews.com/print/439900/ri-fiji-perkuat-kerjasama-kelautan-dan-perikanan> pada 21 Juli 2017 pukul 17.18 WIB.

500.000 untuk keperluan pembangunan Akademi Kepolisian Regional Kawasan Melanesia di Suva, Fiji.¹⁵⁴ Walaupun bantuan tersebut tidak ditujukan langsung kepada Fiji, yakni kepada kawasan regional Pasifik Selatan dibawah naungan MSG, tetapi Fiji merupakan negara yang berperan penting menginisiasi pendirian akademi kepolisian tersebut. Selain itu di sektor pendidikan Fiji merupakan salah satu negara penerima beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia seperti Beasiswa Darmasiswa, Beasiswa Seni dan Budaya (BSBI), Beasiswa Pasca Sarjana (Strata-2) Kemitraan Negara Berkembang (KNB) kepada negara-negara Kawasan Pasifik. Pemberian beasiswa tersebut telah menghasilkan alumni dari Fiji yang sebagian diantaranya aktif mempelajari bahasa, serta seni dan kebudayaan Indonesia.

4.3 Bencana Topan Winston di Fiji pada Tahun 2016

Bencana Topan Winston merupakan salah satu bencana terbesar yang pernah melanda Fiji dan kawasan Pasifik Selatan secara keseluruhan. Bencana Topan Winston merupakan bencana topan tropis yang dikategorikan ke dalam topan kategori lima yang mencapai puncaknya pada 20 dan 21 Februari 2016 dengan kecepatan angin tertinggi mencapai angka 325 km/h.¹⁵⁵ Bencana tersebut tercipta dari munculnya pusaran angin dengan kecepatan tinggi yang bergerak dari arah timur ke arah barat dan menerjang sebagian besar wilayah Fiji yang terbagi ke dalam empat divisi, yakni Divisi Tengah, Divisi Utara, Divisi Timur, dan Divisi Barat hingga porak-poranda.¹⁵⁶ Kelompok Kepulauan Lau dan Lomaviti termasuk

¹⁵⁴ Radio New Zealand, *Indonesia helps fund MSG Police Academy*, 10 Januari 2014, diakses dari: <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/233013/indonesia-helps-fund-msg-police-academy> pada 21 Juli 2017 pukul 18.12 WIB.

¹⁵⁵ United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), 2016, *Fiji: Severe Tropical Cyclone Winston Situation Report No. 1 (as of 21 February 2016)*, Loc. Cit.

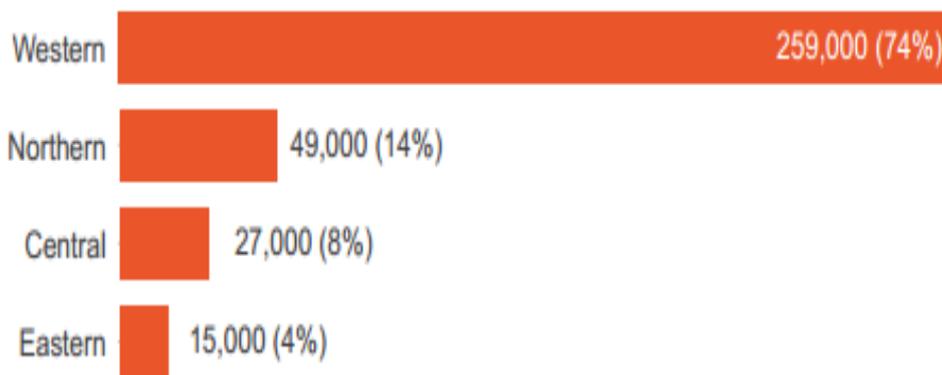
¹⁵⁶ United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), *Fiji Flash Appeal Tropical Cyclone Winston*, Loc. Cit.

Pulau Koro di Divisi Timur, Rakiraki dan Tavua di Divisi Barat, dan Takeuni dan Cakaudrove di Divisi Utara menjadi wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana Topan Winston di Fiji.¹⁵⁷ Tercatat, 44 orang tewas dan 40% dari jumlah total populasi Fiji yang terdiri dari lebih dari 350.000 orang (170.000 perempuan dan 180.000 laki-laki) termasuk diantaranya 120.000 anak-anak (58.000 perempuan dan 62.000 laki-laki) dan 3.100 penyandang disabilitas terdampak bencana Topan Winston ini.¹⁵⁸

Gambar 4.1 Grafik Populasi di Masing-Masing Divisi yang Terdampak

Bencana Topan Winston di Fiji

People Affected by Division



(Sumber: United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), *Fiji Flash Appeal Tropical Cyclone Winston*)¹⁵⁹

Sebagian dari populasi Fiji yang terdampak bencana Topan Winston terpaksa mengungsi akibat tempat tinggal mereka mengalami kerusakan.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Fiji, diperkirakan 24.000 rumah di Fiji mengalami kerusakan dengan berbagai tingkatan dari kerusakan

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

ringan hingga berat.¹⁶⁰ Selain rumah-rumah penduduk, bencana Topan Winston yang melanda Fiji juga ikut memberikan dampak kerusakan terhadap berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang tersebar di empat divisi. Termasuk diantaranya adalah jaringan komunikasi, transportasi, air bersih, pelayanan kesehatan, dan suplai energi yang memiliki peran vital khususnya dalam tahap penanganan pasca bencana. Tercatat lebih dari 250.000 orang tidak mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang memadai pasca bencana Topan Winston di Fiji.¹⁶¹

Hal tersebut tentunya berpengaruh kepada kondisi kesehatan masyarakat Fiji yang kemungkinan besar dapat dengan mudah terkena wabah penyakit akibat kondisi yang buruk tersebut.

Pemerintah Fiji sendiri menaksir kerugian finansial yang harus ditanggung akibat bencana Topan Winston mencapai angka US \$470 atau mungkin lebih mengingat dampak kerusakan yang begitu besar.¹⁶² Angka tersebut berhasil menjadikan bencana Topan Winston sebagai bencana dengan dampak kerugian finansial terbesar di kawasan Pasifik Selatan sepanjang sejarah. Pasca bencana Topan Winston, Pemerintah Fiji kemudian memutuskan untuk menetapkan masa tanggap darurat selama 30 hari atau satu bulan sejak tanggal 21 Februari 2016.¹⁶³

Penetapan masa tanggap darurat yang cukup panjang tersebut merupakan pertimbangan dari Pemerintah Fiji atas kondisi pasca bencana yang cukup parah di berbagai wilayah yang tersebar di Fiji.

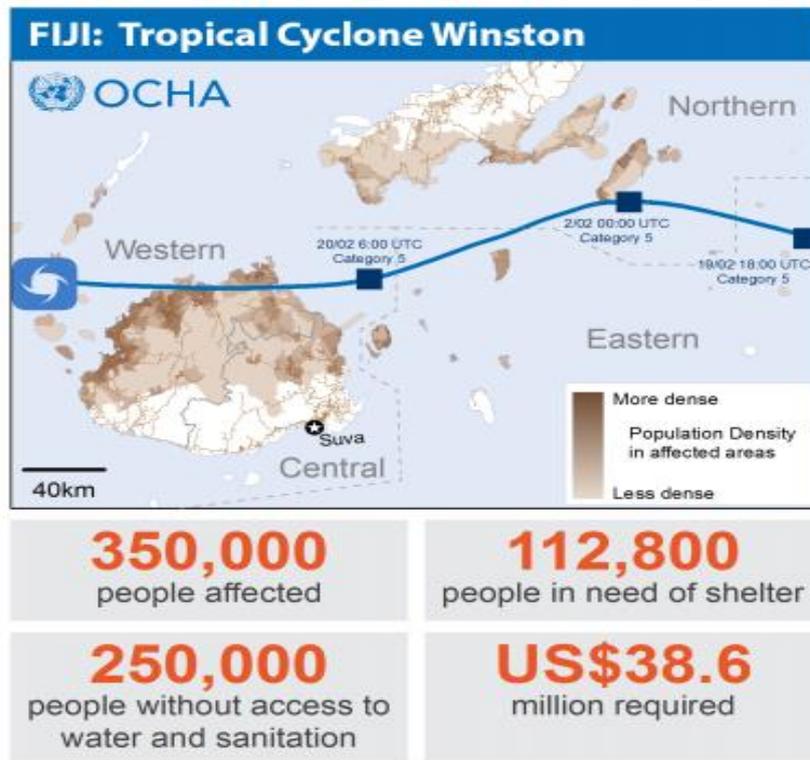
¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² International Business Time, *Loc. Cit.*

¹⁶³ Radio Australia, Australia Broadcasting Corporation (ABC), *Badai Tropis Winston Porakporandakan Fiji*, 22 Februari 2016, diakses dari: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2016-02-22/badai-tropis-winston-porakporandakan-fiji/1550616> pada 28 Juli 2017 pukul 03.03 WIB.

Gambar 4.2 Infografis Bencana Topan Winston di Fiji



(Sumber: United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), *Fiji Flash Appeal Tropical Cyclone Winston*)¹⁶⁴

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting yang terdampak cukup parah akibat bencana Topan Winston. 65% dari total faktor produksi di sektor pertanian Fiji terdampak bencana Topan Winston.¹⁶⁵ Kementerian Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional sendiri mencatat kerugian di sektor pertanian yang diakibatkan oleh bencana Topan Winston mencapai angka US\$ 208.3 juta.¹⁶⁶ Angka kerugian tersebut mencakup

¹⁶⁴ United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), *Fiji Flash Appeal Tropical Cyclone Winston*, Loc. Cit.

¹⁶⁵ Fiji TV, *Highest Level of Production Losses Expected in Agriculture*, 3 Agustus 2016, diakses dari: <http://fijione.tv/highest-level-of-production-losses-expected-in-agriculture/> pada 28 Juli 2017 pukul 08.01 WIB.

¹⁶⁶ Ministry of Agriculture Fiji, *\$208.3 Million of damages recorded for Agriculture sector*, diakses dari: <http://www.agriculture.gov.fj/index.php/newsroom/press-releases?id=408> pada 28 Juli 2017 pukul 09.07 WIB.

kerusakan lahan pertanian, infrastruktur pertanian, dan peternakan, namun belum termasuk sektor perkebunan tebu yang juga ikut terdampak bencana Topan Winston.¹⁶⁷ Kerugian akibat bencana Topan Winston tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Fiji secara keseluruhan.

Stok pangan di Fiji terganggu dan sebagian besar masyarakat Fiji yang kehidupannya bergantung pada sektor pertanian kehilangan mata pencahariannya.

Hal tersebut tentunya ikut memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat Fiji pasca bencana Topan Winston baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sektor pariwisata yang menjadi tumpuan ekonomi Fiji juga merasakan dampak akibat dari bencana Topan Winston. Sektor pariwisata tersebut mengandalkan keindahan alam yang dimiliki oleh Fiji untuk menarik minat wisatawan asing dari berbagai penjuru dunia. Turis-turis asing yang sedang berwisata di Fiji memilih untuk menghentikan kegiatan wisatanya dan pulang kembali ke negaranya.¹⁶⁸ Selain itu sejumlah negara juga memberikan himbauan kepada warga negaranya untuk menunda atau membatalkan perjalanan wisatanya ke Fiji pasca bencana Topan Winston. Salah satunya adalah Australia yang mengeluarkan *travel warning* melalui Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) kepada warga negaranya yang akan melakukan perjalanan wisata atau berkunjung ke Fiji.¹⁶⁹ Fiji sendiri merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat Australia untuk menghabiskan waktu liburannya. Kepulangan turis asing di Fiji yang

¹⁶⁷ *Ibid.*

¹⁶⁸ Media Indonesia, *Turis Asing Tinggalkan Fiji*, 23 Februari 2016, diakses dari: <http://www.mediaindonesia.com/news/read/30106/turis-asing-tinggalkan-fiji/2016-02-23> pada 28 Juli 2017 pukul 10.00 WIB.

¹⁶⁹ News.com.au, *Australians stuck in Fiji after Cyclone Winston*, 22 Februari 2016, diakses dari: <http://www.news.com.au/travel/travel-updates/warnings/australians-stuck-in-fiji-after-cyclone-winston/news-story/66ea1078ce05282b43adab702b2cf477> pada 28 Juli 2016 pukul 10.30 WIB.

kemudian diikuti oleh munculnya himbauan atau travel warning tersebut tentunya berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh Fiji dari sektor pariwisata yang menjadi tumpuan ekonominya. Selain itu sarana dan prasarana yang menunjang sektor pariwisata di Fiji juga banyak yang rusak akibat bencana Topan Winston. Termasuk diantaranya adalah hotel, *resort* dan penginapan yang tersebar di wilayah Fiji, sehingga pelayanan bagi para turis terganggu atau dihentikan sama sekali.

Bencana Topan Winston juga ikut berdampak kepada anak-anak yang tersebar di berbagai wilayah di Fiji. Selain harus mengungsi dan terancam dengan berbagai permasalahan kesehatan seperti wabah penyakit, sebagian dari mereka juga terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kerusakan infrastruktur pendidikan. Tercatat tujuh persen dari total sekolah yang ada Fiji hancur total atau rata dengan tanah dan 20% sekolah yang ada di Fiji mengalami kerusakan akibat bencana Topan Winston dan jumlah tersebut belum termasuk fasilitas pendidikan usia dini yang juga ikut terdampak.¹⁷⁰

4.4 Bantuan Kemanusiaan Indonesia Kepada Fiji Pasca Bencana Topan Winston pada Tahun 2016

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston yang meluluh lantakkan sebagian besar wilayah negara kepulauan tersebut pada 20 dan 21 Februari 2016. Keikutsertaan tersebut ditunjukkan oleh Indonesia melalui pemberian bantuan kemanusiaan dengan jumlah total mencapai US\$5 juta yang terdiri dari bantuan dana *cash for work* sejumlah US\$1 juta, US\$ 2 juta *in kind* dan US\$ 2 juta lainnya

¹⁷⁰ United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), *Fiji Flash Appeal Tropical Cyclone Winston, Loc. Cit.*

berupa keperluan logistik yang dibutuhkan untuk keperluan pasukan Zeni Bangunan dari TNI AD (Satgas Kizi) yang berjumlah 100 orang.¹⁷¹ Pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan instruksi dari Presdien RI Joko Widodo. Sebelum bantuan kemanusiaan tersebut diberikan kepada Fiji, Pemerintah Indonesia melalui Menlu RI Retno Marsudi terlebih dahulu menghubungi pihak Fiji yang dalam hal ini adalah Menlu Fiji Ratu Inoke Kubuabola untuk mengkonfirmasi bantuan apakah yang dibutuhkan oleh Fiji pasca bencana Topan Winston.¹⁷² Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menlu A.M. Fachir upaya konfirmasi bantuan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut bertujuan agar bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Fiji efektif dan tepat sasaran.¹⁷³

Bantuan kemanusiaan tersebut dikirimkan oleh Indonesia secara simbolis melalui kunjungan kerja Menko Polhukam RI, Luhut Binsar Pandjaitan beserta ke Fiji pada 30 Maret 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kerja ke Papua Nugini. Dalam kunjungan kerja yang diikuti oleh pemberian bantuan kemanusiaan tersebut Menko Polhukam RI didampingi oleh beberapa pejabat tinggi di tingkat pusat hingga daerah diantaranya adalah Staf Khusus Menlu RI untuk Isu-Isu Strategis Djauhari Oratmangun, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Wakil Gubernur Provinsi Papua Klemen Tinal, Gubernur Provinsi Maluku Said Assagaf, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu

¹⁷¹ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (KeMenko Polhukam RI), *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kepedutaan Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri*, 2016, hal. 10, diunduh dari: https://polkam.go.id/konten/unggah/2017/07/Lakin_Deputi_II_Tahun_2016.pdf pada 20 Juli 2017 pukul 16.44 WIB.

¹⁷² Republika, *Indonesia Tunggu Konfirmasi Kebutuhan Bantuan untuk Fiji*, 23 Februari 2016, diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/02/23/o2zj0a366-indonesia-tunggu-konfirmasi-kebutuhan-bantuan-untuk-fiji> pada 20 Juli 2017 pukul 17.00 WIB.

¹⁷³ *Ibid.*

dan perwakilan dari BNPB.¹⁷⁴ Selain itu Dubes RI untuk Fiji Gary R.M. Jusuf juga ikut mendampingi kunjungan delegasi dari Menko Polhukam tersebut di Fiji.

Agenda kunjungan kenegaraan yang diikuti oleh pemberian bantuan kemanusiaan ke Fiji tersebut dimulai dengan pertemuan Menko Polhukam beserta rombongan delegasi Indonesia dan PM Fiji Josaia Voreqe Bainimarama di kantor Perdana Menteri Fiji di Suva, ibukota Fiji. Pada pertemuan tersebut Menko Polhukam RI menyerahkan bantuan secara simbolis kepada PM Fiji dan turut menyampaikan simpati dan belasungkawa dari Pemerintah beserta rakyat Indonesia sebagai negara sahabat atas terjadinya bencana berskala besar tersebut.¹⁷⁵ Pemerintah Indonesia dalam hal ini berupaya untuk memperlihatkan bentuk solidaritas sebagai negara sahabat kepada Fiji.

Selanjutnya, Menko Polhukam RI beserta delegasi melanjutkan kunjungannya ke kantor Kementerian Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji. Pada kunjungan tersebut Menko Polhukam beserta delegasi bertemu dengan Menteri Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji, Inia Seruiratu. Pada pertemuan dengan Menteri Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta Manajemen Bencana Nasional Fiji, Pada pertemuan tersebut, Menko Polhukam RI menawarkan penguatan kerja sama di sejumlah bidang yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan tantangan dan potensi kedua negara seperti pertanian, mitigasi bencana, dan perikanan.¹⁷⁶ Kunjungan ke kantor Menteri Pertanian, Pembangunan Wilayah Pedesaan dan Kelautan serta

¹⁷⁴ CNN Indonesia, *Tiba di Fiji, Rombongan Luhut Bawa Bantuan Senilai US\$5 Juta, Loc. Cit.*

¹⁷⁵ Republika, *Luhut Serahkan Bantuan Indonesia Untuk Fiji, Loc. Cit.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

Manajemen Bencana Nasional Fiji tersebut merupakan akhir dari rangkaian agenda kunjungan kenegaraan ke Fiji yang dilakukan oleh Menko Polhukam RI beserta delegasi lainnya sebelum meninggalkan Fiji dan bertolak ke Port Moresby, ibukota Papua Nugini untuk agenda kunjungan kerja berikutnya.

Pada kesempatan kunjungan yang sama, salah satu delegasi Indonesia, yakni Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik juga melakukan penandatanganan MoU antara KPU RI dengan FEO atau Kantor Pemilu Fiji dalam manajemen pemilihan umum.¹⁷⁷ Tujuan kedua negara dari penandatanganan MoU tersebut adalah mengembangkan kerjasama melalui pertukaran informasi dan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang manajemen pemilu.¹⁷⁸ Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara dalam bidang manajemen pemilu tersebut meliputi pertukaran ilmu pengetahuan dan pengalaman melalui program pelatihan dan pendidikan, penyelenggaraan konferensi dengan topik yang sesuai, dan kerjasama lainnya.¹⁷⁹

Selain dari pihak Kemenko Polhukam RI, Kemenlu RI, dan Markas Besar (Mabes) TNI juga ikut menindaklanjuti instruksi pemberian bantuan kemanusiaan pasca bencana Topan Winston kepada Fiji. Pihak Mabes TNI ikut mengirimkan tim delegasi yang bertugas melaksanakan pendataan asesmen dan inisiasi terkait bentuk proyek bantuan yang akan dilaksanakan oleh Indonesia.¹⁸⁰ Tim delegasi dari

¹⁷⁷ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (KeMenko Polhukam RI), *Menko Polhukam Bertemu Perdana Menteri Fiji dan Menyampaikan Bantuan Pemerintah Indonesia*, Loc. Cit.

¹⁷⁸ Republik Indonesia, Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kantor Pemilihan Fiji Tentang Kerja Sama dalam Manajemen Pemilihan Umum, Pasal 1.

¹⁷⁹ Republik Indonesia, Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kantor Pemilihan Fiji Tentang Kerja Sama dalam Manajemen Pemilihan Umum, Pasal 2.

¹⁸⁰ Maritim News, Jalankan Misi Kemanusiaan, Letkol Laut (P) Salim akan Pimpin Delegasi RI Berangkat Menuju Fiji, 25 Maret 2016, diakses dari: <http://maritimnews.com/jalankan-misi->

Mabes TNI tersebut berangkat ke Fiji dibawah pimpinan Letnan Kolonel (Letkol) Laut (P) Salim. Selanjutnya, tim delegasi tersebut akan melaksanakan tugas pendataan dan survey awal tentang kondisi geografis daerah pasca bencana serta kebutuhan-kebutuhan yang digunakan oleh tim untuk memperlancar dan mengefektifkan proses bantuan kemanusiaan yang akan diberikan kemudian.¹⁸¹

Setelah semua proses tersebut telah terlewati barulah pihak Mabes TNI melakukan Operasi Bantuan Kemanusiaan di Fiji. Operasi Bantuan Kemanusiaan yang dilakukan oleh Mabes TNI di Fiji tersebut merupakan salah satu bagian dari tugas utama TNI dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang merupakan wujud komitmen Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia wajib untuk saling membantu satu sama lain.¹⁸²

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Indonesia selain memberikan bantuan dalam bentuk dana dan logistik juga mengirimkan satu kompi pasukan Zeni Bangunan TNI AD yakni Satgas Kizi yang bertugas melakukan Operasi Bantuan Kemanusiaan Fiji. Satu kompi pasukan Zeni Bangunan TNI AD tersebut terdiri dari 100 orang yang berasal Yonzipur (Batalyon Zeni Tempur) 9/1 Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) Lang-Lang Bhuwana dibawah pimpinan Komandan Batalyon Zeni Tempur 9/1 Kostrad Mayor Czi Abdillah Arif sebagai Dansatgas (Komandan Satuan Tugas).¹⁸³ Yonzipur-9/1

kemanusiaan-letkol-laut-p-salim-akan-pimpin-delegasi-ri-berangkat-menuju-fiji/ pada 21 Juli 2017 pukul 11.30 WIB.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), *Satgas Kizipur 9 Kostrad Operasi Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Topan Winston di Fiji*, 2 Juni 2016, diakses dari: <https://tniad.mil.id/2016/06/satgas-kizipur-9-kostrad-operasi-bantuan-kemanusiaan-bencana-alam-topan-winston-di-fiji-penkostrad-rabu-2-juni-2016-satgas-kizi-tni-operasi-bantuan-kemanusiaan-fiji-berjumlah-100-orang-dengan/> pada 21 Juli 2017 pukul 12.23 WIB.

Kostrad Lang-Lang Bhuwana merupakan satuan zen di bawah kendali Kostrad Divisi-1 dan bermarkas di Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat.

Melalui Operasi Bantuan Kemanusiaan Fiji, Satgas Kizi secara khusus ditugaskan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan

Queen Victoria School (QVS) yang terletak di Matavatu, Tailevu Province, Fiji.

QVS merupakan salah satu sekolah yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi masyarakat Fiji karena telah melahirkan cukup banyak tokoh-tokoh penting di

negara tersebut. QVS sendiri didirikan pada tahun 1906 dan terdiri dari beberapa

bangunan, antara lain bangunan *main hall*, ruang kelas, laboratorium, asrama siswa,

rumah kepala sekolah dan guru, dapur, ruang makan, dan gereja yang berada di

dalam satu kompleks dengan jumlah total 94 bangunan.¹⁸⁴ Akibat bencana Topan

Winston, bangunan sekolah tersebut kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan

dan ratusan siswa juga terpaksa mengungsi dari asramanya yang rusak. Sebagian

siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing dan sebagian lagi diungsikan ke

ruangan aula yang digunakan untuk kegiatan hiburan.¹⁸⁵ Keputusan tersebut

diambil oleh pihak sekolah untuk menghindari siswanya terjangkit wabah penyakit,

mengingat air yang ada di sekolah tersebut telah terkontaminasi.¹⁸⁶

Operasi Bantuan Kemanusiaan Fiji oleh Satgas Kizi sendiri terbagi menjadi

dua tahap pelaksanaan. Pada tahap pertama yang dimulai pada 2 Mei 2016, Satgas

Kizi yang berjumlah 30 orang melakukan pekerjaan rehabilitasi Gereja QVS yang

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Fiji Sun Online, *26 Staff Quarters, Eight Classrooms Damaged*, 22 Februari 2016, diakses dari: <http://fijisun.com.fj/2016/02/22/26-staff-quarters-eight-classrooms-damaged/> pada 22 Juli 2017 pukul 08.43 WIB.

¹⁸⁶ *Ibid.*

berhasil diselesaikan pada 30 Mei 2016 atau kurang dari satu bulan.¹⁸⁷ Kemudian pada tahap kedua yang dimulai pada 2 Juni 2016 hingga 29 Agustus 2016 atau kurang dari dua bulan, Satgas Kizi yang berjumlah 100 orang melakukan pembangunan kembali atau rekonstruksi bangunan sekolah QVS beserta asrama siswa yang juga mengalami kerusakan akibat bencana Topan Winston.¹⁸⁸ Waktu penyelesaian tahap pertama dan tahap kedua tersebut telah sesuai dengan target yang telah disusun sebelumnya oleh Satgas Kizi yakni tiga bulan. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Satgas Kizi tersebut dilakukan siang dan malam non-stop. Logistik yang digunakan oleh Satgas Kizi untuk keperluan rekonstruksi bangunan sekolah QVS sendiri keseluruhannya merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagian besar logistik tersebut langsung didatangkan dari Indonesia bersama dengan prajurit yang tergabung ke dalam Satgas Kizi. Namun, beberapa logistik seperti material dan peralatan besar yang digunakan untuk merekonstruksi bangunan sekolah QVS dipasok dari Fiji atas dasar efisiensi.

Pemberangkatan Satgas Kizi sendiri untuk Operasi Bantuan Kemanusiaan dibagi menjadi tiga kloter pemberangkatan. Kloter pertama diberangkatkan pada 24 April 2016 sejumlah tiga orang sebagai tim aju yang dipimpin oleh Perwira Konstruksi dengan tugas utama melaksanakan persiapan dan koordinasi dengan pihak setempat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan akomodasi Satgas Kizi.¹⁸⁹ Kloter kedua diberangkatkan pada 1 Mei 2016 dengan jumlah 27 orang yang dipimpin oleh Dansatgas dengan tugas utama melaksanakan pekerjaan

¹⁸⁷ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), *Satgas Kizipur 9 Kostrad Operasi Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Topan Winston di Fiji*, Loc. Cit.

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

awal yaitu rehabilitasi bangunan gereja QVS.¹⁹⁰ Sedangkan kloter terakhir atau kloter ketiga sejumlah 70 orang dipimpin oleh Wakil Komandan Satuan Tugas (Wadansatgas) berangkat tanggal 1 Juni 2016 bertugas melaksanakan rekonstruksi sekolah dan asrama siswa QVS bersama dengan kloter kedua.¹⁹¹

Di sela-sela Operasi Bantuan Kemanusiaan Fiji, Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI Laksamana Pertama (Laksma) TNI Harjo Susmoro meninjau langsung pekerjaan yang telah dilakukan oleh Satgas Kizi di Fiji.¹⁹² Di kesempatan tersebut Waasops Panglima TNI melakukan pertemuan dengan Panglima the Republic of Fiji Military Forces (RFMF) atau Angkatan Militer Republik Fiji, Rear Admiral Villiame Naupoto. Panglima RFMF di tengah-tengah pertemuan tersebut mengungkapkan rasa bangga dan terimakasihnya kepada Pemerintah Indonesia atas bantuan yang telah diberikan khususnya bantuan rekonstruksi bangunan sekolah QVS oleh Satgas Kizi pasca bencana Topan Winston. Menurut Waasops Panglima TNI, pemerintah dan masyarakat Fiji sangat mengapresiasi kinerja dari Satgas Kizi dalam melakukan rekonstruksi sekolah QVS. Selain dapat menyelesaikan rekonstruksi dalam waktu yang cukup singkat, Satgas Kizi juga mampu melakukan adaptasi dengan masyarakat lokal di Fiji. Adaptasi tersebut dilakukan oleh Satgas Kizi melalui proses pembinaan teritorial prajurit yang dilakukan sebelum proses rekonstruksi hingga pada saat proses rekonstruksi berlangsung. Diterimanya Satgas Kizi dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat Fiji memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia secara

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), *Satgas Kizi TNI terima Apresiasi dari Panglima Militer Fiji*, 29 Agustus 2016, diakses dari: <https://tniad.mil.id/2016/08/satgas-kizi-tni-terima-apresiasi-dari-panglima-militer-fiji/> pada 22 Juli 2017 pukul 12.24 WIB.

keseluruhan. Keuntungan tersebut berkaitan dengan meningkatnya citra positif Indonesia di tengah-tengah masyarakat Fiji dan kawasan Pasifik Selatan. Terkait citra Indonesia yang dideskreditkan oleh gerakan separatis Papua Barat, yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Fiji dan negara kawasan Pasifik Selatan lainnya, Waasops Panglima TNI menegaskan bahwa kedatangan Satgas Kizi untuk membantu merenovasi bangunan yang hancur akibat bencana Topan Winston, masyarakat Fiji yang selama ini telah dibohongi oleh pihak OPM, kemudian menyadari bahwa selama ini OPM memberikan informasi yang tidak benar mengenai Indonesia.¹⁹³ OPM sendiri bersama dengan ULMWP merupakan dua gerakan separatis yang sama-sama menuntut kemerdekaan Papua Barat yang saat ini menjadi wilayah kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu hal tersebut tentunya menjadi suatu ancaman yang cukup berbahaya bagi Indonesia.

Berkaitan dengan gerakan separatis di Papua Barat, menurut Menko Polhukam RI salah satu tujuan dari agenda kunjungan kerja ke Fiji dan Papua Nugini yang disertai dengan pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston ini juga bertujuan untuk menegaskan kepada masyarakat di kawasan Pasifik Selatan khususnya di Fiji dan Papua Nugini bahwa wilayah Papua Barat merupakan bagian dari Indonesia.¹⁹⁴ Seperti yang diungkapkan oleh Menko Polhukam RI di tengah-tengah perjalanannya menuju Fiji pada 30 Maret 2016, bahwa wilayah Papua Barat merupakan bagian yang mutlak tidak dapat terpisahkan dari wilayah kedaulatan Indonesia dan telah mendapatkan pengakuan

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (KeMenko Polhukam RI), *Menko Polhukam Memulai Rangkaian Kunjungan ke Fiji dan Papua Nugini*, *Loc. Cit.*

dari dunia internasional.¹⁹⁵ Keluarnya pernyataan Menko Polhukam RI tersebut secara langsung ikut menegaskan bahwa kunjungan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menghadang ekspansi ULMWP di kawasan Pasifik Selatan.¹⁹⁶

Selain itu Menko Polhukam RI juga menyatakan bahwa kunjungan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji tersebut merupakan bagian dari agenda kunjungan kerja Menko Polhukam RI beserta delegasi dalam rangka mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Fiji dan Papua Nugini menjadi negara tujuan dari kunjungan kerja yang berlangsung mulai 30 Maret hingga 3 April 2016. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka mempererat hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang merupakan tetangga terdekat di bagian timur dan mitra strategis bagi Indonesia.¹⁹⁷ Selain itu kunjungan kerja yang dilakukan bersamaan dengan pemberian bantuan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston tersebut merupakan wujud dari keseriusan Indonesia untuk terus hadir dan memperhatikan kawasan Pasifik Selatan yang selama sepuluh tahun belakangan kurang mendapatkan perhatian dari Indonesia.¹⁹⁸ Secara tidak langsung apa yang dilakukan oleh Indonesia tersebut telah merefleksikan

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ CNN Indonesia, *Pesan Luhut ke Pasifik Selatan: Papua Milik Indonesia*, *Loc. Cit.*

¹⁹⁷ Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (KeMenko Polhukam RI), *Menko Polhukam Bertemu Perdana Menteri Fiji dan Menyampaikan Bantuan Pemerintah Indonesia*, *Loc. Cit.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

bagaimana pandangan Indonesia terhadap kawasan Pasifik Selatan beserta negara-negara yang ada di kawasan tersebut saat ini.

Selain itu pasca bencana Topan Winston, tepatnya di di tengah-tengah proses rekonstruksi sekolah QVS yang dilakukan oleh Satgas Kizi, Pemerintah Indonesia melalui BNPB melakukan penandatanganan MoU dengan Pemerintah Fiji yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Kementerian Pertanian, dan Kelautan, serta Manajemen Bencana Nasional Fiji dalam rangka kerjasama penanggulangan bencana. MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Menteri Pertanian, Pembangunan Maritim dan Penanggulangan Bencana Fiji Inia Seruiratu pada 6 Juni 2016 di Suva, Fiji.¹⁹⁹ MoU tersebut merupakan salah satu terobosan dari kerjasama bilateral antara Indonesia dan Fiji yang telah terjalin selama ini. Pemerintah Fiji terdorong untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal penanggulangan bencana pasca bencana topan Winston yang melanda Fiji. Diungkapkan oleh Menteri Pertanian, Pembangunan Maritim dan Penanggulangan Bencana Fiji bahwa kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Indonesia telah menguatkan Pemerintah Fiji, khususnya pada masa pemulihan pascabencana.²⁰⁰ Selain itu, ia juga mengungkapkan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia telah bermanfaat bagi masyarakat Fiji di wilayah terdampak bencana Topan Winston.

MoU yang ditandatangani oleh kedua negara membahas mengenai beberapa poin, antara lain (1) penguatan pertukaran pengalaman dan keahlian dalam konteks

¹⁹⁹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Indonesia dan Fiji Jalin Kerjasama Penanggulangan Bencana*, 7 Juni 2016, diakses dari: <https://www.bnpb.go.id/home/detail/2966/Indonesia-dan-Fiji-Jalin-Kerjasama-Penanggulangan-Bencana> pada 22 Juli 2017 pukul 14.00 WIB.

²⁰⁰ *Ibid.*

pengehalan dan kesiapsiagaan, (2) adaptasi perubahan iklim dan pemulihan, (3) pelatihan dan workshop, (4) bantuan kemanusiaan, serta (5) dukungan kerjasama lain yang disepakati.²⁰¹ MoU tersebut merupakan langkah awal dari Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Fiji dalam kerjasama di sektor penanggulangan bencana.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji menjadi tonggak awal atau menginisiasi kerjasama di sektor penanggulangan bencana antara kedua negara.



²⁰¹ *Ibid.*

BAB V

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BANTUAN KEMANUSIAAN INDONESIA KEPADA FIJI PASCA BENCANA TOPAN WINSTON PADA TAHUN 2016

Melalui bab V ini penulis akan melakukan analisis terhadap kasus yang penulis pilih yakni berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Analisis tersebut akan penulis lakukan melalui operasionalisasi konsep the *Politics of Humanitarian Aid* untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian penulis.

Operasionalisasi konsep yang akan penulis lakukan di bab ini dilakukan dengan memberikan deskripsi yang sesuai dengan sistematika dari konsep the *Politics of Humanitarian Aid* berupa variabel-variabel penelitian yang terbagi ke dalam beberapa sub-variabel dengan indikatornya masing-masing. Kemudian penulis akan memberikan kesimpulan dari operasionalisasi yang telah penulis lakukan dengan indikator-indikator tersebut untuk mengetahui apakah indikator tersebut terbukti maupun tidak terbukti dalam kasus yang penulis pilih dalam penelitian ini.

5.1 *Political Connection*

Variabel ini menjelaskan mengenai adanya pengaruh dari hubungan politik antara negara donor dan negara resipien dalam pemberian bantuan kemanusiaan.

Hubungan politik tersebut menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor kepada negara resipien. Karena

pada dasarnya hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kepentingan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam hubungan antarnegara, termasuk diantaranya pemberian bantuan kemanusiaan yang merupakan salah satu bentuk dari bantuan luar negeri. Untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait adanya faktor hubungan politik yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor kepada negara resipien, konsep *the Politics of Humanitarian Aid* membagi kembali variabel tersebut menjadi tiga sub-variabel. Tiga sub-variabel tersebut antara lain *donor foreign policy concern or reservations about the potential recipient state*, *donor's domestic political concerns*, dan *domestic politics within the potential recipient state* dengan indikatornya masing-masing yang digunakan untuk melakukan analisis.

5.1.1 Donor Foreign Policy Concern or Reservation about the Potential Recipient State

Sub-variabel ini berbicara mengenai kebijakan luar negeri dari negara donor terhadap negara resipien yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor ke negara resipien. Faktor tersebut menjelaskan adanya kepentingan nasional dari negara donor terhadap negara resipien yang mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengetahui adanya faktor tersebut antara lain *alliances*, *recipient's regime type*, dan *recipient's level of development*. Ketiga indikator tersebut yang kemudian penulis gunakan untuk melakukan analisis terkait faktor kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Fiji yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

5.1.1.1 Alliances

Drury, Olson, dan Van Belle mengemukakan bahwa adanya kecenderungan dari negara donor untuk memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara resipien yang memiliki hubungan aliansi.²⁰² Aliansi merupakan salah satu bentuk hubungan yang lazim dilakukan oleh suatu negara dalam hubungan internasional atas dasar tujuan tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Joseph Nye, aliansi dapat didefinisikan sebagai *formal or informal arrangements between sovereign states, usually to ensure mutual security* atau pengaturan formal atau informal antara negara-negara berdaulat, dengan tujuan untuk memastikan keamanan bersama.²⁰³ Menurut Nye, selain dibangun atas alasan militer, aliansi juga dapat dibangun atas alasan non-militer, diantaranya yang paling utama adalah alasan persamaan ideologi dan ekonomi yang dimiliki oleh negara yang melakukan aliansi.²⁰⁴ Singkatnya aliansi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara dengan cara menggandeng negara lain yang memiliki kesamaan untuk menghadapi ancaman terhadap kepentingan nasionalnya.

Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Seperti yang dinyatakan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-70 di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, bahwa prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif menuntut Indonesia untuk menentukan kebijakan politik luar negeri secara bebas, mandiri,

²⁰² Drury, Olson, dan Van Belle, *Loc. Cit.*, hal. 457.

²⁰³ Joseph Nye, *Understanding International Conflict, An Introduction to Theory and History*, 7th Ed., New York: Pearson Longman, hal. 289.

²⁰⁴ *Ibid.* hal. 70.

dan tanpa beban aliansi.²⁰⁵ Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa aliansi menurut Indonesia merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia merupakan prinsip politik luar negeri yang pertama kali digagas oleh Wapres RI Mohammad Hatta melalui pidatonya yang berjudul “Mendayung Diantara Dua Karang” pada tahun 1948. Prinsip tersebut pada dasarnya menggabungkan dua unsur fundamental yaitu “bebas” dan “aktif”. Menurut Hatta, dalam konteks dua blok (Blok Barat dan Blok Timur) yang saling bertentangan, istilah “bebas” memiliki arti bahwa Indonesia tidak berada di dalam kedua blok tersebut dan memiliki jalan sendiri dalam mengatasi permasalahan internasional.²⁰⁶ Sedangkan istilah “aktif” berarti memiliki upaya untuk menjaga perdamaian serta meredakan ketegangan diantara kedua blok yang bertentangan tersebut.²⁰⁷ Selain itu “aktif” juga dapat diartikan lebih luas sebagai upaya menunjukkan tingginya nasionalisme dan menolak adanya keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang akan mengurangi kedaulatan Indonesia.²⁰⁸

Komitmen Indonesia terhadap prinsip politik luar negeri masih terus dipegang teguh oleh Indonesia dengan berbagai penyesuaian agar relevan dan dapat menjawab dinamika politik global dan kepentingan nasional seperti yang dinyatakan oleh Menlu RI Retno Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan

²⁰⁵ Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta, 14 Agustus 2015.

²⁰⁶ Mohammad Hatta, “Indonesian Foreign Policy”, di Ganewati Wuryandari (Ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI, hal 43.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Dewi Fortuna Anwar, “Hatta dan Politik Luar Negeri”, di Ganewati Wuryandari (Ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008, hal 43.

Kemenlu Tahun 2016.²⁰⁹ Setiap kebijakan luar negeri yang diputuskan oleh Indonesia hingga saat ini masih berpegang teguh pada prinsip tersebut dengan berbagai penyesuaian untuk menghadapi tantangan hubungan internasional yang semakin kompleks. Salah satu wujud dari penyesuaian kebijakan luar negeri Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri adalah upaya untuk mengubah tantangan yang ada menjadi sebuah peluang.²¹⁰ Peluang yang datang dari adanya tantangan tersebut tentunya harus dimaksimalkan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.

Salah satu bentuk dari upaya mengubah tantangan menjadi sebuah peluang tersebut adalah mendorong Indonesia untuk menjadi yang terdepan di bidang diplomasi kemanusiaan (*humanitarian diplomacy*) khususnya dalam mengatasi bencana alam.²¹¹ Upaya diplomasi kemanusiaan tersebut tentunya didorong oleh berbagai bencana alam yang berulang kali terjadi di Indonesia. Diplomasi kemanusiaan lazim diterapkan pada saat terjadinya bencana berskala besar, banyak negara memberikan bantuan luar negerinya selain sebagai sebuah panggilan kemanusiaan, juga sebagai instrumen diplomasi negaranya terhadap negara penerima bantuan.²¹² Hal tersebut kemudian menciptakan interaksi antar aktor-aktor yang terlibat termasuk negara dan membentuk sebuah relasi yang tidak

²⁰⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), *Seminar Internasional Mengkaji Prinsip “Bebas Aktif” Indonesia*, 10 Maret 2016, diakses dari: <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Seminar-Internasional-Mengkaji-Prinsip-%E2%80%9CBebasdan-Aktif%E2%80%9D-Indonesia.aspx> pada 12 September 2017 pukul 10:14 WIB.

²¹⁰ Adriana Elisabeth, *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016, hal. 10.

²¹¹ *Ibid.*

²¹² Anita Afriani Sinulingga, Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional, *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 5, No. 1, 1 Mei 2016, 17-29, hal 20

jarang kemudian mengarah pada adanya negosiasi.²¹³ Pada kasus pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 terlihat bahwa adanya upaya Indonesia untuk melakukan diplomasi kepada Fiji terkait dengan isu separatis di Papua Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam RI Luhut Binsar Panjaitan bahwa kunjungan kerja ke Fiji dan Papua Nugini maupun pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji bertujuan untuk menegaskan kepada masyarakat di Pasifik Selatan khususnya di kedua negara yang dikunjungi tersebut bahwa Papua Barat merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat.²¹⁴ Selain itu Menko Polhukam RI juga menyatakan bahwa kunjungan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Indonesia untuk menghadang ekspansi dari salah satu gerakan separatis Papua Barat, yakni ULMWP. Di awal tahun 2016 sendiri ULMWP telah melakukan ekspansi yang cukup mengkhawatirkan dimana ULMWP diketahui telah membuka kantor perwakilannya di Wamena, Papua.²¹⁵ Selain itu upaya dari ULMWP mencari dukungan ke negara-negara di Pasifik Selatan melalui MSG dengan status sebagai pengamat dan menyuarakan tuntutan mereka kepada PBB juga menjadi ancaman yang membayangi Indonesia dan harus segera diselesaikan karena menyangkut kedaulatan wilayah.

²¹³ *Ibid.* hal 21.

²¹⁴ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolkam RI), *Menko Polhukam Memulai Rangkaian Kunjungan ke Fiji dan Papua Nugini, Loc. Cit.*

²¹⁵ CNN Indonesia, *Pastor John: Soal Papua Pemerintah Tidak Bisa Terus Menyangkal*, 17 Februari 2017, diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217132855-20-111535/pastor-john-soal-papua-pemerintah-tak-bisa-terus-menyangkal/> pada 12 September 2017 pukul 12.10 WIB.

Bencana Topan Winston yang terjadi di Fiji pada tahun 2016 dapat dikatakan sebagai sebuah momentum yang digunakan oleh Indonesia untuk melakukan diplomasi lebih lanjut terkait dengan kepentingan nasionalnya dalam permasalahan separatis di Papua Barat. Dapat diartikan pula bahwa kunjungan kerja yang disertai dengan pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia tersebut penuh dengan muatan politis.²¹⁶ Terlebih kunjungan tersebut dilakukan oleh Menko Polhukam RI yang selama ini terlihat sangat vokal menentang setiap kelompok yang ingin memperjuangkan penentuan nasib sendiri di Papua dan secara terbuka menyerukan agar aktivis Papua yang memperjuangkannya angkat kaki dari Indonesia seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konferensi Gereja-gereja Pasifik atau Pacific Conference of Churches (PCC) Pendeta Francois Pihaatae.²¹⁷ Selain itu Pendeta Francois Pihaatae juga memberikan peringatan kepada Pemerintah Fiji agar pembicaraan bilateral antara Indonesia dan Fiji tentang permasalahan separatis di Papua Barat tidak boleh dipengaruhi oleh bantuan kepada korban Topan Winston.²¹⁸ Kekhawatiran tersebut muncul akibat indikasi bantuan yang diberikan oleh Indonesia bermuatan politis terkait permasalahan gerakan separatis di Papua Barat. Terkait dengan permasalahan separatis di Papua Barat Fiji dapat dikatakan sebagai negara yang selama ini memberikan dukungan kepada Indonesia. Fiji merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia atas Papua Barat tidak dapat dipertanyakan lagi.²¹⁹ Selain itu Fiji juga menjadi negara yang memberikan

²¹⁶ Radio New Zealand, *Pacific Churches Warn about Indonesian Conditional Aid*, 1 April 2016, diakses dari: <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/300351/pacific-churches-warn-about-indonesian-conditional-aid> pada 12 September 2017 pukul 12.31 WIB.

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*

²¹⁹ ABC Radio Australia, *5 Isu yang Perlu Diketahui Mengenai Papua Barat*, *Loc. Cit.*

dukungan terhadap partisipasi Indonesia dalam organisasi regional di kawasan tersebut. Fiji juga menjadi negara yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan bagian dari ras Melanesia karena menjadi rumah bagi mayoritas ras Melanesia.²²⁰

Selama ini Fiji bersama dengan Papua Nugini dikenal sebagai negara di kawasan Pasifik Selatan yang konsisten memberikan dukungan terhadap Indonesia pada permasalahan Papua Barat. Hal tersebut tentunya berseberangan dengan sikap tujuh negara di kawasan Pasifik Selatan lainnya, yakni Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon yang kontra terhadap Indonesia pada permasalahan Papua Barat. Ketujuh negara tersebut berada di bawah payung Pacific Coalition for West Papua (PCWP) yang menurut Indonesia menggunakan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat untuk mendukung gerakan separatis yang mengganggu kedaulatan wilayahnya.²²¹ Salah satu upaya yang dilakukan oleh koalisi tersebut adalah dengan mendesak PBB untuk menyelidiki adanya dugaan kasus pelanggaran HAM oleh Indonesia melalui pidatonya di hadapan Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 26 September 2016 di Jenewa, Swiss.²²² Selain itu, ketujuh negara tersebut yang suaranya diwakilkan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Komunitas Vanuatu, Hon Ronald Key Warsal juga mendesak Dewan HAM PBB untuk memerintahkan Komisioner

²²⁰ Johny Blades, *Melanesia's Test: The Political Quandary of West Papua*, Loc. Cit.

²²¹ Deutsche Welle (DW), *7 Negara Pasifik Desak PBB Selidiki Pelanggaran HAM di Papua*, 2 Maret 2017, diakses dari <http://www.dw.com/id/7-negara-pasifik-desak-pbb-selidiki-pelanggaran-ham-di-papua/a-37777030> pada 30 Oktober 2017 pukul 13.36 WIB.

²²² *Ibid.*

Tinggi HAM agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya di Papua Barat.²²³

Komitemen Fiji untuk memberikan dukungannya terhadap Indonesia pada permasalahan Papua Barat tersebut kemudian berhasil menghasilkan kerjasama strategis antara kedua negara. Kerjasama tersebut merupakan kerjasama di bidang pertahanan atau “Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on Cooperation in the Field of Defence” yang meliputi bidang pertahanan angkatan bersenjata melalui diadakannya dialog dan konsultasi bilateral serta peningkatan kapasitas di bidang keamanan dan militer.²²⁴ Kerjasama tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu dan Menteri Keamanan Nasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola pada 29 September 2017 di Jakarta.²²⁵ Disepakatinya perjanjian kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan kedua negara yang dilakukan pada 4 November 2016 di Jakarta.²²⁶ Menteri Pertahanan RI mengungkapkan, terdapat beberapa alasan yang menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama strategis di bidang pertahanan dengan Fiji. Salah satu pertimbangan tersebut adalah konsistensi Fiji yang tidak mendukung gerakan separatis atau kemerdekaan Papua Barat.²²⁷ Dalam hal ini Indonesia memandang Fiji sebagai

²²³ Tabloid Jubi (Portal Berita Tanah Papua No. 1), *Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua*, 2 Maret 2017, diakses dari <http://tabloidjubi.com/m/artikel-4142-tujuh-negara-pasifik-tuntut-pbb-tangani-keseluruhan-situasi-west-papua.html> pada 30 Oktober 2017 pukul 13.40 WIB.

²²⁴ Detiknews, *Bertemu Menhan Fiji, Ryamizard Teken Kerja Sama Bidang Pertahanan*, 29 September 2017, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3663285/bertemu-menhan-fiji-ryamizard-teken-kerja-sama-bidang-pertahanan> pada 30 Oktober 2017 pukul 14.24 WIB.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Ibid.*

²²⁷ Kompas.com, *Tolak Kemerdekaan Papua, Alasan Indonesia Kerja Sama dengan Fiji*, 29 September 2017, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/29/12332471/tolak-kemerdekaan-papua-alasan-indonesia-kerja-sama-dengan-fiji> pada 30 Oktober 2017 pukul 14.42 WIB.

negara yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan yang secara konsisten telah menunjukkan dukungannya terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.²²⁸ Hal tersebut tentunya juga akan memberikan pengaruh yang positif bagi hubungan bilateral kedua negara dan kawasan Pasifik Selatan secara keseluruhan.

Selain upaya terkait dengan diplomasi permasalahan gerakan separatis Papua Barat, upaya pendekatan lebih lanjut Indonesia terhadap Fiji sebagai negara yang memiliki pengaruh cukup besar di kawasan Pasifik Selatan termasuk dalam organisasi regional kawasan tersebut. Selain sebagai negara sahabat yang telah menjalin hubungan cukup lama dengan Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Menko Polhukam RI bahwa Fiji merupakan “*Center of Gravity*” dari Indonesia di kawasan Pasifik Selatan.²²⁹ “*Center of Gravity*” tersebut merujuk pada Fiji yang memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan. Selain berperan menjadi *hub* atau penghubung bagi negara – negara di kawasan Pasifik Selatan, Fiji memiliki kontribusi yang penting bagi organisasi regional di kawasan tersebut. Seperti di salah satu organisasi regional kawasan Pasifik Selatan, yakni MSG, Fiji memiliki peran yang cukup penting sebagai negara yang aktif mengupayakan negara – negara di kawasan Pasifik Selatan untuk mandiri, meningkatkan pertumbuhan ekonominya, dan menciptakan kesetaraan.²³⁰ Selain menjadi salah satu negara yang

²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ CNN Indonesia, *Luhut Melawat ke Fiji, Perkuat Posisi Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan*, *Loc. Cit.*

²³⁰ Litia Mawi, *Fiji's Emerging Brand of Pacific Diplomacy: A Fiji Government Perspective*, dalam Greg Fry dan Sandra Tarte (ed), *The New Pacific Diplomacy*, 2015, Canberra: National University Press, hal. 101.

ikut menginisiasi pendirian organisasi regional tersebut, Fiji juga pernah menjadi negara yang memimpin organisasi tersebut selama dua tahun antara 2012 – 2013.²³¹

Di kawasan regional Pasifik Selatan sendiri Fiji merupakan salah satu negara yang keberadaannya cukup diperhitungkan oleh berbagai aktor internasional, baik negara maupun non – negara. Fiji merupakan salah satu negara di kawasan Pasifik Selatan yang berperan aktif di kancah global bersama berbagai negara di dunia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan global. Fiji sejak tahun 1978 merupakan salah satu negara yang aktif terlibat dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB.²³² Bergabungnya Fiji ke dalam negara Group 77 plus Cina, yakni blok terbesar dalam *voting* PBB juga merupakan salah satu faktor yang mendorong Fiji untuk menonjolkan keberadaannya atau menjadi pemimpin di kawasan Pasifik Selatan.²³³ Salah satu contoh tersebut adalah peran Fiji sebagai negara yang terdepan atau memimpin negara – negara di kawasan Pasifik Selatan dalam kerangka KSS atau KSST dimana Indonesia juga terlibat di dalamnya.²³⁴

Melalui upaya pendekatan tersebut tentunya Indonesia akan lebih mudah diterima dan mendapatkan posisi di kawasan Pasifik Selatan. Adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Fiji dapat dilihat dari kunjungan kerja beserta pemberian bantuan kemanusiaan yang digunakan untuk mengembangkan potensi kerjasama kedua negara. Hal tersebut penandatanganan MoU oleh KPU dengan FEO terkait dengan pertukaran informasi dan kegiatan-

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid.* hal. 102.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ *Ibid.*

kegiatan lain dalam bidang manajemen Pemilu.²³⁵ Selain itu melalui pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 Indoensia melalui BNPB juga kemudian berhasil melakukan penandatanganan MoU terkait dengan kerjasama penanggulangan bencana.²³⁶ MoU tersebut merupakan langkah awal bagi kedua negara untuk melakukan kerjasama lebih lanjut terkait dengan sektor penanggulangan bencana.²³⁷

Diluar pengaruh politik khususnya yang berkaitan dengan permasalahan gerakan separatis di Papua Barat dan adanya kedekatan hubungan antara Indonesia dan Fiji , prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh oleh Indonesia pada dasarnya ikut memberikan pengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara yang membutuhkan bantuan tersebut. Fiji sebagai negara yang baru saja dilanda bencana Topan Winston yang merupakan bencana topan berskala besar tentunya membutuhkan bantuan tersebut. Indonesia yang memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif tersebut secara tidak langsung telah dituntut untuk berkomitmen aktif dalam menjalin hubungan dengan berbagai negara di dunia walaupun tidak memiliki keterikatan dengan aliansi manapun. Hal tersebut salah satunya termasuk dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab moral serta bentuk solidaritas Indonesia sebagai sesama manusia dalam mewujudkan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Apa yang dilakukan

²³⁵ Republik Indonesia, Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kantor Pemilihan Fiji Tentang Kerja Sama dalam Manajemen Pemilihan Umum, Pasal 1.

²³⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Indonesia dan Fiji Jalin Kerjasama Penanggulangan Bencana, Loc. Cit.*

²³⁷ *Ibid.*

oleh Indonesia tersebut tentunya harus selaras dengan kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan termasuk diantaranya adalah menjaga keutuhan wilayah kedaulatan negara yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

5.1.1.2 Recipient Regime Type

Indikator ini berbicara mengenai adanya kesamaan atau kedekatan dari sisi ideologi yang dimiliki oleh negara donor dan negara resipien dapat mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya.²³⁸ Negara donor cenderung akan memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara resipien yang memiliki kesamaan ideologi.²³⁹ Pada kasus pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston tahun 2016, faktanya Indonesia sebagai negara donor memang memiliki kesamaan ideologi dengan Fiji sebagai negara resipien. Kedua negara sama-sama negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan kedua negara sama-sama melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.

Indonesia sendiri menjalankan sistem demokrasi yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Indonesia menggunakan sistem presidensial berdasarkan Demokrasi Pancasila dijalankan dengan tujuh sendi pokok yang menjadi landasan. Ketujuh sendi pokok tersebut, antara lain Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada aturan hukum, Indonesia menganut sistem konstitusional, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, presiden adalah

²³⁸ Drury, Olson, dan Van Belle, *Loc. Cit.*, hal. 457.

²³⁹ *Ibid.*

penyelenggaraan pemerintahan tertinggi di bawah MPR, pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan kekuasaan presiden selaku kepala negara tidak tak terbatas.²⁴⁰ Demokrasi Pancasila yang dijalankan oleh Indonesia merupakan demokrasi yang deliberatif atau mengutamakan konsultasi publik atau musyawarah mufakat.²⁴¹ Hal tersebut mengacu pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.²⁴² Demokrasi deliberatif tersebut merupakan jawaban untuk menyatukan berbagai kepentingan masyarakat yang heterogen.²⁴³ Demokrasi deliberatif mengutamakan lahirnya kebijakan publik dari musyawarah dan tidak ada paksaan untuk menjaga ketertiban sosial dan stabilitas nasional.²⁴⁴

Fiji merupakan negara yang pada dasarnya menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis dengan sistem parlementer. Namun, dalam perjalanannya demokrasi yang berjalan di Fiji tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut ditandai oleh kudeta terhadap kekuasaan pemerintahan terpilih yang terjadi selama empat kali yakni pada tahun 1987 sebanyak dua kali, 2000, dan 2006. Dimana tiga dari empat kudeta tersebut disebabkan oleh adanya konflik antar etnis yang ada di tengah-tengah masyarakat.²⁴⁵ Terjadinya kudeta tersebut tentunya

²⁴⁰ P, Sharma, *Op. Cit.*

²⁴¹ Ujan AA, dkk, *Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia*. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya Jakarta.2008, hal. 4-7.

²⁴² *Ibid.* hal 7

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ The Diplomat, *Indo-Fijian and Fiji's Coup Culture*, 28 Maret 2017, diakses dari: <https://thediplomat.com/2017/03/indo-fijians-and-fijis-coup-culture/> pada 12 September 2017 pukul 11.00 WIB.

membuat sistem pemerintahan di Fiji tidak berjalan secara demokratis sepenuhnya. Pada kudeta yang terjadi 2006, dimana militer mengambil alih kekuasaan pemerintah dan menolak pelaksanaan Pemilu hingga tahun 2014, Fiji dapat dikatakan sebagai negara yang jauh dari kata demokratis. Karena faktanya pada saat itu, masyarakat Fiji harus menerima kenyataan dimana pemerintah membatasi pemberitaan media dan melarang adanya pertemuan – pertemuan.²⁴⁶ Selain itu masyarakat juga tidak mendapatkan hak politiknya secara penuh seperti sebelumnya. Fiji sendiri dapat dikatakan kembali melangkah menuju sistem pemerintahan yang demokratis sepenuhnya pada tahun 2014 setelah berhasil melaksanakan Pemilu yang sebelumnya diikuti oleh perubahan konstitusi di tahun 2013.²⁴⁷

Pada kasus pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston tahun 2016, kedua negara faktanya memang memiliki kesamaan ideologi yang dianut. Kedua negara sama-sama menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis dengan penyesuaian terhadap nilai – nilai yang ada di tengah masyarakat di masing – masing negara. Namun, apabila merujuk pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dipegang teguh oleh Indonesia, pemberian bantuan kemanusiaan tersebut tidak dipengaruhi oleh adanya kesamaan ideologi tersebut. Karena prinsip tersebut menuntut Indonesia untuk proaktif mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia yang telah diamanatkan oleh

²⁴⁶ BBC Indonesia, *Fiji akan Cabut Undang-Undang Darurat*, 2 Januari 2012, diakses dari: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/120102_fijilaw pada 12 September 2017 pukul 18.01 WIB.

²⁴⁷ Lowy Institute: The Interpreter, *Fiji's Election and Australia: The Terms of Re-engagement*, 12 September 2014, diakses dari: <https://www.lowyinstitute.org/publications/fiji-s-election-and-australia-terms-re-engagement> pada 12 September 2017 pukul 18.30 WIB.

UU 1945 selaku konstitusi negara.²⁴⁸ Sikap proaktif Indonesia untuk mengatasi krisis kemanusiaan termasuk bencana yang selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif tentunya dilakukan kepada pihak atau negara manapun secara universal tanpa melihat latar belakang apalagi hingga mencampuri urusan dalam negerinya.

Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif siap menjalin hubungan dan memberikan bantuan kepada berbagai negara di dunia tanpa melihat latar belakang dari negara tersebut, termasuk ideologi yang dianut selagi apa yang dilakukan tersebut sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Indonesia berprinsip serta siap menjalin hubungan dengan berbagai negara di dunia tanpa ikut campur urusan dalam negeri negara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan rumusan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa Indonesia menginginkan adanya kekraban hubungan dengan negara manapun khususnya dalam hal hubungan ekonomi yang tetap harus diatur dan tidak mencampuri urusan kedaulatan nasional suatu negara.²⁴⁹ Untuk mewujudkan adanya hubungan kekraban tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara yang sedang mengalami krisis atau bencana. Karena hal tersebut merupakan bentuk dari tanggung jawab moral serta solidaritas terhadap sesama manusia.

²⁴⁸ JPPN.COM, *DPR Berharap Langkah Indonesia Jadi Contoh Negara Lain*, 3 September 2017, diakses dari: <https://www.jpnn.com/news/dpr-berharap-langkah-indonesia-jadi-contoh-negara-lain> pada 12 September 2017 pukul 19.01 WIB.

²⁴⁹ Zainuddin Djafar, Robby Aulia Fadila, *Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global: Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*, Bandung: Pustaka Jaya, 2013, hal 48.

Selain itu terdapat fakta lain yang membuktikan bahwa Indonesia tidak memandang ideologi dari negara resipien dalam memberikan bantuan luar negerinya, khususnya bantuan kemanusiaan. Sebagai contoh adalah adanya bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Korea Utara oleh Indonesia pada tahun 2012.

Bantuan kemanusiaan tersebut diberikan oleh Indonesia kepada Korea Utara untuk mengatasi permasalahan pangan yang menimpa negara tersebut. Bantuan kemanusiaan tersebut senilai juta US\$ itu diwujudkan dalam bentuk 1.465 ton minyak kelapa sawit (*palmolein oil*) yang digunakan sebagai pasokan bahan makanan campuran yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk didistribusikan langsung kepada rakyat Korea Utara, khususnya kalangan yang paling rentan, seperti ibu - ibu menyusui dan anak - anak di Korea Utara.²⁵⁰ Korea Utara faktanya merupakan negara yang menganut ideologi yang berseberangan dengan Indonesia. Korea Utara menganut ideologi komunisme dengan sistem pemerintahan yang sangat otoriter baik ke dalam maupun ke luar baik yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya. Hal tersebut tentunya sangat jauh berbeda dengan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila dengan sistem pemerintahan yang berjalan secara demokratis. Namun, adanya perbedaan tersebut nampaknya tidak mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada negara lain yang sedang membutuhkan, mengingat Indonesia sendiri berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia terus menjalin hubungan baik dengan berbagai negara di dunia tanpa memandang latar belakang ideologi negara tersebut, aktif menjunjung tinggi

²⁵⁰ Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea, *Pelabuhan Nampho: Kedatangan Bantuan Indonesia untuk Korea Utara*, Loc. Cit.

solidaritas sebagai sesama manusia salah satunya melalui pemberian bantuan kemanusiaan, aktif menjaga perdamaian dunia, dan yang paling penting adalah tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk dalam hal ideologi dianut.

5.1.1.3 *Recipient's Level of Development*

Indikator ini melihat bahwa tingkat pembangunan dari negara resipien memiliki pengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor kepada negara resipien. Negara dengan tingkat pembangunan tinggi memiliki kemampuan atau kapabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan negara dengan tingkat pembangunan yang lebih rendah dalam mengatasi dampak bencana, maka semakin tinggi tingkat pembangunan dari negara resipien jumlah bantuan yang diberikan akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya.²⁵¹ Tingkat perekonomian merupakan indikator moneter yang digunakan untuk mengetahui tingkat pembangunan dari suatu negara. Walaupun tidak sepenuhnya memberikan gambaran yang konkrit terkait tingkat pembangunan suatu negara, tingkat perekonomian memiliki korelasi dengan indikator *socio-economic* terkait pembangunan suatu negara melalui kualitas hidup manusia, antara lain seperti angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*), tingkat kematian anak-anak — anak (*mortality rates of children*), dan tingkat partisipasi di sekolah (*enrollment rates in school*).²⁵² Indikator *socio-economic* tersebut yang kemudian dianalisis bersama dengan indikator moneter, yakni tingkat perekonomian dan

²⁵¹ Drury, Olson, dan Van Belle, *Loc. Cit.*, hal. 459.

²⁵² The World Bank, *Data: Why use GNI per capita to classify economies into income groupings?*, diakses dari: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378831-why-use-gni-per-capita-to-classify-economies-into> pada 12 September 2017 pukul 07.30 WIB.

beberapa indikator terkait lainnya oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) yang setiap tahunnya dilaporkan melalui Human Development Report (HDR) setiap tahunnya.²⁵³

Tingkat perekonomian di suatu negara digolongkan oleh World Bank menjadi empat golongan, yakni negara berpendapatan rendah (*low income economy*), negara berpendapatan menengah kebawah (*lower-middle income economy*), negara berpendapatan menengah keatas (*upper middle income economy*), dan negara berpendapatan tinggi (*high income economy*).²⁵⁴

Penggolongan tersebut oleh World Bank didasarkan kepada tingkat pendapatan nasional bruto atau *Gross National Income* (GNI) per kapita dari suatu negara yang diperbaharui setiap tahun pada tanggal 1 Juli.²⁵⁵ Per tanggal 1 Juli 2015, sama dengan atau dibawah angka US\$ 1.045 digolongkan ke dalam *low income economy*, negara dengan GNI per kapita berada di angka US\$1.045 hingga US\$ 4.125 digolongkan ke dalam *lower-middle income economy*, negara dengan GNI per kapita berada di angka US\$ 4.125 hingga US\$12,736 digolongkan ke dalam *upper-middle income economy*, dan negara dengan GNI per kapita sama dengan atau lebih dari angka US\$ 12.736.²⁵⁶ Terkait dengan kasus yang penulis pilih, Fiji sebagai negara resipien bantuan kemanusiaan dapat digolongkan sebagai negara *upper*

²⁵³ United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Reports: Human Development Index (HDI), diakses dari: <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> pada 12 September 2017 pukul 07.40 WIB.

²⁵⁴ The World Bank, *The Data Blog: New Country Classifications by Income Level*, 1 Juli 2015, diakses dari: <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications> pada 12 September 2017 pukul 08.00 WIB.

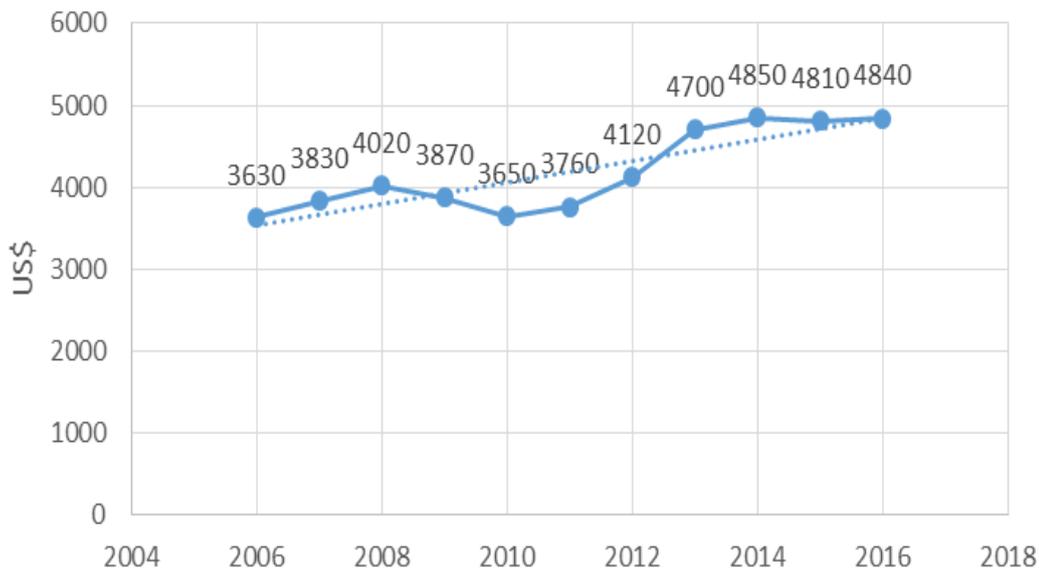
²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

middle income economy. Penggolongan tersebut berdasarkan pada GNI per kapita Fiji berada di angka US\$ 4850 pada tahun 2015.²⁵⁷

Grafik 5.1 Pendapatan Nasional Kotor atau Gross National Income (GNI) Fiji pada Tahun 2006-2016

Fiji Gross National Income (GNI) per Capita Atlas Method (current US\$)



(Sumber: World Bank, diolah penulis)²⁵⁸

Apabila melihat grafik diatas, terlihat bahwa GNI per capita Fiji cenderung meningkat, walaupun sempat mengalami penurunan hingga negara tersebut masuk ke dalam kategori *lower middle income economy*. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2008-2011, dimana pada tahun-tahun tersebut Fiji sedang mengalami krisis politik dalam negeri pasca kudeta militer pada tahun 2006 yang ikut mempengaruhi

²⁵⁷ The World Bank, *Data: Fiji*, diakses dari: <https://data.worldbank.org/country/Fiji> pada 12 September 2017 pukul 08.23 WIB.

²⁵⁸ *Ibid.*

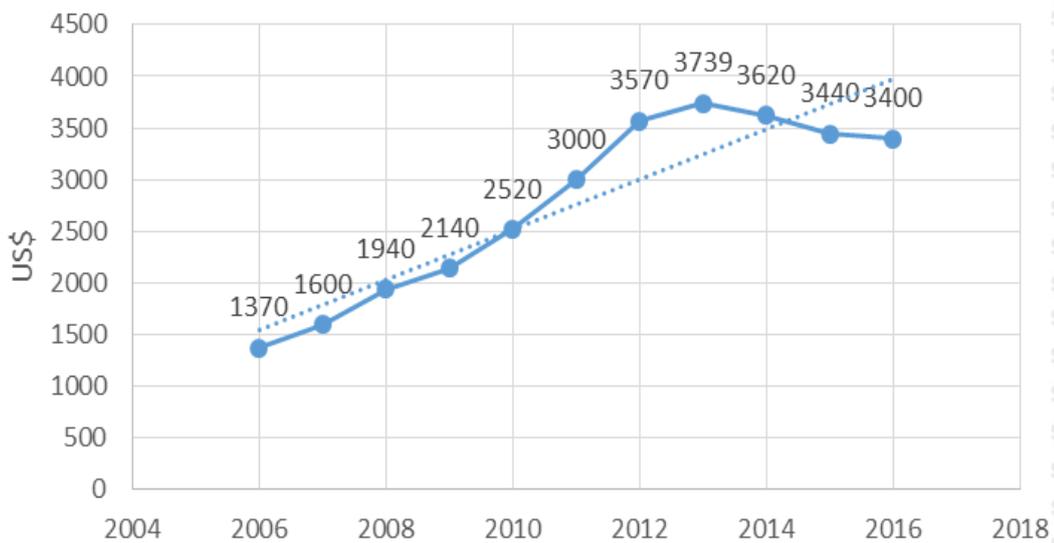


berbagai sektor kehidupan di Fiji. Disinyalir penurunan tersebut merupakan eksek dari kondisi politik dalam negeri Fiji yang tidak stabil akibat adanya krisis politik.

Indonesia sebagai negara donor pada pemberian bantuan kemanusiaan pasca bencana Topan Winston di Fiji pada tahun 2016 faktanya berada pada golongan tingkat perekonomian lebih rendah daripada Fiji. Indonesia menurut data yang dilansir oleh World Bank digolongkan sebagai negara *lower middle income economy* dengan GNI per kapita di angka US\$ 3.440 pada tahun 2015.²⁵⁹ Angka tersebut cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2013 seperti yang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 5.2 Pendapatan Nasional Kotor atau Gross National Income (GNI) Indonesia pada Tahun 2006-2016

**Indonesia Gross National Income (GNI) per Capita
Atlas Method (current US\$)**



(Sumber: World Bank, diolah penulis)²⁶⁰

²⁵⁹ The World Bank, *Data: Indonesia*, diakses dari: <https://data.worldbank.org/country/indonesia> pada 12 September 2017 pukul 08.30 WIB,

²⁶⁰ *Ibid.*



Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) yang dilaporkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) juga dapat dijadikan acuan untuk mengetahui tingkatan pembangunan dari suatu negara. HDI

Fiji sendiri menurut UNDP berada pada urutan ke 97 dengan indeks 0.736.²⁶¹

Urutan dan indeks tersebut dilihat dari beberapa indikator terkait, antara lain pendidikan atau (*education*), pendapatan dan sumberdaya (*income/composition of resource*), angka ketimpangan (*inequality*), indeks pembangunan gender atau (*gender development index*), angka kemiskinan (*poverty*), kerentanan dan ketenagakerjaan (*work, employment, and vulnerability*), keamanan manusia (*human security*), perdagangan dan aliran keuangan (*trade and financial flows*), mobilitas dan komunikasi (*mobility and communication*), keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), dan demografi (*demography*).

²⁶¹ United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Reports, *Human Development Indicators: Fiji*, diakses dari: <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/FJI> pada 12 September 2017 pukul 08.47 WIB.

Tabel 5.1 Indikator Utama Human Development Index Fiji

Fiji Human Development Indicators	
Health (Life Expectancy at Birth (years))	70.2
Education (Expected Years of Schooling (years))	15.3
Income and Composition of Resources (Gross National Income (GNI) per capita (2011 Purchasing Power Parity US\$))	8.425
Inequality (Inequality-adjusted HDI)	0.624
Gender (Gender Development Index)	n/a
Poverty (Multidimensional Poverty Index)	n/a
Work, Employment, and Vulnerability (Employment to population ratio (% ages 15 and older))	50.2
Human Security (Homicide rate (per 100,000 people))	3
Trade and Financial Flows (Exports and imports (% of GDP))	137
Mobility and Communication (Internet users (% of population))	46.3
Environmental Sustainability (Carbon dioxide emissions per capita (tonnes))	1.9
Demography (Population, total (millions))	0.0

(Sumber: United Nations Development Programme (UNDP))²⁶²

Di sisi lain, HDI Indonesia sendiri menurut UNDP berada pada urutan 113 dengan indeks 0.689.²⁶³ Urutan beserta indeks tersebut tentunya berada dibawah Fiji yang menjadi negara resipien bantuan kemanusiaan dari Indonesia pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Fakta tersebut tentunya secara langsung telah memberikan gambaran bahwa tingkat pembangunan Indonesia yang berperan sebagai negara donor tidak lebih baik atau berada dibawah tingkat pembangunan

²⁶² *Ibid.*

²⁶³ United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Report, *Human Development Indicators (Indonesia)*, diakses dari: <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN> pada 12 September 2017 pukul 09.00 WIB.

Fiji yang berperan sebagai negara resipien. Begitupun dengan indikator terkait HDI yang digunakan oleh UNDP, beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa di beberapa sektor Indonesia sebagai negara donor tidak lebih baik dari Fiji sebagai negara resipien seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Indikator Utama Human Development Index Indonesia

Indonesia Human Development Indicators	
Health (Life Expectancy at Birth (years))	69.1
Education (Expected Years of Schooling (years))	12.9
Income and Composition of Resources (Gross National Income (GNI) per capita (2011 Purchasing Power Parity US\$))	10.053
Inequality (Inequality-adjusted HDI)	0.536
Gender (Gender Development Index)	0.926
Poverty (Multidimensional Poverty Index)	0.024
Work, Employment, and Vulnerability (Employment to population ratio (% ages 15 and older))	63.4
Human Security (Homicide rate (per 100,000 people))	0.5
Trade and Financial Flows (Exports and imports (% of GDP))	41.9
Mobility and Communication (Internet users (% of population))	22
Environmental Sustainability (Carbon dioxide emissions per capita (tonnes))	1.9
Demography (Population, total (millions))	256.7

(Sumber: United Nations Development Programme (UNDP))²⁶⁴

Apabila melihat fakta yang telah dipaparkan diatas, asumsi yang dikemukakan oleh Drury, Olson, dan Van Belle bahwa tingkat pembangunan dari negara donor mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan dari negara resipien

²⁶⁴ *Ibid.*

tidak berpengaruh pada kasus pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Karena faktanya Fiji sebagai negara resipien berada pada tingkat golongan yang lebih tinggi daripada Indonesia yang berperan sebagai negara donor. Fiji pada tahun 2015 digolongkan sebagai negara *upper middle income* dengan GNI per kapita mencapai angka US\$ 4.850.

Sedangkan di tahun yang sama, Indonesia digolongkan sebagai negara *lower middle income* dengan GNI per kapita di angka US\$ 3.440 atau jauh dibawah GNI per

kapita Fiji. Selain itu penggolongan tersebut juga didukung oleh laporan UNDP melalui HDI dimana indeks beserta urutan Fiji berada jauh diatas Indonesia.

Beberapa indikator terkait juga menunjukkan bahwa tingkat pembangunan Fiji

berada di tingkat yang lebih tinggi dari Indonesia. Namun, pada kondisi pasca

bencana dengan dampak kerusakan yang begitu parah, tingkat pembangunan yang

tinggi dari suatu negara tidak 100% memberikan jaminan bahwa negara tersebut

dapat dengan mudah pulih dari bencana tanpa adanya pemberian bantuan

kemanusiaan. Karena sangat memungkinkan jika faktor-faktor yang mendukung

tingginya tingkat pembangunan di negara tersebut tidak dapat berjalan semestinya

pasca terjadinya bencana. Hal tersebut tentunya dapat mendorong turunnya GNI

per kapita yang kemudian berimbas pada tingkat pembangunan dari suatu negara

pasca terjadinya bencana. Untuk kasus Fiji pasca bencana Topan Winston, seperti

yang dinyatakan oleh ADB, bahwa besarnya dampak kerusakan bencana Topan

Winston menjadi ancaman bagi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

Fiji yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata.²⁶⁵

²⁶⁵ Radio New Zealand, *Winston Inflicts Significant Blow to Fiji's Economy*, 26 Februari 2016, diakses dari: <http://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/20179083/2/winston-inflicts-significant-blow-to-fiji's-economy> pada 12 September 2017 pukul 10.10 WIB.

Fakta bahwa Indonesia sebelumnya telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara maju atau digolongkan sebagai negara *high income* juga dapat menjadi fakta yang menunjukkan bahwa tingkat pembangunan negara resipien mempengaruhi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2011 ketika Indonesia memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Jepang yang dilanda bencana gempa bumi dan tsunami, Selandia Baru yang juga dilanda bencana gempa bumi, dan Australia yang dilanda bencana banjir bandang.²⁶⁶ Tingkat pembangunan ketiga negara yang menjadi resipien bantuan kemanusiaan tersebut faktanya berada diatas tingkatan pembangunan Indonesia yang menjadi negara donor. Ketiga negara tersebut juga memiliki peran sebagai donor utama bantuan luar negeri Indonesia. Namun, faktanya hal tersebut tidak menyurutkan langkah Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaannya.

5.1.2 Donor Domestic Political Concerns

Sub-variabel ini berbicara mengenai kondisi domestik dari negara donor yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor kepada negara resipien. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk melakukan analisis terkait faktor tersebut antara lain, *donor's current budget deficit, the salience of the disaster, dan current donor's disaster*. Ketiga indikator tersebut yang kemudian akan penulis gunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai faktor kondisi domestik Indonesia yang mempengaruhi pemberian

²⁶⁶ Kompas.com, *Indonesia Bantu 3,1 Juta Dollar AS*, 24 Oktober 2011, diakses dari: <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/24/17111544/Indonesia.Bantu.3.1.Juta.Dollar.AS> pada 12 September 2017 pukul 01.13 WIB.

bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

5.1.2.1 Donor Current Budget Deficit

Asumsi yang diberikan oleh indikator ini adalah kondisi keuangan khususnya anggaran yang dimiliki oleh negara donor berpengaruh terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor kepada negara resipien. Jika negara donor mengalami defisit anggaran yang tinggi maka jumlah alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan akan semakin rendah dan begitupun sebaliknya.²⁶⁷

Pada tahun 2016 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, defisit APBN Indonesia mencapai angka 307,7 triliun atau 2,46 % dari PDB negara.²⁶⁸ Defisit tersebut terjadi karena pendapatan yang berhasil diperoleh negara hanya sebesar Rp. 1.551,8 triliun atau berada dibawah anggaran belanja tahun 2016 yang mencapai angka Rp. 1.859 triliun.²⁶⁹ Namun, defisit tersebut dapat dikatakan masih berada dalam posisi yang aman. Seperti yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, defisit APBN tahun 2016 dinilai masih aman karena berada dibawah batas 3 persen atau sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang.²⁷⁰

Selain itu, apabila berkaca pada tahun tahun sebelumnya atau tahun 2015, defisit APBN Indonesia pada tahun 2016 dapat dikatakan berada pada kondisi yang jauh lebih baik. Pada tahun 2015, defisit APBN berada pada angka Rp. 318,5 triliun

²⁶⁷ Drury, Olson, dan Van Belle, *Loc. Cit.*, hal. 458.

²⁶⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016 (.pdf), *Loc. Cit.*

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ *Kompas.com*, Defisit APBN 2016 Mencapai Rp. 307, 7 Triliun, *Loc. Cit.*

atau 2,8 % dari PDB negara.²⁷¹ Dari berkurangnya persentase defisit APBN tersebut, dapat dilihat bahwa kondisi anggaran keuangan Indonesia di tahun 2016 lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni tahun 2015. Hal tersebut tentunya lebih memungkinkan Indonesia mengalokasikan anggaran untuk keperluan bantuan luar negeri khususnya bantuan kemanusiaan.

Grafik 5.3 Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber: Kementerian Keuangan RI - Litbang Koran Jakarta²⁷²

Berbicara mengenai bantuan kemanusiaan maupun bantuan luar negeri Indonesia secara keseluruhan dan keterkaitannya dengan APBN, faktanya bantuan luar negeri Indonesia tidak secara khusus dianggarkan. Walaupun Indonesia sendiri telah

²⁷¹ *Ibid.*

²⁷² Koran Jakarta, *Defisit APBN Meningkat, Negara Makin Bergantung Utang*, 31 Juli 2017, diunduh dari: <http://www.koran-jakarta.com/defisit-apbn-meningkat--negara-makin-bergantung-utang/> pada 12 September 2017 pukul 13.10 WIB.

berperan cukup lama sebagai donor bantuan luar negeri khususnya bantuan kemanusiaan. Indonesia lebih banyak menggunakan dana praktis yang digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN. Dana praktis diluar mekanisme APBN tersebut kemudian dikelola oleh berbagai kementerian atau instansi yang berkepentingan dengan pemberian bantuan tersebut sebelum nantinya diberikan kepada negara resipien. Anggaran dana praktis tersebut Hal tersebut tentunya berbeda dengan pengelolaan anggaran bantuan luar negeri dari beberapa negara donor yang secara khusus diatur dalam anggaran belanja negara secara transparan serta disalurkan satu pintu melalui agensi khusus. Namun, kedepannya dana bantuan luar negeri Indonesia secara khusus akan dianggarkan di APBN secara transparan dan tidak menutup kemungkinan akan ada agensi yang secara khusus menyalurkan bantuan tersebut kepada negara resipien.

Terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016, KeMenko Polhukam melalui melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri merupakan kementerian yang mengelola serta menyalurkan dana bantuan baik dalam bentuk dana bantuan tunai maupun bentuk lainnya. Kemenko Polhukam sendiri pada tahun 2016, mendapat alokasi anggaran dari APBN dengan total pagu belanja dalam pagu anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 280.915.962.000,- dengan realisasi akhir tahun anggaran 2016 sebesar Rp 244.277.563.372,- atau sebesar 96,39% .²⁷³ Realisasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 244.135.542.190,-

²⁷³ Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum, dan HAM Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI), *Laporan Akuntabilitas Kinerja KeMenko Polhukam 2016 (LAKIP 2016)* (.pdf), 2016, hal 68, diunduh dari: https://polkam.go.id/konten/unggahan/2017/07/Lakip_Kemenko_Polhukam_Tahun_2016.pdf pada 12 September 2017 pukul 14.07 WIB.

atau 86,91%.²⁷⁴ Pada tahun 2016 sendiri terdapat penurunan persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan persentase realisasi tahun 2015, yaitu sebesar 94,87%.²⁷⁵ Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pemblokiran sejumlah anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2016. Namun anggaran pada tahun 2015 dibagi kepada 2 (dua) Satuan Kerja (Satker), yaitu Kemenko Polhukam sebesar Rp 186.484.442.000 dan Satker Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) sebesar Rp 614.026.476.000.²⁷⁶ Sedangkan di tahun 2016 Satker Bakorkamla menjadi Badan Keamanan Laut dan memiliki Pagu Anggaran DIPA tersendiri.

Fakta mengenai turunnya angka defisit APBN Indonesia pada tahun 2016 sebesar 2,5 % atau turun 0,3 % dari tahun 2015 dapat dikatakan berpengaruh terhadap peran Indonesia sebagai negara donor bantuan luar negeri pada tahun 2016, khususnya bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston melalui Kemenko Polhukam. Selain itu adanya pemisahan anggaran Kemenko Polhukam secara khusus dengan Bakorkamla pada tahun 2016 yang juga diikuti oleh peningkatan anggaran juga disinyalir mempengaruhi pemberian bantuan tersebut. Meskipun bantuan luar negeri Indonesia termasuk bantuan kemanusiaan tidak dianggarkan secara langsung atau memiliki pos khusus pada APBN, tetapi kondisi keuangan negara yang dalam kondisi baik setidaknya akan mempengaruhi keputusan pemberian bantuan khususnya alokasi jumlah bantuan yang akan diberikan kepada negara resipien.

²⁷⁴ *Ibid.* hal 69.

²⁷⁵ *Ibid.*

²⁷⁶ *Ibid.* hal 67.

5.1.2.2 *The Salience of the Disaster*

Perhatian publik internasional khususnya pemberitaan media terhadap bencana yang terjadi di negara resipien mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor kepada negara resipien merupakan hal dijelaskan oleh indikator ini. Secara politis, adanya perhatian dari publik internasional khususnya media berperan meningkatkan gengsi atau status negara donor di mata publik internasional. Semakin besarnya pemberitaan media terhadap suatu peristiwa bencana akan diikuti oleh semakin besarnya alokasi bantuan kemanusiaan dari negara donor.²⁷⁷ Hal tersebut tentunya akan membuat negara donor mendapatkan citra positif di mata publik internasional sebagai negara yang peduli atau memperhatikan isu kemanusiaan yang terjadi di luar wilayahnya.

Bencana Topan Winston yang melanda Fiji pada tahun 2016 merupakan bencana yang cukup menyita perhatian masyarakat internasional. Tercatat berbagai pihak baik negara maupun non-negara memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji dengan jumlah yang tidak bisa dibilang sedikit. Selain itu adanya perhatian tersebut juga dapat dilihat dari adanya pemberitaan dari pihak media cetak maupun elektronik. Tercatat berbagai media baik internasional maupun lokal Indonesia menjadikan bencana Topan Winston sebagai bahan pemberitaan mereka selama beberapa hari pasca bencana. Walaupun pemberitaan tersebut tidak sampai semasif dan menyeluruh seperti pemberitaan bencana Tsunami di Samudra Hindia tahun 2004 atau gempa bumi yang disertai oleh tsunami di Jepang pada tahun 2011.

Pemberitaan tersebut didominasi oleh kondisi Fiji pasca bencana Topan Winston. Terdapat beberapa media yang memberikan pemberitaan terkini yang terus

²⁷⁷ Drury, Olson, dan Van Belle, *Loc. Cit.*, hal. 458.

diperbaharui terkait dengan korban serta dampak kengerian serta kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut. Hampir seluruh pemberitaan media tersebut menyebutkan Topan Winston sebagai salah satu topan terparah yang pernah melanda kawasan Pasifik Selatan. Selain itu, datangnya bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak juga menjadi salah satu bahan pemberitaan oleh media.

Salah satu media yang cukup aktif menghadirkan pemberitaan terkait dengan kondisi pasca bencana Topan Winston adalah BBC. Pemberitaan tersebut dilakukan melalui siaran televisi, radio, serta portal berita yang dimiliki oleh media internasional asal Inggris tersebut. Selain menghadirkan berita mengenai kondisi korban dan kerusakan di Fiji pasca bencana Topan Winston, BBC juga menghadirkan pemberitaan terkait dengan bantuan kemanusiaan yang tiba di Fiji. Seperti pada salah satu pemberitaan BBC pada 21 Maret 2016 yang berjudul *Cyclone Winston: Aid arrives in Fiji* yang berisi tentang tibanya bantuan kemanusiaan dari Organisasi Non-Pemerintah asal Inggris ShelterBox.²⁷⁸ Kemudian BBC juga melakukan peliputan khusus pada proses penyaluran bantuan dari ShelterBox ke daerah terpencil di Fiji.²⁷⁹ Sedangkan untuk pemberitaan terkait dengan bantuan kemanusiaan Indonesia pasca bencana Topan Winston BBC sendiri menghadirkan pemberitaan khusus dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Bantu Fiji, Indonesia ingin redam gerakan pembebasan Papua”.²⁸⁰ Selain BBC beberapa media internasional lain yang ikut aktif dengan pemberitaan peristiwa bencana

²⁷⁸ BBC News, *Cyclone Winston: Aid Arrives in Fiji, 20 Maret 2016*, diakses dari: <http://www.bbc.com/news/av/world-asia-35858289/cyclone-winston-aid-arrives-in-fiji> pada 10 September 2017 pukul 17.30 WIB.

²⁷⁹ BBC News, *Aid Arrives on Remote Fijian Islands, 20 Maret 2016*, diakses dari: <http://www.bbc.com/news/av/world-asia-35858289/cyclone-winston-aid-arrives-in-fiji> pada 10 September 2017 pukul 17.40 WIB.

²⁸⁰ BBC News, *Bantu Fiji, Indonesia ingin redam gerakan pembebasan Papua, Loc Cit.*

Topan Winston di Fiji adalah Voice of America (VOA), Cable News Network (CNN), Australia Broadcasting Company (ABC) Australia, Radio New Zealand dan sebagainya walaupun tidak begitu aktif seperti apa yang dilakukan oleh BBC.

Media Australia dan Selandia Baru merupakan media internasional terdekat dengan Fiji atau berada dalam satu kawasan yang berdekatan. Media Australia dan Selandia Baru yang dimaksud disini adalah ABC Australia dan Radio New Zealand yang pemberitaannya didasari oleh nilai-nilai yang dianut oleh media dari negara - negara barat atau negara dunia pertama.²⁸¹ Media Australia dan Selandia Baru melakukan pemberitaan dengan mencerminkan dalam reportase Topan Winston adalah bencana alam dan perubahan iklim dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya bencana tersebut.²⁸² Radio New Zealand merupakan salah satu media yang cukup teratur melakukan pemberitaan terkait dengan tindak lanjut pasca bencana Topan Winston.²⁸³ Pemberitaan yang dilakukan oleh Radio New Zealand lebih mengarah pada minat manusia dan berpusat pada orang, pada saat bersamaan dapat dikatakan cukup informatif.²⁸⁴ Namun, beberapa laporan atau pemberitaan tersebut dapat dikatakan cukup singkat dan tidak mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan bencana tersebut. Untuk Australia sendiri terkait dengan pemberitaan ,media pasca bencana Topan Winston dapat dikatakan tidak begitu banyak atau malah sangat kurang.²⁸⁵ Banyak artikel tentang

²⁸¹ Robie, D, *Media and development in the Pacific: Reporting the why, how and what now*. 1 Januari 2008, diakses dari: https://www.academia.edu/750669/Media_and_development_in_the_Pacific_Reporting_the_why_how_and_what_now pada 10 September 2017 pukul 18.09 WIB.

²⁸² Pacific Media Center, *Fiji's TC Winston - how the media fared covering 'worst ever' Pacific cyclone*, 30 Juni 2016, diakses dari: <http://www.pmc.aut.ac.nz/articles/fijis-tc-winston-how-media-fared-covering-worst-ever-pacific-cyclone> pada 10 September 2017 pukul 18.30 WIB.

²⁸³
²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ *Ibid.*

informasi umum mengenai Winston. Tidak ada liputan yang signifikan tentang cerita yang berpusat pada orang. Juga, tidak ada artikel tentang kejadian Winston.

Untuk media lokal Indonesia sendiri pemberitaan mengenai bencana Topan Winston di Fiji tidak begitu banyak atau kurang begitu mendapatkan perhatian. Media-media lokal Indonesia tidak memberitakan peristiwa tersebut melalui liputan khusus. Pemberitaan yang dilakukan oleh media lokal Indonesia pun bukan pemberitaan dengan informasi yang menyeluruh. Pemberitaan yang dilakukan oleh media-media lokal Indonesia termasuk diantaranya adalah RRI dan LKBN Antara melalui laman www.antaraneews.com hanya sebatas info mengenai terjadinya bencana tersebut tanpa adanya pemberitaan lebih lanjut yang menyeluruh.

Pemerintah Indonesia tidak dapat dikatakan sepenuhnya dipengaruhi oleh media dalam pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji. Pemerintah Indonesia juga terlihat tidak secara khusus menonjolkan pemberian bantuan tersebut kepada publik khususnya media. Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Polhukam RI dan TNI AD hanya memberikan informasi secara resmi melalui siaran pers yang cukup singkat terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan tersebut. Tidak adasiatan pers khusus atau liputan tertentu yang dipublikasikan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan bencana Topan Winston di Fiji dan pemberian bantuan kemanusiaannya. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa pemberitaan media terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia pasca bencana Topan Winston di Fiji pada tahun 2016 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston tahun 2016.

Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya selain dengan pemberitaan media ini.

5.1.2.3 Current Donor Disasters

Indikator ini berbicara mengenai adanya kepekaan atau rasa empati yang menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pemberian bantuan dari negara donor kepada negara resipien. Rasa empati tersebut salah satunya muncul dari bencana yang sebelumnya pernah terjadi di negara donor. Bencana yang sebelumnya pernah terjadi di negara donor dapat meningkatkan rasa empati negara donor terhadap bencana yang terjadi di negara resipien yang juga diikuti oleh peningkatan jumlah bantuan kemanusiaan yang diberikan.²⁸⁶ Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki peran aktif sebagai donor bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang dilanda bencana atau krisis kemanusiaan di dunia. Namun, dibalik peran aktif tersebut Indonesia juga cukup sering menerima bantuan kemanusiaan atau menjadi negara resipien bantuan kemanusiaan. Hal tersebut merupakan eksekusi dari seringnya bencana yang terjadi di Indonesia, khususnya bencana dengan skala besar yang menimbulkan korban jiwa dalam serta kerugian material dalam jumlah besar.

Seringnya bencana yang terjadi bukanlah hal yang mengherankan bagi Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara dengan potensi atau ancaman bencana yang sangat tinggi. UN International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) atau Badan Pencegahan Bencana PBB pada tahun 2009 telah menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang masuk daftar negara yang

²⁸⁶ Drury, Olson, dan Van Belle, *Loc. Cit.*, hal. 459.

paling beresiko dilanda bencana.²⁸⁷ Kondisi geografis menjadi faktor utama yang membuat Indonesia berpotensi atau berada di bawah ancaman terjadinya bencana.

Secara geografis posisi wilayah Indonesia terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain itu terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang di bagian selatan dan timur Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa.²⁸⁸ Kondisi geografis tersebut tentunya mengakibatkan Indonesia memiliki potensi yang besar akan terjadinya bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor.

Kondisi geografis Indonesia yang telah dijelaskan diatas membuat sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah yang rawan akan terjadinya bencana. Menurut data yang berhasil dihimpun oleh BNPB sebanyak 148,4 juta penduduk tinggal di daerah rawan gempa bumi, 5 juta di daerah rawan tsunami, 1,2 juta penduduk di daerah rawan erupsi gunung api, 63,7 juta jiwa di daerah rawan banjir, serta 40,9 juta jiwa tinggal di daerah rawan tanah longsor.²⁸⁹ Selain itu di Indonesia terdapat 386 kabupaten/kota yang berada di zona bahaya sedang-tinggi gempa bumi, 233 kabupaten/kota berada di daerah rawan tsunami, 75

²⁸⁷ Vivanews.com, *Indonesia Negara Paling Beresiko Bencana*, 18 Juni 2009, diakses dari: <http://www.viva.co.id/berita/nasional/66838-indonesia-negara-paling-beresiko-bencana> pada 13 September 2017 pukul 04.15 WIB.

²⁸⁸ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Potensi dan Ancaman Bencana*, diakses dari: <https://bnpb.go.id/home/potensi> pada 13 September 2017 pukul 11.00 WIB.

²⁸⁹ Universitas Gadjah Mada (UGM), *Jutaan Penduduk Indonesia Tinggal di Kawasan Rawan Bencana*, 21 Februari 2017, diakses dari: <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13340-jutaan-penduduk-indonesia-tinggal-di-kawasan-rawan-bencana> pada 13 September 2017 pukul 12.08 WIB.

kabupaten/kota yang berada di bawah ancaman terjadinya erupsi gunung api, 315 kabupaten/kota berada di daerah bahaya sedang-tinggi banjir, serta 274 kabupaten/kota berada di daerah bahaya sedang-tinggi bencana tanah longsor.²⁹⁰

Frekuensi terjadinya bencana di Indonesia dihimpun oleh BNPB melalui Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang menjadi *database* atau pangkalan data utama peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Sepuluh tahun terakhir atau tepatnya pada tahun 2006-2015, BNPB berhasil mencatat 16.679 bencana yang terjadi di Indonesia.²⁹¹ Bencana tersebut terdiri dari bencana berskala kecil hingga bencana berskala besar yang terjadi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan jenis yang bervariasi. Selain itu BNPB juga mencatat kerugian material yang ditimbulkan oleh berbagai bencana yang terjadi di Indonesia jumlahnya dapat dikatakan cukup besar. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala BNPB, Willem Rampangilei dalam Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas), yang dihelat pada 30 Maret 2017 di Graha Lt. 15 Gedung BNPB, Jakarta, kerugian rata – rata yang harus ditanggung setiap tahunnya akibat terjadinya bencana di Indonesia mencapai Rp. 30 triliun.²⁹² Bencana alam dengan nilai kerugian hingga triliun rupiah itu adalah bencana yang rutin terjadi dan tidak menutup kemungkinan ada potensi kecenderungan bencana alam terus meningkat.²⁹³ Menurut Willem, ada beberapa faktor yang mendukung tingginya bencana alam terjadi, seperti laju degradasi lingkungan yang jauh lebih cepat

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*, *Loc. Cit.*

²⁹² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), *Kerugian Rp 30 Triliun/Tahun, Kepala BNPB: 150 Juta Warga Berada di Daerah Rawan Bencana, 30 Maret 2017*, diakses dari: <http://setkab.go.id/kerugian-rp-30-triliuntahun-kepala-bnpb-150-juta-warga-berada-di-daerah-rawan-bencana/>, pada 13 September 2017 pukul 18.01 WIB.

²⁹³ *Ibid.*

hingga tiga kali lipat dibandingkan upaya pemulihan. Selain itu cuaca hujan yang ekstrem dengan volume yang sama, namun datangnya lebih besar dengan periode yang singkat sehingga daya tampung sedikit.²⁹⁴

Gambar 5.4 Grafik Peristiwa Bencana di Indonesia Tahun 2006-2015



(Sumber diolah dari: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB))²⁹⁵

Beberapa peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia khususnya bencana dengan skala besar yang memberikan dampak kerugian begitu besar seringkali diikuti oleh pemberian bantuan kemanusiaan asing kepada Indonesia. Bantuan kemanusiaan asing tersebut diberikan oleh berbagai pihak baik negara maupun non-negara dalam berbagai bentuk. Salah satu bencana berskala besar dimana Indonesia menerima bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar baik Pasca bencana tersebut, dunia internasional menjanjikan Indonesia untuk menerima bantuan untuk

²⁹⁴ *Ibid.*

²⁹⁵ *Ibid.*



rekonstruksi dan pembangunan sebesar US\$ 7,2 miliar dan 65% dari total bantuan tersebut senilai US\$ 6,4 telah dialokasikan pada tahun 2007 oleh donor bantuan baik negara maupun non-negara.²⁹⁶

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia terlebih dengan frekuensi yang cukup sering membuat Indonesia merasakan berkali-kali merasakan berbagai dampak dari bencana tersebut termasuk menerima bantuan kemanusiaan. Hal ini secara tidak langsung telah menumbuhkan rasa empati Indonesia terhadap bencana yang terjadi di negara lain, khususnya negara yang memiliki hubungan cukup dekat atau negara sahabat. Dalam kasus pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016, seringkali frekuensi bencana terjadi di Indonesia memberikan pengaruh terhadap keputusan Indonesia memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji walaupun pengaruh tersebut tidak terlihat secara langsung.

5.1.3 Domestic Politics within the Potential Recipient State

Sub-variabel ini berbicara mengenai kondisi domestik dari negara resipien menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor kepada negara resipien. Kondisi tersebut merujuk pada kondisi politik secara keseluruhan serta pemerintahan yang sedang berjalan dari negara resipien.

Indikator yang digunakan untuk melakukan analisis terkait dengan faktor tersebut antara lain *recipient's level of corruption* dan *recipient's level of fractiousness*.

Kedua indikator tersebut yang kemudian akan penulis gunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan kondisi domestik Fiji yang mempengaruhi

²⁹⁶ Peter McCawley dan Sisira Jayasuriya, *The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction after a Disaster*, Cheltenham UK and Northampton MA USA: Edward Elgar, 2010, hal. 69.

pemberian bantuan kemanusiaan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

5.1.3.1 Recipient Level of Corruption

Indikator ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat aktivitas korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan negara resipien akan berimplikasi pada semakin kecilnya jumlah bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor.²⁹⁷ Karena semakin tinggi aktivitas korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan negara resipien memungkinkan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor jatuh ke pihak yang tidak semestinya. Fiji merupakan negara yang memiliki sejarah buruk yang berkaitan dengan tindakan korupsi di kalangan pejabat pemerintahan. Fiji dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di kawasan Pasifik Selatan, khususnya sebelum kudeta militer yang terjadi pada tahun 2006. Korupsi di kalangan pejabat pemerintahan merupakan masalah serius yang harus dihadapi oleh Fiji. Terdapat beberapa jenis aktivitas korupsi yang lazim dilakukan oleh pejabat pemerintahan Fiji, antara lain korupsi birokrasi, korupsi politik, nepotisme dan kronisme, pencucian uang dan kejahatan yang terorganisir, hingga korupsi besar-besaran yang melibatkan banyak pihak di dalam pemerintahan.²⁹⁸ Berbagai jenis aktivitas korupsi tersebut dilakukan secara sistematis dan terstruktur oleh pejabat pemerintahan dari tingkat terendah hingga tertinggi. Ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi hingga adanya kemungkinan untuk kabur diri dari jerat hukum menjadi faktor yang

²⁹⁷ Drury, Olson, dan Van Belle, Op. Cit., hal. 456.

²⁹⁸ Transparency International, *Anti Corruption Helpdesk, Providing on Demand Research to Help Fight Corruption, Corruption and Anti Corruption in Fiji*, Loc. Cit, hal. 2-4.

mendorong tumbuh suburnya aktivitas korupsi di kalangan pejabat pemerintahan di Fiji.²⁹⁹

Aktivitas korupsi yang sudah berlangsung lama dan mendarah daging di kalangan pejabat pemerintahan menjadi sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh pemerintah Fiji khususnya pasca kudeta militer pada tahun 2006.

Karena salah satu dari tujuan dilakukannya kudeta militer tersebut adalah untuk menggulingkan pemerintahan PM Laisenia Qarase yang terindikasi melakukan aktivitas korupsi.³⁰⁰ Pemerintahan baru pasca kudeta militer dibawah pimpinan

Panglima Tinggi RFMF, Josaqia Voreqe Bainimarama yang kemudian diangkat sebagai perdana menteri pada tahun 2007 memiliki fokus utama menghilangkan

aktivitas korupsi di kalangan pejabat pemerintahan di Fiji. Berbagai upaya kemudian dilakukan oleh pemerintahan PM Josaqia Voreqe Bainimarama untuk memberantas aktivitas korupsi di kalangan pejabat pemerintahan di Fiji. Salah satu

upaya tersebut adalah pembentukan Fiji Independent Commission Against Corruption (FICAC) pada tahun 2007 yang dan kemudian disahkan oleh konstitusi pada tahun 2013.³⁰¹ Komisi tersebut bertugas mencegah terjadinya aktivitas korupsi

serta melakukan investigasi secara mandiri terhadap kasus-kasus korupsi di Fiji.³⁰²

Tercatat sejak tahun 2007 hingga tahun 2016 telah membawa 336 terdakwa korupsi ke pengadilan.³⁰³ Dibentuknya FICAC kemudian menjadi tanda keseriusan dari

²⁹⁹ *Ibid.* hal. 3

³⁰⁰ BBC Indonesia, *Militer Fiji Lakukan Kudeta*, 5 Desember 2006, diakses dari: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/12/061205_fijicoup.shtml pada 14 September 2017 pukul 16.00 WIB.

³⁰¹ Transparency International, *Anti Corruption Helpdesk, Providing on Demand Research to Help Fight Corruption, Corruption and Anti Corruption in Fiji*, Loc. Cit, hal. 5.

³⁰² Fiji Independent Commission Against Corruption (FICAC), *About Us*, diakses dari: https://www.ficac.org.fj/about_us_ficac.php pada 14 September 2017 pukul 17.00 WIB.

³⁰³ Ashleen Kumar dan Sandhya Gounder, *Minimize Corruption: What Roles Can Various*

pemerintah Fiji memberantas aktivitas korupsi di kalangan pejabat pemerintah.

Kemudian pada tahun 2008, Fiji menjadi negara yang secara resmi menandatangani

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).³⁰⁴ Selain itu pemerintah

Fiji juga melakukan beberapa perubahan terhadap peraturan-peraturan domestik di

berbagai sektor untuk mempersempit celah-celah yang dapat digunakan oleh

pejabat pemerintahan untuk melakukan aktivitas korupsi.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Fiji di

kalangan pejabat pemerintahan khususnya melalui FICAC tidak selalu

mendapatkan hasil yang positif. Menurut data yang diperoleh penulis dari The

World Bank's WGI dimana salah satu indikatornya adalah *control of corruption*

atau kontrol pemerintah terhadap korupsi, skor yang diperoleh Fiji sejak tahun

2006-2016 bergerak secara fluktuatif atau turun naik dengan kecenderungan terus

mengalami kenaikan. WGI sendiri merupakan sebuah riset yang dilakukan oleh

World Bank untuk mengetahui bagaimana kualitas dari jalannya pemerintahan

suatu negara setiap tahunnya. WGI selain itu juga dapat digunakan untuk

memberikan gambaran perbandingan antarnegara dalam mengelola

pemerintahannya.

Actors of the Fijian Society Play? (pdf), International Journal of Science and Research (IJSR) Volume 6 Issue 4, 4 April 2017, hal 1483 diunduh dari: <https://www.ijsr.net/archive/v6i4/ART20172034.pdf> pada 14 September 2017 pukul 17.23 WIB.

³⁰⁴ Transparency International, Anti Corruption Helpdesk, *Providing on Demand Research to Help Fight Corruption, Corruption and Anti Corruption in Fiji, Loc. Cit.*

Tabel 5.3 Data Indikator *Control of Corruption* the World Bank's Worldwide Governance Index Fiji Tahun 2006-2016

Tahun	Jumlah Sumber yang Digunakan dalam Riset	Skor dalam Persentil (1-100)
2006	4	57.56
2007	4	56.31
2008	4	56.31
2009	4	44.02
2010	5	40
2011	5	54.5
2012	5	56.4
2013	5	54.5
2014	4	61.06
2015	4	62.02
2016	4	62.02

(Sumber: The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI),

Interactive Data Access: Fiji)³⁰⁵

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahan PM Josaqia Voreqe Bainimarama dapat dikatakan membuahkan hasil yang positif. Aktivitas korupsi di kalangan pejabat pemerintahan terus berkurang dan upaya menghilangkan celah-celah yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas korupsi masih terus dilakukan. Salah satu upaya tersebut adalah

³⁰⁵ The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI), *Interactive Data Access: Fiji*, diakses dari: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports> pada 14 September 2017 pukul 18.00 WIB.

mewujudkan transparansi anggaran di seluruh instansi pemerintah kepada masyarakat melalui pengembangan teknologi Open Budget Survey (OBS) Tracker.³⁰⁶

Berbagai upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Fiji sedikit banyak telah berhasil menurunkan tingkat aktivitas korupsi di kalangan pejabat pemerintahan. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan pasca bencana Topan Winston dari berbagai negara donor termasuk diantaranya adalah Indonesia. Terlihat bahwa pemerintah Indonesia memberikan kepercayaan kepada pemerintah Fiji terkait dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan, khususnya pada bantuan dalam bentuk dana yang diberikan langsung kepada pemerintah Fiji. Pemerintah Fiji yang kemudian akan mengelola dana bantuan tersebut agar efektif, tepat sasaran, serta jatuh ke tangan yang tepat atau ke pihak yang benar-benar membutuhkan.

5.1.3.2 Recipient Political Fractiousness

Asumsi yang diberikan oleh indikator ini adalah ketegangan atau kestabilan kondisi politik domestik dari negara resipien mempengaruhi keputusan dari negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya. Fiji memiliki sejarah sebagai salah satu negara dengan sejarah ketegangan kondisi politik domestik yang cukup tinggi atau dapat dikatakan tidak stabil. Hal tersebut ditandai oleh seringnya terjadi kudeta dan pembubaran parlemen di Fiji. Penyebab utama terjadinya ketidakstabilan kondisi politik domestik di Fiji adalah konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik tersebut pada dasarnya adalah konflik yang

³⁰⁶ Citizen Constitutional Forum, *Fiji is on the Right Path towards Budget Transparency*, 12 Februari 2015, diakses dari: <http://news.ccf.org.fj/fiji-is-on-the-right-path-towards-budget-transparency/> pada 14 September 2017 pukul 18.10 WIB.

lahir dari munculnya etnonasionalisme di tengah-tengah masyarakat Fiji. Konflik tersebut melibatkan penduduk asli atau pribumi dan penduduk pendatang dari etnis Hindustan atau India yang dahulu didatangkan oleh pemerintah kolonial Inggris sebagai tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan dengan jumlah yang cukup besar. Konflik antar etnis tersebut kemudian menimbulkan polarisasi etnis dan tindakan rasisme dengan adanya sebutan etnis Fiji untuk penduduk pribumi dan Indo-Fiji untuk penduduk pendatang etnis India.³⁰⁷ Adanya konflik antar etnis tersebut kemudian dijadikan alat yang efektif dalam menggerakkan massa untuk melakukan tindakan-tindakan politis, khususnya melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Sejak merdekanya negara tersebut pada tahun 1970, tercatat sudah terjadi empat kali terjadi kudeta terhadap pemerintah. Kudeta pertama terjadi pada 14 Mei 1987 yang beberapa bulan berselang tepatnya pada 12 September 1987 disusul oleh kudeta kedua. Baik kudeta pertama maupun kudeta kedua dilakukan oleh pihak militer dibawah pimpinan Letkol Sitiveni Rabuka. Kudeta tersebut dilakukan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan pemerintah sipil yang dipimpin oleh PM Timoci Uluivuda Bavadra. Pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan hasil dari Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 1987 menggantikan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh PM Ratu Sir Kamisese Mara. Kedua kudeta yang dilakukan oleh pihak militer tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksetujuan terhadap parlemen yang dianggap anggotanya didominasi oleh etnis Indo-Fiji.³⁰⁸

³⁰⁷ Michael C. Howard, *Fiji: Race and Politics in an Island State*, Vancouver: UBC Press, 1991, hal 19.

³⁰⁸ Jon Fraenkel, Stewart Firth, and Brij V. Lads (ed), *The 2006 Military Takeover in Fiji, a Coup to End All Coup*, Canberra: ANU E Press, 2009, hal 4.

Kudeta ketiga yang terjadi di Fiji berbeda dengan kudeta pertama dan kedua yang dilakukan oleh pihak militer. Kudeta ketiga yang terjadi pada 19 Mei 2000 dilakukan oleh pihak sipil yang dipimpin oleh pebisnis George Speight. Penyebab terjadinya kudeta tersebut masih sama seperti dua kudeta sebelumnya masih berkaitan dengan konflik antar etnis antara etnis dan etnis Indo-Fiji. Kudeta tersebut disebabkan oleh adanya agitasi politik dan kekhawatiran terhadap perampasan hak politik etnis Fiji akibat terpilihnya PM Mahendra Chaudry yang berasal dari etnis Indo-Fiji diusung oleh Partai Indo-Fiji.³⁰⁹ Pemerintahan PM Mahendra Chaudry sendiri terpilih dari pemilu yang dilakukan pada tahun 1999. PM Mahendra Chaudry merupakan perdana menteri pertama Fiji yang berasal dari etnis Indo-Fiji.

Kudeta keempat, yakni pada 5 Desember 2006 sedikit berbeda dengan kudeta-kudeta sebelumnya. Kudeta keempat dilakukan oleh pihak militer dibawah pimpinan Panglima Tinggi RFMF Josaqia Voreqe Bainimarama terhadap pemerintahan sipil dibawah pimpinan PM Laisenia Quarase. Kudeta tersebut disebabkan adanya ketidaksetujuan militer terhadap kebijakan dari pemerintahan PM Laisenia Quarase khususnya yang berkaitan dengan pemberian amnesti atau pengampunan terhadap pelaku kudeta di tahun 2000.³¹⁰ Selain itu pihak militer juga mengindikasikan adanya aktivitas korupsi di dalam pemerintahan PM Laisenia Quarase.³¹¹

Setelah kudeta keempat di tahun 2006, Panglima Tinggi RFMF Josaqia Voreqe Bainimarama tampil menjadi penguasa tunggal Fiji dan membentuk kabinet sementara berjumlah 13 orang sebelum akhirnya diangkat secara resmi sebagai

³⁰⁹ *Ibid.* hal. 124.

³¹⁰ BBC Indonesia, *Militer Fiji Lakukan Kudeta*, *Loc. Cit.*

³¹¹ *Ibid.*

perdana menteri pada 5 Januari 2007.³¹² Hal tersebut menandai jatuhnya Fiji ke dalam kekuasaan militer yang sebenarnya menyalahi konstitusi negara dan dilakukan tidak dengan proses yang demokratis. Oleh karena itu banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri yang menganggap pemerintahan Fiji yang dikuasai oleh rezim militer pimpinan Panglima Tinggi RFMF Josaqia Voreqe Bainimarama tersebut dianggap ilegal. Banyak pihak mengancam pengambilalihan kekuasaan melalui kudeta yang dilakukan oleh pihak militer tersebut. Kecaman tersebut tentunya memberikan berbagai dampak negatif bagi Fiji, salah satunya berkaitan dengan alokasi bantuan luar negeri yang diterima oleh Fiji. Tercatat beberapa donor bantuan luar negeri Fiji mengurangi hingga menghentikan alokasi bantuannya.³¹³ Salah satu diantaranya adalah Organisasi Negara-Negara Persemakmuran atau The Commonwealth Nations yang menghentikan alokasi bantuan luar negerinya kepada Fiji. Penghentian alokasi bantuan luar negeri kepada Fiji tersebut sebelumnya diikuti oleh dikeluarkannya Fiji dari keanggotaan The Commonwealth Nations pada tanggal 8 Desember 2006.³¹⁴ Selain dihentikannya alokasi bantuan luar negeri, Fiji juga tidak lagi memiliki hak untuk mengikuti acara-acara maupun pertemuan The Commonwealth Nations.³¹⁵ Selain the Commonwealth Nations, Pacific Island Forum (PIF) juga ikut mengeluarkan Fiji dari keanggotaan organisasi.

Pemerintahan Fiji dibawah rezim militer pimpinan Panglima Tinggi RFMF Josaqia Voreqe Bainimarama yang dianggap ilegal oleh berbagai pihak kemudian

³¹² Majalah Angkasa, Edisi Koleksi, *Kudeta Gerakan Ilegal Merebut Kekuasaan*, 2007, hal 65.

³¹³ Transparency International, *Anti Corruption Helpdesk, Providing On-Demand Research to Help Fight Corruption, Corruption and Anti Corruption in Fiji*, Loc. Cit, hal. 2.

³¹⁴ Derek Ingram dan Judith Soal, *Commonwealth Update*, The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs, Volume 96, Issue 388, Oktober 2007, 3-28, hal 4.

³¹⁵ The Commonwealth Secretariat, *Fiji Suspended from the Commonwealth*, 1 September 2009, diakses dari: <http://www.thecommonwealth.org/news/34580/213088/010909fijisuspended.htm> pada 14 September 2017 pukul 17.20 WIB.

melahirkan sebuah krisis politik. Krisis politik tersebut muncul pada tahun 2009 ketika Panglima Tinggi RFMF Josaqia Voreqe Bainimarama yang memegang jabatan perdana menteri menolak untuk melaksanakan pemilu. Hal tersebut kemudian diikuti oleh putusan hakim Pengadilan Banding Fiji secara resmi menyatakan kudeta yang dilakukan oleh Panglima Tinggi RFMF Josaqia Voreqe Bainimarama tidak sah karena tidak sesuai dengan konstitusi nasional Fiji. Hal tersebut pada akhirnya menjadi penyebab dikeluarkannya undang-undang darurat perang Fiji yang diberlakukan hingga tahun 2012. Pemberlakuan undang-undang darurat tersebut juga tak lepas dari kecaman dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Kecaman tersebut muncul akibat isi dari undang-undang tersebut yang membuat pemberitaan media di Fiji sangat dibatasi dan pertemuan-pertemuan publik dilarang.³¹⁶

Dihentikannya pemberlakuan undang-undang darurat perang kemudian diikuti oleh penyusunan konstitusi atau undang-undang baru yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Pada bulan September 2013, pada akhirnya konstitusi baru disahkan oleh pemerintah Fiji. Konstitusi baru tersebut diharapkan dapat mengakhiri krisis politik yang terjadi di Fiji termasuk mencegah terulang kembali kudeta terhadap pemerintah. Selain itu konstitusi ini diharapkan dapat mengakhiri konflik antar etnis antara etnis Fiji dan Indo-Fiji. Beberapa peraturan khususnya yang berkaitan dengan hak politik etnis Indo-Fiji yang dibatasi dihapuskan di konstitusi baru ini. Konstitusi tersebut juga dinilai sebagai bentuk kemajuan penting

³¹⁶ BBC Indonesia, *Fiji akan Cabut Undang-Undang Darurat*, *Loc. Cit.*

Fiji karena menyatakan komitmen Fiji untuk melaksanakan pemilu pada September 2014.³¹⁷

Setelah diberlakukannya konstitusi baru tersebut yang kemudian diikuti oleh Pemilu pada tahun 2014, kondisi politik di Fiji berangsur-angsur membaik.

Kondisi politik menjadi lebih stabil, konflik sosial antara etnis Fiji dan Indo-Fiji tidak lagi seperti sebelumnya. Fiji telah menjadi negara yang lebih demokratis dengan pemerintahan terpilih yang berjalan dengan baik serta diakui secara hukum maupun oleh rakyat. Pada Pemilu di tahun 2014, pemerintahan terpilih kembali dipimpin oleh Perdana Menteri Josaqia Voreqe Bainimarama. Namun, sebelum mencalonkan diri dan terpilih pada Pemilu tersebut Josaqia Voreqe Bainimarama telah mengundurkan diri dari militer. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi peraturan konstitusi baru yang tidak memperbolehkan militer menjadi anggota partai politik atau terlibat dalam aktivitas politik.³¹⁸ Kondisi politik yang stabil tersebut pada akhirnya berpengaruh positif terhadap hubungan internasional Fiji.

Fiji kembali menjadi anggota penuh dari The Commonwealth Nations pada tanggal 26 September 2016 setelah sebelumnya keanggotaan tersebut dicabut sejak tahun 2009.³¹⁹ Selain itu hubungan bilateral Fiji dengan beberapa negara, sebagai contoh Australia dan Selandia Baru kembali dinormalisasi setelah sebelumnya kurang baik akibat ketidakstabilan kondisi politik dalam negeri Fiji.

³¹⁷ ABC Radio Australia, *Australia Dukung Konstitusi Baru Fiji*, 26 Agustus 2013, diakses dari: <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-08-26/australia-dukung-konstitusi-baru-fiji/1181578> pada 14 September 2017 pukul 18.30 WIB.

³¹⁸ ABC News, *Fiji interim PM Frank Bainimarama to step down as military head to contest election*, 17 Juni 2014, diakses dari: <http://www.abc.net.au/news/2014-01-16/an-fiji-pm-frank-bainimarama-to-step-down-as-head-of-army/5203824> pada 14 September 2017 pukul 19.30 WIB.

³¹⁹ The Commonwealth, *Fiji: Constitution and politics*, diakses dari: <http://thecommonwealth.org/our-member-countries/fiji/constitution-politics> pada 14 September 2017 pukul 19.45 WIB.

Sama seperti *indikator recipient's level of corruption* salah satu riset yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kestabilan kondisi politik dalam negeri Fiji setiap tahunnya adalah the World Bank's WGI. Menurut data yang diperoleh penulis dari The World Bank's WGI dimana salah satu indikatornya adalah *political stability and absence of violence and terrorism* atau kestabilan politik serta absennya kekerasan dan terorisme.

Tabel 5.4 Data Indikator *Political Stability and Absence of Violence and Terrorism* the World Bank's Worldwide Governance Index Fiji Tahun 2006-2016

Tahun	Jumlah Sumber yang Digunakan dalam Riset	Skor dalam Persentil (1-100)
2006	3	43,48
2007	3	44.93
2008	3	41.83
2009	3	36.02
2010	3	38.86
2011	3	43.13
2012	3	42.18
2013	3	44.08
2014	3	64.29
2015	3	63.81
2016	3	73.81

(Sumber: The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI), Interactive Data Access: Fiji)³²⁰

³²⁰ The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI), *Interactive Data Access: Fiji*, Loc. Cit.



Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa skor yang diperoleh Fiji memperoleh skor terburuk pada tahun 2009 atau ketika munculnya krisis politik. Kemudian skor tersebut berhasil mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014. Dimana tahun tersebut Fiji berhasil melaksanakan pemilu yang berjalan dengan baik serta demokratis tanpa adanya isu etnosentrisme atau konflik antar etnis. Di tahun tersebut pula titik balik Fiji kembali menjadi negara demokratis setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 2006. Selain itu pada tahun 2014 juga hubungan internasional Fiji yang sempat kurang baik pasca kudeta militer dan krisis politik kembali normal seperti semula.

Indikator lain dari the World Bank's WGI yang dapat dijadikan rujukan untuk melihat kestabilan kondisi politik dalam negeri suatu negara adalah *rule of law* atau peran hukum. Peran hukum sendiri merujuk pada ketegasan atau implementasi dari aturan hukum yang ada. Adanya ketegasan hukum atau implementasi aturan hukum yang baik tentunya akan menciptakan kestabilan politik dalam negeri suatu negara.

Tabel 5.5 Data Indikator Rule of Law the World Bank's Worldwide Governance Index Fiji Tahun 2006-2016

Tahun	Jumlah Sumber yang Digunakan dalam Riset	Skor dalam Persentil (1-100)
2006	6	52.15
2007	6	32.54
2008	6	35.58
2009	7	26.54
2010	8	23.22
2011	8	23.47
2012	8	25.35
2013	7	22.54
2014	6	34.62
2015	6	40.38
2016	5	44.23

(Sumber: The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI),
Interactive Data Access: Fiji)³²¹

Terwujudnya kestabilan kondisi politik dalam negeri Fiji setelah sebelumnya berulang kali mengalami kudeta dan krisis politik merupakan sebuah capaian positif bagi Fiji. Selain itu hal penting lainnya yang juga menjadi capaian positif adalah upaya mengakhiri konflik antar etnis antara etnis Fiji dan Indo-Fiji melalui konstitusi baru tahun 2013. Upaya tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kestabilan politik dalam negeri Fiji mengingat konflik antar etnis menjadi

³²¹ The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI), *Interactive Data Access: Fiji*, *Loc. Cit.*

pemicu terjadinya kudeta dan krisis politik di Fiji. Semakin membaiknya kestabilan politik dalam negeri Fiji dari tahun ke tahun khususnya pasca diberlakukannya konstitusi baru di tahun 2013 dan pemilu di tahun 2014 memberikan pengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan pasca bencana Topan Winston dari berbagai negara donor termasuk diantaranya adalah Indonesia. Terlihat bahwa pemerintah Indonesia menaruh kepercayaan kepada pemerintah Fiji terkait dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan karena kestabilan politik dalam negeri Fiji yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sama seperti indikator sebelumnya, yakni *recipient's level of corruption*, indikator *recipient's political fractiousness* juga menjadi pertimbangan bagi negara donor dalam memberikan bantuan kemanusiaannya. Karena kestabilan kondisi politik dalam negeri dari negara resipien akan mempengaruhi proses penyaluran bantuan kemanusiaan dari negara donor, khususnya berkaitan dengan efektif serta tepat sasaran atau tidaknya proses penyaluran bantuan. Adanya kestabilan kondisi politik dalam negeri tentunya juga mempengaruhi proses koordinasi antara negara donor dan negara resipien khususnya berkaitan dengan bagaimana alur pemberian bantuan kemanusiaan hingga bantuan tersebut sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan.

5.2 Nonpolitical Factor

Selain faktor politik terdapat faktor lain yang menjadi variabel dalam konsep *the Politics of Humanitarian Aid*, yakni faktor non-politik Sama seperti faktor politik, faktor non-politik tersebut juga berpengaruh terhadap pemberian bantuan kemanusiaan yang diberikan dari negara donor terhadap negara resipien. Faktor non-politik merupakan faktor yang mempengaruhi negara donor khususnya dalam merumuskan atau mempertimbangkan alokasi bantuan kemanusiaan kepada

negara resipien seperti jenis bantuan, sasaran pemberian bantuan, serta proses pemberian bantuan. Indikator *type of disaster* atau jenis bencana yang terjadi di negara resipien menjadi satu-satunya indikator yang digunakan untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait faktor non-politik ini.

5.2.1 *Type of Disaster*

Indikator ini menjelaskan mengenai pengaruh jenis bencana yang terjadi terhadap pemberian bantuan kemanusiaan dari negara donor kepada negara resipien. Asumsi dari indikator ini adalah seberapa besar atau parah dampak dari bencana yang terjadi di negara resipien menentukan jumlah alokasi serta jenis bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara donor, semakin banyak korban serta kerugian akibat bencana maka dibutuhkan pula respon yang cepat dan tepat dari negara donor.³²² Penentuan tersebut berperan penting untuk menciptakan proses distribusi bantuan yang efektif dan efisien sehingga masyarakat di negara resipien dapat merasakan dampak dari bantuan tersebut secara maksimal.

Bencana Topan Winston yang melanda Fiji merupakan bencana yang dikategorikan sebagai bencana alam atau *natural disaster*. Bencana tersebut terjadi akibat dari aktivitas alamiah yang terjadi di perairan Samudera Pasifik. Bencana Topan Winston yang melanda Fiji merupakan salah satu bencana topan terbesar yang pernah melanda kawasan Fiji dan kawasan Pasifik Selatan.³²³ Sebagian besar wilayah Fiji porak-poranda rata dengan tanah. Ribuan bangunan rusak termasuk diantaranya adalah infrastruktur dan fasilitas umum yang memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat Fiji. Selain itu sektor pertanian dan pariwisata yang menjadi

³²² Drury, Olson, dan Van Belle, Loc. Cit, hal. 460.

³²³ Sky News, *Cyclone Winston 'strongest ever' to Hit Fiji*, Loc. Cit.

tulang punggung perekonomian Fiji juga tak luput dari kerusakan. Winston Dampak kerusakan yang begitu parah tersebut berhasil mencatatkan Topan Winston sebagai bencana dengan dampak kerugian finansial terbesar yang pernah melanda kawasan Pasifik Selatan. Ditaksir kerugian yang harus ditanggung akibat bencana Topan Winston mencapai angka \$470 atau mungkin lebih mengingat dampak kerusakan yang begitu besar.³²⁴

Indonesia pada bencana Topan Winston bukan memberikan bantuan kemanusiaan yang sifatnya jangka pendek untuk keperluan darurat pasca bencana atau *disaster relief*. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia merupakan bantuan yang sifatnya jangka menengah dan panjang untuk keperluan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Diberikannya bantuan kemanusiaan tersebut setelah lewat masa tanggap darurat yang berlangsung selama 30 hari pasca bencana menjadi salah satu indikasi bantuan tersebut bersifat jangka menengah dan panjang. Selain itu pengiriman Satgas Kizi TNI AD beserta bantuan logistik untuk melakukan rekonstruksi QVS juga mengindikasikan bantuan kemanusiaan Indonesia bersifat jangka menengah dan panjang. Diberikannya bantuan. Pemberian bantuan kemanusiaan yang bersifat jangka menengah dan panjang ini dikarenakan bantuan yang bersifat jangka pendek dari berbagai pihak baik negara maupun non-negara jumlahnya sudah cukup banyak. Kerusakan berbagai infrastruktur beserta fasilitas umum di Fiji juga ikut berpengaruh terhadap bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia. menurut Wakil Menlu RI A.M. Fachir, Indonesia sendiri melalui Menlu RI Retno Marsudi sebelum memberikan bantuan terlebih dahulu mengkonfirmasi bantuan kepada Menlu Fiji

³²⁴ International Business Time, *Loc. Cit.*

Ratu Inoke Kubuabola apakah yang dibutuhkan oleh Fiji.³²⁵ Selain itu, Indonesia juga melakukan koordinasi dengan Jepang untuk memperoleh informasi terkait dengan bantuan apakah yang dibutuhkan oleh Fiji.³²⁶ Langkah yang dilakukan oleh Indonesia tersebut bertujuan agar bantuan kemanusiaan pasca bencana Topan Winston yang diberikan kepada Fiji efektif dan tepat sasaran.

Indikator ini berhasil menunjukkan bahwa jenis bencana yang terjadi di negara resipien mempengaruhi bantuan kemanusiaan khususnya alokasi dan bentuk bantuan yang diberikan oleh negara donor. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang mengalokasikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji dalam bentuk dana tunai, bantuan logistik, serta pengiriman Satgas Kizi TNI AD untuk keperluan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Dipilihnya bentuk bantuan tersebut tentunya ikut dipengaruhi oleh kondisi di wilayah terdampak bencana yang juga dipengaruhi oleh jenis bencana yang terjadi. Seperti yang diketahui, setiap jenis bencana memiliki dampak, cara penanganan, serta kebutuhan bantuan yang berbeda satu sama lain.

5.3 Faktor Dominan yang Mempengaruhi Bantuan Kemanusiaan Indonesia Pasca Bencana Topan Winston pada Tahun 2016

Pada sub bab sebelumnya penulis telah melakukan analisis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 menggunakan variabel dan indikator yang dimiliki oleh konsep *the Politics of Humanitarian Aid* yang

³²⁵ Republika, *Indonesia Tunggu Konfirmasi Kebutuhan Bantuan untuk Fiji*, Loc. Cit.

³²⁶ Vivanews.com, *RI Tunggu Konfirmasi Jepang Terkait Bantuan Fiji*, 23 Februari 2017, diakses dari: <http://www.viva.co.id/berita/dunia/739375-ri-tunggu-konfirmasi-jepang-terkait-bantuan-fiji> pada 15 September 2017 pukul 12.13 WIB.

dikemukakan oleh Drury, Olson, dan Van Belle. Kemudian, pada sub bab ini penulis akan memberikan argumen berdasarkan hasil analisis terkait dengan faktor dominan yang mendasari Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

Terdapat beberapa faktor paling dominan yang mendasari kebijakan pemerintah Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Pertama, walaupun Indonesia dan Fiji bukanlah negara yang tergabung dalam satu aliansi tertentu, tetapi faktanya kedua negara memiliki hubungan yang cukup dekat. Fiji merupakan mitra terpenting bagi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu Fiji juga memiliki peran yang penting bagi kepentingan politik Indonesia di kawasan Pasifik Selatan termasuk di dalam organisasi regional kawasan dimana Indonesia tergabung di dalamnya. Fiji merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang konsisten memberikan dukungan terhadap Indonesia terkait dengan permasalahan Papua Barat dan bergabungnya Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Melanesia. Fiji secara tegas memberikan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia khususnya wilayah Papua Barat. Adanya kedekatan antara Fiji dan Indonesia ditambah dengan kepentingan politik Indonesia terkait Papua Barat merupakan salah satu hal yang ikut mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Hal tersebut dapat diindikasikan melalui pernyataan Menko Polhukam yang mengatakan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan wujud kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dan pada kesempatan yang sama akan dibicarakan pula mengenai permasalahan Papua Barat.

Kedua, rasa empati yang muncul akibat bencana-bencana sebelumnya terjadi di Indonesia mempengaruhi keputusan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan sudah berulang kali mengalami peristiwa bencana, termasuk bencana berskala besar yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar serta mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit pula. Selain itu, pada peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia khususnya bencana dengan skala besar, Indonesia juga ikut menerima bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak asing baik negara maupun non-negara dengan berbagai bentuk bantuan. Diluar berbagai kepentingan yang dibawa oleh pihak donor bantuan kemanusiaan, hal tersebut tentunya merupakan bentuk dari solidaritas serta tanggung jawab sebagai sesama manusia untuk saling membantu satu sama lain untuk meringankan beban pihak yang sedang berada dalam kondisi yang buruk seperti bencana. Melalui pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston, Indonesia mencoba untuk menunjukkan rasa solidaritas sesama manusia dan empati terhadap bencana yang terjadi di belahan dunia lainnya. Selain itu, secara tidak langsung pemberian bantuan tersebut juga dapat diartikan sebagai bentuk balas budi Indonesia atas bantuan kemanusiaan yang pernah diterimanya selama ini dari masyarakat dunia.

Ketiga, terkait dengan alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 dipengaruhi oleh jenis bencana yang terjadi, yakni bencana topan berskala besar. Dampak dari bencana topan berskala besar tersebut tidak hanya memakan korban jiwa saja. Bencana tersebut merupakan bencana yang mengakibatkan kerugian material

sangat besar. Banyak bangunan milik penduduk yang porak-poranda, begitupun dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang menunjang kehidupan sehari-hari penduduk Fiji seperti jaringan jalan, listrik, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

Untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan mengembalikan keadaan seperti semula tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama.

Oleh karena itu melihat pada kondisi tersebut Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan berupa dana tunai kepada Fiji yang kemudian diikuti oleh pengiriman bantuan logistik beserta pasukan Satgas Kizi TNI AD untuk keperluan rekonstruksi bangunan sekolah QVS yang rusak akibat bencana Topan Winston.

Sebelum mengirimkan bantuan kemanusiaan tersebut, Indonesia terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mengkonfirmasi kembali dengan pemerintah Fiji untuk mengetahui bantuan apakah yang dibutuhkan oleh korban bencana. Hal tersebut tentunya dilakukan oleh Indonesia untuk menciptakan alokasi serta proses distribusi bantuan kemanusiaan yang efektif dan tentunya tepat sasaran. Apa yang telah dilakukan oleh Indonesia tersebut telah sejalan dengan prinsip pemberian bantuan kemanusiaan secara umum yang mengutamakan koordinasi dengan pihak terkait sebelum melakukan pengiriman bantuan. Selain melakukan koordinasi dan mengkonfirmasi secara langsung dengan pihak terkait, Indonesia juga sebelumnya telah melakukan survey untuk mengetahui secara langsung seperti apa dampak dari bencana Topan Winston yang melanda Fiji pada tahun 2016.

Tiga indikator tersebut merupakan indikator paling dominan yang menjadi dasar bagi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Selain itu lebih lanjut juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan

dengan fokus alokasi di sektor-sektor tertentu terkait dengan analisis bencana yang terjadi tersebut.



BAB VI

KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian penulis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Melalui bab ini juga penulis akan memberikan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan konsep yang telah penulis gunakan dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga akan memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yang akan dilakukan dengan tema, fenomena, dan konsep yang sama dengan penelitian ini.

6.1 Kesimpulan

Terdapat beberapa hal yang menarik pada pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia pasca bencana Topan Winston di Fiji pada tahun 2016. Diantaranya adalah adanya pengaruh kepentingan politik Indonesia terkait dengan permasalahan Papua Barat pada pemberian bantuan tersebut, tingkat pembangunan dari Fiji sebagai negara resipien yang notabene berada di tingkatan yang lebih tinggi dari Indonesia sebagai negara donor, serta kurangnya perhatian publik Indonesia khususnya media lokal terhadap bencana Topan Winston di Fiji, dan empati Indonesia terhadap bencana Topan Winston di Fiji yang muncul dari bencana yang pernah melanda Indonesia sebelumnya. Penelitian ini membuktikan bahwa Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Fiji dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor politik maupun non politik.

Indonesia dan Fiji bukanlah negara yang tergabung dalam satu aliansi tertentu, tetapi faktanya kedua negara memiliki hubungan yang cukup dekat. Fiji

merupakan mitra terpenting bagi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. Selain itu Fiji juga memiliki peran yang penting bagi kepentingan politik Indonesia di kawasan Pasifik Selatan termasuk di dalam organisasi regional kawasan dimana Indonesia tergabung di dalamnya. Fiji merupakan negara di kawasan Pasifik Selatan yang konsisten memberikan dukungan terhadap Indonesia terkait dengan permasalahan Papua Barat dan bergabungnya Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Melanesia. Fiji secara tegas memberikan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia khususnya wilayah Papua Barat. Adanya kedekatan antara Fiji dan Indonesia ditambah dengan kepentingan politik Indonesia terkait Papua Barat merupakan salah satu hal yang ikut mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Hal tersebut dapat diindikasikan melalui pernyataan Menko Polhukam yang mengatakan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan tersebut merupakan wujud kehadiran Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dan pada kesempatan yang sama akan dibicarakan pula mengenai permasalahan Papua Barat.

Adanya kesamaan rezim pemerintahan yang dianut oleh negara resipien dengan negara donor tidak menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pemberian bantuan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Hal tersebut didasari oleh politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang tidak memandang latar belakang dan mencampuri urusan dalam negeri negara lain dalam menjalin hubungan termasuk dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan. Tidak berpengaruhnya kesamaan tersebut juga didukung oleh fakta bahwa Indonesia sebelumnya juga memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Korea Utara yang jelas memiliki latar belakang ideologi yang berbeda dengan Indonesia.

Tingkat pembangunan Fiji yang faktanya berada setingkat lebih tinggi daripada Indonesia tidak mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaan pasca bencana Topan Winston. Hal tersebut tentunya memberikan bukti yang bertentangan dengan salah satu asumsi konsep yang digunakan terkait dengan rendahnya tingkat pembangunan dari negara resipien yang berpengaruh terhadap keputusan negara donor memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia betul-betul memberikan bantuan kemanusiaannya atas dasar kemanusiaan tanpa melihat latar belakang tingkat pembangunan dari negara resipien bantuan. Hal tersebut juga dapat dilihat dari bantuan-bantuan sebelumnya yang telah diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara maju yang notabene tingkat pembangunannya jauh berada diatas Indonesia.

Menurunnya defisit APBN Indonesia pada tahun 2016 apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016. Walaupun bantuan luar negeri secara keseluruhan maupun bantuan kemanusiaan secara khusus tidak memiliki pos khusus di APBN Indonesia tetapi turunnya defisit tersebut tentunya juga ikut menjadi pertimbangan bagi Indonesia sebelum memberikan bantuan kemanusiaannya khususnya terkait alokasi jumlah bantuan yang akan diberikan. Selain itu adanya peningkatan anggaran dari KeMenko Polhukam selaku instansi yang berkepentingan dengan bantuan tersebut juga disinyalir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan tersebut khususnya terkait dengan alokasi bantuan.

Pemberitaan media terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia pasca bencana Topan Winston di Fiji pada tahun 2016 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston tahun 2016.

Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberitaan mengenai bencana Topan Winston khususnya di media lokal Indonesia yang tidak begitu masif termasuk pemberitaan mengenai bantuan yang diberikan oleh Indonesia sendiri. Selain itu terlihat juga bahwa pemerintah Indonesia tidak terlalu membesar-besarkan pemberitaan mengenai pemberian bantuan bencana Topan Winston kepada Fiji pada tahun 2016.

Rasa empati yang muncul akibat bencana-bencana sebelumnya terjadi di Indonesia mempengaruhi keputusan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana dan sudah berulang kali mengalami peristiwa bencana, termasuk bencana berskala besar yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar serta mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit pula. Selain itu, pada peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia khususnya bencana dengan skala besar, Indonesia juga ikut menerima bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak asing baik negara maupun non-negara dengan berbagai bentuk bantuan. Diluar berbagai kepentingan yang dibawa oleh pihak donor bantuan kemanusiaan, hal tersebut tentunya merupakan bentuk dari solidaritas serta tanggung jawab sebagai sesama manusia untuk saling membantu satu sama lain untuk meringankan beban pihak yang sedang berada dalam kondisi yang buruk seperti bencana.

Adanya upaya dari pemerintah Fiji untuk mengurangi tingginya tingkat korupsi menjadi salah satu hal yang mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji. Upaya tersebut tentunya menjadi pertimbangan bagi Indonesia sebelum memberikan bantuan kemanusiaannya.

Mengingat korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan negara resipien berpengaruh terhadap proses penyaluran bantuan kemanusiaan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Tingginya tingkat korupsi tersebut tentunya menjadi ancaman yang merugikan negara donor karena bantuan yang diterima oleh negara resipien tidak diterima sepenuhnya oleh pihak yang benar-benar membutuhkan.

Ketegangan politik dalam pemerintahan domestik Fiji akibat kudeta militer dan konflik horizontal antara etnis Fiji dan Indo-Fiji tidak lagi mempengaruhi Indonesia dalam memberikan bantuan kemanusiaannya kepada Fiji. Hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh adanya upaya dari pemerintah Fiji untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan semakin stabilnya kondisi politik domestik Fiji pasca diberlakukannya konstitusi baru pada tahun 2013 dan dilaksanakannya pemilu pada tahun 2014.

Alokasi bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 dipengaruhi oleh jenis bencana yang terjadi, yakni bencana topan berskala besar. Dampak dari bencana topan berskala besar tersebut tidak hanya memakan korban jiwa saja. Bencana tersebut merupakan bencana yang mengakibatkan kerugian material sangat besar. Banyak bangunan milik penduduk yang porak-poranda, begitupun dengan fasilitas umum dan infrastruktur yang menunjang kehidupan sehari-hari penduduk Fiji seperti jaringan jalan, listrik, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Untuk memperbaiki

kerusakan tersebut dan mengembalikan keadaan seperti semula tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu melihat pada kondisi tersebut Indonesia memutuskan untuk memberikan bantuan berupa dana tunai kepada Fiji yang kemudian diikuti oleh pengiriman bantuan logistik beserta pasukan Satgas Kizi TNI AD untuk keperluan rekonstruksi bangunan sekolah QVS yang rusak akibat bencana Topan Winston. Sebelum mengirimkan bantuan kemanusiaan tersebut, Indonesia terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mengkonfirmasi kembali dengan pemerintah Fiji untuk mengetahui bantuan apakah yang dibutuhkan oleh korban bencana. Hal tersebut tentunya dilakukan oleh Indonesia untuk menciptakan alokasi serta proses distribusi bantuan kemanusiaan yang efektif dan tentunya tepat sasaran.

6.2 Saran

Melalui sub bab ini penulis berupaya untuk memberikan beberapa saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya dengan tema dan fenomena yang serupa dengan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa penelitian yang penulis lakukan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian selanjutnya yang lebih baik dan mampu menjawab hal-hal yang belum terjawab dari penelitian ini. Pertama, penelitian yang penulis lakukan hanya berfokus pada satu tingkatan analisa atau *level of analysis*. Penulis hanya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan terkait pemberian bantuan kemanusiaan di *level of analysis* negara. Penulis sangat mengharapkan di kemudian hari terdapat penelitian terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan dengan *level of analysis* yang berbeda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh penulis belum mampu menjelaskan pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 secara komprehensif. Penelitian ini hanya berfokus pada sudut pandang politik. Oleh karena itu penulis berharap di kemudian hari terdapat penelitian selanjutnya terkait dengan faktor-faktor pemberian bantuan kemanusiaan yang tidak hanya melihat dari sudut pandang politik saja. Diharapkan terdapat penelitian selanjutnya yang melihat dari sudut pandang lain seperti ekonomi, keamanan, sosial, dan sebagainya. Kemudian dari jawaban yang berhasil dihimpun dari penelitian dengan berbagai sudut pandang yang berbeda tersebut diintegrasikan dengan penelitian ini. Melalui integrasi tersebut diharapkan akan hadir jawaban yang lebih komprehensif terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan Indonesia kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016.

Ketiga, penelitian yang penulis lakukan ini hanya berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada Fiji pasca bencana Topan Winston pada tahun 2016 yang dilakukan oleh Indonesia saja. Penulis mengharapkan di kemudian hari terdapat penelitian yang melihat bantuan kemanusiaan dari aktor-aktor lainnya pada bencana Topan Winston di Fiji pada tahun 2016. Karena penulis melihat Fiji merupakan negara yang strategis dan memiliki peran penting di kawasan Pasifik Selatan. Peran tersebut tentunya diikuti oleh banyaknya kepentingan negara lain di Fiji. Oleh karena itu, banyaknya kepentingan negara lain di Fiji, khususnya negara-negara yang ikut memberikan bantuan pada bencana Topan Winston tahun 2016 selain Indonesia. Negara-negara tersebut tentunya dapat dijadikan obyek penelitian dan dieksplorasi lebih jauh untuk melengkapi penelitian terkait dengan bantuan kemanusiaan pasca bencana Topan Winston di Fiji pada tahun 2016.

Keempat, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian yang secara khusus melakukan analisis terhadap isu spesifik bantuan kemanusiaan menggunakan konsep yang juga secara spesifik melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan kemanusiaan. Penulis mengharapkan di kemudian hari terdapat penelitian selanjutnya yang juga menggunakan konsep serupa untuk melakukan kajian terhadap bantuan kemanusiaan dilihat dari faktor-faktor politik yang mempengaruhinya. Penelitian tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan penelitian tentang bantuan kemanusiaan yang banyak diberikan oleh negara dengan tren yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Selain itu diharapkan juga, penelitian selanjutnya dapat memberikan sumbangsih lebih pada studi Hubungan Internasional khususnya mengenai bantuan luar negeri secara keseluruhan maupun bantuan kemanusiaan secara spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alami, A. N. (2008). Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia. Dalam G. W. (ed), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik* (hal. 26-54). Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P LIPI.
- Elisabeth, Adriana. (2016). *Grand Design Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2025)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Greg Fry, S. T. (2015). *The New Pacific Diplomacy, 2015*. Canberra: Australian National University Press.
- Holsti, K. (1977). *K.J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, Third Edition*,. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Howard, M. C. (1991). *Fiji: Race and Politics in an Island State*. Vancouver: UBC Press.
- Jon Fraenkel, S. F. (2009). *The 2006 Military Takeover in Fiji, a Coup to End All Coup*. Canberra: ANU E Press.
- Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI). (2011). *Indonesia dan Kerjasama Selatan-Selatan*. Jakarta: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.
- Lancaster, C. (2007). *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Maarif, S. (2013). Penanggulangan Bencana Sebagai Diplomasi Soft Power Indonesia. dalam L. M. June Cahyaningtyas, *Isu Bencana dalam Hubungan Internasional* (hal. 1-9). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mawi, Fiji's (2015). Emerging Brand of Pacific Diplomacy: A Fiji Government Perspective, dalam Greg Fry dan Sandra Tarte (ed), *The New Pacific Diplomacy*, Canberra: National University Press.
- Nye, Joseph. (2009). *Understanding International Conflict, An Introduction to Theory and History 7th Ed.*, New York: Pearson Longman.
- Peter McCawley, S. J. (2010). , *The Asian Tsunami: Aid and Reconstruction after a Disaster*. Cheltenham UK and Northampton MA USA.: Edward Elgar.
- Sarippudin, M. H. (2013). *Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Pasifik Selatan: Menimbang Etnis Melanesia dalam Diplomasi Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.
- Sharma, P. (2004). *Sistem Demokrasi yang Hakiki*. Jakarta: Yayasan Menara Ilmu.
- Sukardi. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Team Dokumentasi Presiden RI. (2003). Dalam G. Dwipayana dan Nazarudin Sjamsudin (ed.). *Jejak Langkah Pak Harto 16 Maret 1983 – 11 Maret*. Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda.

Ujan A.A. dkk. (2008). *Pancasila Sebagai Etika Sosial Politik Bangsa Indonesia*. Jakarta: MPK Universitas Atma Jaya

Wisadirana, D. (2005). *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UMM Press.

Zainuddin Djafar, R. A. (2013). *Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global: Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono*. Bandung: Pustaka Jaya.

Jurnal

A. Cooper Drury, R. S. (2005). The Politics of Humanitarian Aid: US Foreign Disaster Assistance 1964-1995. *The Journal of Politics*, 454-473.

Ashleen Kumar S. G. (2017, April 4). Minimize Corruption: What Roles Can Various Actors of the Fijian Society Play?. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 6(4), 1483-1485. Diakses dari <https://www.ijsr.net/archive/v6i4/ART20172034.pdf> pada 14 September 2017.

Ari Rahmat Hidayat, A. K. (2013). Bantuan Beras ke India pada Tahun 1946. *Jurnal Avatara*, 78-83.

Blades, J. (2014). Melanesia's Test: The Political Quandary of West Papua. *Pacific Journalism Review*, 20(2), 23-39.

Chris J. Dolan, A. J. (2016). Calculation of Goodwill: Humanitarianism, Strategic Interest, and the US Response to Typhoon Yolanda. *Global Security and Intelligence Studies*, 2(1), 33-61.

Derek Ingram, J.S. (2007, October). The Commonwealth Update. *The Commonwealth Journal of International Affairs*, 96(388), 3-28.

Morgenthau, H. (1962). A Political Theory of Foreign Aid. *The American Political Science Review*, No. 2, 301-309. Diakses Januari 25, 2017, dari <http://www.jstor.org/stable/1952366>

Neumayer, E. (2005, April 3). Is the Allocation of Food Aid Free from Donor Interest Bias? *The Journal of Development Studies*, 41(3), 394-411. Diambil kembali dari <http://eprints.lse.ac.uk/16689/>

Radelet, S. (2006, Juli). A Primer on Foreign Aid. *Center for Global Development Working Paper Number 92(92)*, 1-24. Diakses Januari 25, 2017, dari https://www.cgdev.org/sites/default/files/8846_file_WP92.pdf

Sinulingga, Anita Afriani. (Mei 1, 2016). Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional. *Andalas Journal of International Studies*, 5(1), 17-29.

Dokumen

Joint Chiefs of Staff United States of America, pada 21 Maret 2017. (2014, Januari 2014). *Foreign Humanitarian Aid, 03 January 2014 (Revision)*, hal I-6. Diakses Maret 21, 2017, dari *Foreign Humanitarian Aid, 03 January 2014 (Revision)*, hal I-6. www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp3_29.pdf

Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI). (2016). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kewedukaran Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri*. Diakses Juli 20, 2017, dari Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI): https://polkam.go.id/konten/unggah/2017/07/Lakin_Deputi_II_Tahun_2016.pdf

Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI). (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja KeMenko Polhukam 2016*. Diakses September 12, 2017, dari Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI): https://polkam.go.id/konten/unggah/2017/07/Lakip_Kemenko_Polhukam_Tahun_2016.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). (2017, Maret 7). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016*. Diakses April 15, 2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI): <https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/laporan-kinerja-kementerian-keuangan-2016>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). (2006). Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI): Jakarta.

Republik Indonesia. (1945). Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. (2011). *Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of Fiji on the Framework for Development Cooperation*. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. (2016). *Memorandum Saling Pengertian antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kantor Pemilihan Fiji Tentang Kerja Sama dalam Manajemen Pemilihan Umum*. Sekretariat Negara: Jakarta.

Transparency International. (2013). *Anti Corruption Helpdesk, Providing On-Demand Research to Help Fight Corruption, Corruption and Anti Corruption in Fiji*. Diakses April 30, 2017 dari Transparency International: https://www.transparency.org/files/content/corruptiongas/Overview_of_corruption_and_anti_corruption_in_Fiji.pdf

United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA). (2016, Februari 21). *Fiji: Severe Tropical Cyclone Winston Situation Report No. 1 (as of 21 February 2016)*. Diakses Januari 21, 2017, dari ReliefWeb: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_tc_winston_sit_rep_1.pdf

United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA). (2016, Maret 4). *Fiji Flash Appeal Tropical Cyclone Winston, February-May 2016*. Diakses Januari 21, 2017, dari ReliefWeb: <http://reliefweb.int/report/fiji/fiji-flash-appeal-tropical-cyclone-winston-february-may-2016>

Surat Kabar dan Majalah

Majalah Angkasa. (2007). *Kudeta Coup d'Etat Gerakan Ilegal Merebut Kekuasaan*. Majalah Angkasa Edisi Koleksi No. 37 2007.

Mauludiah, Siti Nugraha. (2014). *Budir's Note*. Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI): Kemana Larinya Bantuan Luar Negeri Kita. Edisi No. 1 1 Juni 2014.

Ramadhan, Arief Ilham. (2014). *Pembangunan Kapasitas Dua Arah*, Buletin Jendela Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI): Kemana Larinya Bantuan Luar Negeri Kita. Edisi No. 1 1 Juni 2014.

Internet

Antara News. (2016, Juni 5). *Palestina Prioritas Pertama Bantuan Teknik Indonesia*. Diakses Juli 18, 2017, dari Antara News: <http://www.antarane.ws.com/berita/437529/palestina-prioritas-penerima-bantuan-teknik-indonesia>

Antara Sultra. (2014, Juni 5). *Indonesia Jadi Negara Pemberi Bantuan*. Diakses Juli 18, 2017, dari Antara Sultra: <http://www.antarasultra.com/berita/272045/Kemenlu-indonesia-jadi-negara-pemberi-bantuan>

Antarane.ws.com. (2014, Juni 19). *RI-Fiji Perkuat Kerjasama Kelautan dan Perikanan*. Diakses Juli 21, 2017, dari Antarane.ws.com: <http://www.antarane.ws.com/print/439900/ri-fiji-perkuat-kerjasama-kelautan-dan-perikanan>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2016, Juni 7). *Indonesia dan Fiji Jalin Kerjasama Penanggulangan Bencana*. Diakses Maret 1, 2017,

dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB):
<http://bnpb.go.id/home/detail/2966/Indonesia-dan-Fiji-Jalin-Kerjasama-Penanggulangan-Bencana>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI)*. Diakses April 15, 2017, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Potensi dan Ancaman Bencana*. Diakses September 12, 2017, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): <https://bnpb.go.id/home/potensi>

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Sejarah, Visi, dan Misi BNPB*. Diakses Juli 22, 2017, dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): <https://www.bnpb.go.id/home/sejarah>

BBC Indonesia. (2012, Januari 2). *BBC Indonesia, Fiji akan Cabut Undang-Undang Darurat, 2 Januari 2012, diakses dari*. Diakses September 14, 2017, dari BBC Indonesia: http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/120102_fijilaw

BBC Indonesia. (2006, Desember 5). *Militer Fiji Lakukan Kudeta*. Diakses September 14, 2017, dari BBC Indonesia: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/12/061205_fijicoup.shtml

Central Intelligence Agency (CIA). (2017, Juni 30). *The World Factbook: Fiji*. Diakses Juli 20, 2017, dari Central Intelligence Agency (CIA) Gov. Library The World Factbook: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fj.html>

Citizen Constitutional Forum. (2015, Februari 12). *Fiji is on the Right Path towards Budget Transparency*. Diakses September 14, 2017, dari Citizen Constitutional Forum: <http://news.ccf.org.fj/fiji-is-on-the-right-path-towards-budget-transparency/>

CNN Indonesia. (2017, Februari 17). *Pastor John: Soal Papua Pemerintah Tidak Bisa Terus Menyangkal*. Diakses September 12, 2017 dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217132855-20-111535/pastor-john-soal-papua-pemerintah-tak-bisa-terus-menyangkal/>

CNN Indonesia. (2016, April 2016). *Pesan Luhut ke Pasifik Selatan: Papua Milik Indonesia*. Diakses Januari 2017, 2016, dari CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160404073157-20-121435/pesan-luhut-ke-pasifik-selatan-papua-milik-indonesia/>

CNN Indonesia. (2016, April 1). *Tiba di Fiji, Rombongan Luhut Bawa Bantuan Senilai US\$5 Juta*. Diakses Januari 21, 2017, dari CNN Indonesia:

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330192051-20-120642/tiba-di-fiji-rombongan-luhut-bawa-bantuan-senilai-us-5-juta/>

Detiknews, (2017, September 29). *Bertemu Menhan Fiji, Ryamizard Teken Kerja Sama Bidang Pertahanan*. Diakses Oktober 30,; 2017, dari Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-3663285/bertemu-menhan-fiji-ryamizard-teken-kerja-sama-bidang-pertahanan>

Deutsche Welle (DW). (2017, Maret 2). *7 Negara Pasifik Desak PBB Selidiki Pelanggaran HAM di Papua*, Diakses Oktober 30, 2017, dari Deutsche Welle: <http://www.dw.com/id/7-negara-pasifik-desak-pbb-selidiki-pelanggaran-ham-di-papua/a-37777030>

Embassy of the Republic Fiji for Indonesia and Singapore. *Welcome to the Fiji Embassy*,. Diakses Juli 21, 2017, dari Embassy of the Republic Fiji for Indonesia and Singapore: <http://www.fijiembajak.com/en/site/pages/home>

Fiji Broadcasting Corporation. (2015, Mei 25). *Fijian PM Supports Indonesia's Move to Become MSG Associate Member*. Diakses April 18, 2017, dari Fiji Broadcasting Corporation: <http://www.fbc.com.fj/fiji/29766/fijian-pm-supports-indonesia%E2%80%99s-move-to-become-msg-associate-member>

Fiji Independent Commission Against Corruption (FICAC). *About Us*. Diakses September 14, 2017, dari Fiji Independent Commission Against Corruption (FICAC): https://www.ficac.org.fj/about_us_ficac.php

Fiji Sun Online. (2016, Februari 22). *26 Staff Quarters, Eight Classrooms Damaged*. Diakses Juli 20, 2017, dari Fiji Sun Online: <http://fijisun.com.fj/2016/02/22/26-staff-quarters-eight-classrooms-damaged/>

Fiji TV. (2016, Agustus 3). *Highest Level of Production Losses Expected in Agriculture*. Diakses Juli 28, 2017, dari Fiji TV: <http://fijione.tv/highest-level-of-production-losses-expected-in-agriculture/>

Fijivillage.com. (2016, April 1). *Indonesian Defense Force to Rebuild QVS*. Diakses Januari 21, 2017, dari Fijivillage.com: <http://fijivillage.com/news/Indonesian-Defense-Force-to-rebuild-QVS-2krs95>

Global Humanitarian Assistance. *Defining Humanitarian Assistance*. Diakses April 1, 2017, dari Global Humanitarian Assistance: <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/>

Government of the Republic Fiji, Ministry of Foreign Affairs. (2011, Mei 21). , *Press Release: Fiji-Indonesia Sign Development Cooperation Agreement*. Diakses Juli 21, 2017, dari Government of the Republic Fiji, Ministry of

Foreign Affair: <http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-publications/media-release/350-fiji-indonesia-sign-development-cooperation-agreement>

Government of the Republic of Fiji, Ministry of Foreign Affairs, *Media Release: Fiji Embassy in Indonesia to Open*. (2011, Maret). Diambil kembali dari <http://www.foreignaffairs.gov.fj/media-resources/media-release/417-fiji-embassy-in-indonesia-to-open>

Ilmu Geografi. (2016, Januari 15). *Lima Penyebab Angin Topan dan Cara Penanggulangannya*. Diakses April 20, 2017, dari Ilmu Geografi: <http://ilmugeografi.com/fenomena-alam/penyebab-angin-topan>

International Business Time. (2016, Maret 8). *Cyclone Winston: Fiji's Estimated Cost of Damages Exceeds \$470M*. Diakses Januari 21, 2017 dari International Business Time: <http://www.ibtimes.com/cyclone-winston-fijis-estimated-cost-damages-exceeds-470m-10-island-nations-total-gdp-2332151>

JPPN.COM. (2017, September 3). *DPR Berharap Langkah Indonesia Jadi Contoh Negara Lain*, Diakses September 3, 2017, dari: JPPN.COM <https://www.jpnn.com/news/dpr-berharap-langkah-indonesia-jadi-contoh-negara-lain>

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea. (2012, Oktober 12). *Pelabuhan Nampho: Kedatangan Bantuan Indonesia untuk Korea Utara*. Diakses September 13, 2017, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Pyongyang, Republik Demokratik Rakyat Korea: <http://www.Kemenlu.go.id/pyongyang/id/arsip/siaran-pers/Pages/PELABUHAN-NAMPHO-KEDATANGAN-BANTUAN-INDONESIA-UNTUK-KOREA-UTARA.aspx>

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Republik Fiji. (2015, September 4). *Pertemuan JMC Pertama Indonesia-Fiji 2015, Sepakat Tingkatkan Kerjasama Ekonomi*. Diakses Januari 22, 2017, dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Republik Fiji: <http://www.Kemenlu.go.id/suva/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Pertemuan-JMC-Pertama-Indonesia-Fiji-2015-Sepakat-Tingkatkan-Kerja-Sama-Ekonomi.aspx>

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Republik Fiji. (2017, Juli 22). *Tentang Perwakilan*. Diambil kembali dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suva, Republik Fiji: <http://www.Kemenlu.go.id/suva/Pages/CountryProfile.asp>

Kedutaan Besar Ukraina di Republik Indonesia. (2015, Maret 11). *Indonesia Berikan Bantuan Kemanusiaan (Dalam Bahasa Indonesia)*. Diakses Juli 20, 2017, dari Kedutaan Besar Ukraina di Republik Indonesia, :

<http://indonesia.mfa.gov.ua/id/press-center/publications/3567-indonezija-nadaje-gumanitarnu-dopomogu>

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Politik Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI). (2016, Maret 31). *Menko Polhukam Memulai Rangkaian Kunjungan ke Fiji dan Papua Nugini*. Diakses Januari 21, 2017, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Politik Republik Indonesia: <https://polkam.go.id/menko-polhukam-memulai-rangkaian-kunjungan-ke-fiji-dan-papua-nugini/>

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI). (2016, Maret 31). *Menko Polhukam Bertemu Perdana Menteri Fiji dan Menyampaikan Bantuan Pemerintah Indonesia*. Diakses Januari 21, 2017, dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (KeMenko Polhukam RI): https://polkam.go.id/Menko_Polhukam-bertemu-perdana-menteri-fiji-dan-menyampaikan-bantuan-pemerintah-indonesia/

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). (2012, Juni 4). *Kerjasama Teknik*. Diakses Juli 18, 2017, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI): <http://www.Kemenlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Kerjasama-Teknik.aspx>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI). (2013, November 7). *Program Magang bagi Petani Fiji untuk Memperluas dan Meningkatkan Kerjasama RI-Fiji di Bidang Pertanian*. Diakses Juli 21, 2017, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI): <http://www.Kemenlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Program-magang-bagi-Petani-Fiji-untuk-memperluas-dan-meningkatkan-kerjasama-RI-Fiji-bidang-pertanian.aspx>

Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI). (2012, Mei 4). *Menteri KKP Akan Buka Program Pelatihan Bidang Perikanan dari Pemerintah Indonesia untuk Negara-Negara di Asia, Pasifik, dan Afrika serta Anggota MSG*. Diakses Juli 21, 2017, dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI): <http://www.Kemenlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Menteri-KKP-Akan-Buka-Program-Pelatihan-Bidang-Perikanan-dari-Pemerintah-Indonesia-untuk-Negara-Nega.aspx>

Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI). (2014, Desember 16). *Kerjasama Teknik, RI Berikan Asistensi Pada MSG*. Diakses Juli 21, 2017, dari Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI): <http://Kemenlu.go.id/Pages/NewsKemenlu.aspx?IDP=506&l=id>

Kompas.com. (2011, Oktober 24). *Indonesia Bantu 3,1 Juta Dollar AS*. Diakses September 12, 2017, dari Kompas.com:

<http://nasional.kompas.com/read/2011/10/24/17111544/Indonesia.Bantu.3.1.Juta.Dollar.AS>

Kompas.com. (2017, Januari 3). *Defisit APBN 2016 Mencapai Rp 307,7 Triliun*. Diakses April 15, 2017, dari Kompas.com: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/03/171500026/defisit.apbn.2016.mencapai.rp.307.7.triliun>

Kompas.com, (2017, September 29). *Tolak Kemerdekaan Papua, Alasan Indonesia Kerja Sama dengan Fiji*. Diakses Oktober 30, 2017, dari Kompas.com: <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/29/12332471/tolak-kemerdekaan-papua-alasan-indonesia-kerja-sama-dengan-fiji>

Koran Jakarta. (2017, Juli 31). *Defisit APBN Meningkat, Negara Makin Bergantung Utang*. Diakses September 12, 2017, dari Koran Jakarta: <http://www.koran-jakarta.com/defisit-apbn-meningkat--negara-makin-bergantung-utang/>

Koran Sindo. (2016, Juli 3). *Jadikan Indonesia Negara Donor*. Diakses Juli 18, 2017, dari Koran Sindo: [http://koran-sindo.com/page/news/2016-07-03/0/10/Jadikan Indonesia Negara Donor](http://koran-sindo.com/page/news/2016-07-03/0/10/Jadikan%20Indonesia%20Negara%20Donor)

Lowy Institute: The Interpreter. (2014, September 14). *Fiji's Election and Australia: The Terms of Re-engagement* Diakses 12 September 2017, dari Lowy Institute: The Interpreter <https://www.lowyinstitute.org/publications/fiji-s-election-and-australia-terms-re-engagement>

Lowy Institute: The Interpreter. (2010, Juni 25). *Fiji: Limits to Look North Policy*. Diakses Juli 21, 2017, dari Lowy Institute: The Interpreter: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/fiji-limits-look-north-policy>

Maritim News. (2016, Maret 25). *Jalankan Misi Kemanusiaan, Letkol Laut (P) Salim akan Pimpin Delegasi RI Berangkat Menuju Fiji*. Diakses Juli 21, 2017, dari Maritim News: <http://maritimnews.com/jalankan-misi-kemanusiaan-letkol-laut-p-salim-akan-pimpin-delegasi-ri-berangkat-menuju-fiji/>

Media Indonesia. (2016, Februari 23). *Turis Asing Tinggalkan Fiji*. Diakses Juli 28, 2017, dari Media Indonesia: <http://www.mediaindonesia.com/news/read/30106/turis-asing-tinggalkan-fiji/2016-02-23>

Ministry of Agriculture Fiji. (t.thn.). *\$208.3 Million of damages recorded for Agriculture Sector*. Diakses Juli 28, 2017, dari Ministry of Agriculture Fiji: <http://www.agriculture.gov.fj/index.php/newsroom/press-releases?id=408>

National Coordination Team on South-South Cooperation and Triangular of Indonesia. (2015). *Indonesia Profile SSTC & Info*. Diakses Juli 18, 2017, dari National Coordination Team on South-South Cooperation and

Triangular of Indonesia: http://ssc.indonesia.org/ksst/indexca35.html?page_id=1208

National Geographic Indonesia. (2016, September 23). *Topan, Badai, Siklon, Apa Bedanya?* Diakses Januari 21, 2017, dari National Geographic Indonesia: <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/09/topan-badai-siklon-apa-bedanya>

News Okezone. (2014, Juni 5). *Indonesia Mulai Berperan Sebagai Negara Pemberi Bantuan.* Diakses Juli 18, 2017, dari News Okezone: <https://news.okezone.com/read/2014/06/05/411/994417/indonesia-mulai-berperan-sebagai-negara-pemberi-bantuan>

News Okezone. (2014, Juni 5). *Keuntungan Indonesia Menjadi Negara Donor, 5 Juni 2014, diakses dari.* Diakses Juli 18, 2017, dari News Okezone: <https://news.okezone.com/read/2014/06/05/411/994440/keuntungan-indonesia-menjadi-negara-donor>

News.com.au. (2016, Februari 22). *Australians Stuck in Fiji after Cyclone Winston.* Diakses Juli 28, 2017, dari News.com.au: <http://www.news.com.au/travel/travel-updates/warnings/australians-stuck-in-fiji-after-cyclone-winston/news-story/66ea1078ce05282b43adab702b2cf477>

Radio Australia, Australia Broadcasting Corporation (ABC). (2013, Agustus 26). *Australia Dukung Konstitusi Baru Fiji.* Diakses September 14, 2017, dari Radio Australia, Australia Broadcasting Corporation (ABC): <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-08-26/australia-dukung-konstitusi-baru-fiji/1181578>

Radio Australia, Australia Broadcasting Corporation (ABC). (2015, Juli 20). *5 Hal yang Perlu Diketahui Mengenai Papua Barat.* Diakses April 16, 2017, dari Radio Australia, Australia Broadcasting Corporation (ABC): <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2015-07-20/5-isu-yang-perlu-diketahui-mengenai-papua-barat/1471074>

Radio Australia, Australia Broadcasting Corporation (ABC). (2016, Februari 22). *Badai Tropis Winston Porak-porandakan Fiji.* Diakses Juli 28, 2017, dari Radio Australia, Australia Broadcasting Corporation (ABC): <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2016-02-22/badai-tropis-winston-porakporandakan-fiji/1550616>

Radio New Zealand. (2014, Januari 10). *Indonesia helps fund MSG Police Academy.* Diakses Juli 21, 2017, dari Radio New Zealand: <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/233013/indonesia-helps-fund-msg-police-academy>

Radio New Zealand. (2016, Februari 26). *Winston Inflicts Significant Blow to Fiji's Economy.* Diakses April 15, 2017, dari Radio New Zealand:

<http://www.radionz.co.nz/international/programmes/datelinepacific/audio/201790832/winston-inflicts-significant-blow-to-fiji's-economy>

Radio New Zealand. (2016, April 1). *Pacific Churches Warn about Indonesian Conditional Aid*. Diakses September 12, 2017 dari: <http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/300351/pacific-churches-warn-about-indonesian-conditional-aid>

Republika. (2016, Februari 23). *Indonesia Tunggu Konfirmasi Kebutuhan Bantuan untuk Fiji*. Diakses Juli 20, 2017, dari Republika: <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/02/23/o2zj0a366-indonesia-tunggu-konfirmasi-kebutuhan-bantuan-untuk-fiji>

Republika. (2016, Maret 31). *Luhut Serahkan Bantuan Indonesia untuk Fiji*. Diakses Januari 2017, 2017, dari Republika: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/03/31/o4vpw9366-luhut-serahkan-bantuan-indonesia-untuk-fiji>

Republika. (2017, September 27). *Ini Alasan Indonesia Bela Muslim Rohingya dan Palestina*. Diakses Oktober 6, 2017, dari Republika: <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/global/17/09/27/owx4t9396-ini-alasan-indonesia-harus-bela-muslim-rohingya-dan-palestina>

Tabloid Jubi (Portal Berita Tanah Papua No. 1). (Maret 2, 2017). *Tujuh negara Pasifik menuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua*, Diakses Oktober 30 2017 dari Tabloid Jubi (Portal Berita Tanah Papua No. 1): <http://tabloidjubi.com/m/artikel-4142-tujuh-negara-pasifik-tuntut-pbb-tangani-keseluruhan-situasi-west-papua.html>

D., Robie. (2008, Januari 1). *Media and development in the Pacific: Reporting the why, how and what now*. Diakses September 10, 2017 dari Academia: https://www.academia.edu/750669/Media_and_development_in_the_Pacific_Reporting_the_why_how_and_what_now

Pacific Media Center. (2016, Juni 30) *Fiji's TC Winston - how the media fared covering 'worst ever' Pacific cyclone*. Diakses September 10, 2017 dari: <http://www.pmc.aut.ac.nz/articles/fijis-tc-winston-how-media-fared-covering-worst-ever-pacific-cyclone>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI). (2017, Maret 20). *Kerugian Rp 30 Triliun/Tahun, Kepala BNPB: 150 Juta Warga Berada di Daerah Rawan Bencana*. Diakses September 13, 2017, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI): <http://setkab.go.id/kerugian-rp-30-triliuntahun-kepala-bnpb-150-juta-warga-berada-di-daerah-rawan-bencana>

Sindonews.com. (2015, November 3). *Palestina Tetap Jadi Prioritas Polugri Indonesia*. Diakses Juli 18, 2017, dari Sindonews.com: <http://international.sindonews.com/read/1058549/40/palestina-tetap-jadi-prioritas-polugri-indonesia-1446549195>

Sky News. (2016, Februari 21). *Cyclone Winston 'strongest ever' to Hit Fiji*. Diakses Januari 21, 2017, dari Sky News: <http://www.skynews.com.au/news/top-stories/2016/02/21/cyclone-winston--strongest-ever--to-hit-fiji.html>

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). (2016, Agustus 29). *Satgas Kizi TNI terima Apresiasi dari Panglima Militer Fiji*. Diakses Juli 22, 2017, dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD): <https://tniad.mil.id/2016/08/satgas-kizi-tni-terima-apresiasi-dari-panglima-militer-fiji/>

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). (2016, Juni 2). *Satgas Kizipur 9 Kostrad Operasi Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Topan Winston di Fiji*. Diakses Juli 21, 2017, dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD): <https://tniad.mil.id/2016/06/satgas-kizipur-9-kostrad-operasi-bantuan-kemanusiaan-bencana-alam-topan-winston-di-fiji-penkostrad-rabu-2-juni-2016-satgas-kizi-tni-operasi-bantuan-kemanusiaan-fiji-berjumlah-100-orang-dengan/>

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). (2017, April 14). *Pasukan Garuda Bangun Masjid untuk Masyarakat Sudan*. Diakses Juli 22, 2017, dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD): <https://tniad.mil.id/2017/04/pasukan-garuda-bangun-masjid-untuk-masyarakat-sudan/>

The Commonwealth. *Fiji: Constitution and Politics*. Diakses September 14, 2017, dari The Commonwealth: <http://thecommonwealth.org/our-member-countries/fiji/constitution-politics>

The Commonwealth Secretariat. (2009, September 1). *Fiji Suspended from the Commonwealth, 1 September 2009*. Diakses September 14, 2017, dari The Commonwealth Secretariat: <http://www.thecommonwealth.org/news/34580/213088/010909fijisuspend.ed.htm>

The Diplomat. (2017, Maret 28). *Indo-Fijian and Fiji's Coup Culture*. Diakses September 12, 2017 dari The Diplomat: <https://thediplomat.com/2017/03/indo-fijians-and-fijis-coup-culture/>

The Jakarta Post. (2014, Desember 2). *Indonesia's Aid Unclear Without Aid Agency*. Diakses Juli 18, 2017, dari The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/02/indonesia-s-aid-unclear-without-aid-agency.html>

The World Bank. *Data: Fiji*. Diakses September 12, 2017, dari The World Bank Open Data: <https://data.worldbank.org/country/Fiji>

The World Bank. *Data: Indonesia*. Diakses September 12, 2017, dari The World Bank Open Data: <https://data.worldbank.org/country/indonesia>

The World Bank. *Interactive Data Access: Fiji*. Diakses September 14, 2017, dari The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI): <http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports>

The World Bank. *Interactive Data Access: Fiji*. Diakses September 14, 2017, dari The World Bank's Worldwide Governance Indicators (WGI): <http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports>

The World Bank. (2015, Juli 1). *The Data Blog: New Country Classifications by Income Level*. Diakses September 12, 2017 dari The World Bank's Data Blog: <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications> pada 12 September 2017 pukul 08.00 WIB.

The World Bank. Data: *Why use GNI per capita to classify economies into income groupings?*. Diakses September 12, 2017, dari The World Bank: <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/378831-why-use-gni-per-capita-to-classify-economies-into>

United Nations Development Programme (UNDP). (t.thn). *Human Development Reports: Human Development Index (HDI)*. Diakses September 12, 2017, dari United Nations Development Programme (UNDP): <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>

United Nations Development Programme (UNDP). (t.thn.). *Human Development Indicators: Indonesia*. Diakses September 12, 2017, dari United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Report,: <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN>

United Nations Development Programme (UNDP). (t.thn.). *Human Development Indicators: Fiji*. Diakses September 12, 2017, dari United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Reports,: <http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/FJI>

Universitas Gadjah Mada (UGM). (2017, Februari 21). *Jutaan Penduduk Indonesia Tinggal di Kawasan Rawan Bencana*. Diakses September 12, 2017, dari Universitas Gadjah Mada (UGM): <https://www.ugm.ac.id/id/berita/13340-jutaan.penduduk.indonesia.tinggal.di.kawasan.rawan.bencana>

Vivanews.com. (2009, Juni 18). *Indonesia Negara Paling Beresiko Bencana*. Diakses September 12, 2017, dari Vivanews.com: <http://www.viva.co.id/berita/nasional/66838-indonesia-negara-paling-beresiko-bencana>

Vivanews.com. (2016, Februari 23). *RI Tunggu Konfirmasi Jepang Terkait Bantuan Fiji*. Diakses September 15, 2017, dari Vivanews.com: <http://www.viva.co.id/berita/dunia/739375-ri-tunggu-konfirmasi-jepang-terkait-bantuan-fiji>

Lain-lain

Republik Indonesia. (2015, Agustus 14). *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia (RI) Dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Jakarta.*

